

# LAPORAN AKHIR

## SURVEI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN WILAYAH KERJA BLUE ACTION FUND (BAF) TAHUN 1



TIM PENYUSUN :

**Dr. Selvi Tebay**

**Yustina L. D. Wambrau, Sp., MGF**Agribuss

**Denny Cliff Mampioer, S.Pi**

**Regina Rumayomi, S.Pi**



**Konservasi  
Alam Nusantara**  
Untuk Indonesia Lestari



**BLUE ACTION FUN  
YAYASAN KONSERVASIALAM NUSANTARA  
UNIVERSITAS PAPUA  
MANOKWARI  
2021**



# LAPORAN AKHIR

## SURVEI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN WILAYAH KERJA BLUE ACTION FUND (BAF) TAHUN 1



TIM PENYUSUN :

**Dr. Selvi Tebay**

**Yustina L. D. Wambraw, Sp., MGF**Agribuss

**Denny Cliff Mampioer, S.Pi**

**Regina Rumayomi, S.Pi**



**Konservasi  
Alam Nusantara**  
Untuk Indonesia Lestari



**BLUE ACTION FUN  
YAYASAN KONSERVASIALAM  
NUSANTARA  
UNIVERSITAS PAPUA  
MANOKWARI  
2021**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>RINGKASAN</b> .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan.....	6
1.4. Output.....	6
1.5. Lingkup Pekerjaan	6
1.6. Susunan/Organisasi laporan.....	7
<b>II. METODE PENELITIAN</b>	8
2.1. Lokasi Dan Waktu Studi.....	8
2.2. Jenis dan Sumber Data.....	10
2.3. Metode Studi.....	11
2.3.1. Metode Pengumpulan Data.....	11
2.4. Metode Analisis Data.....	13
<b>BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	14
3.1. Profile Umum Wilayah Kajian Dan Responden.....	14
3.1.1. Profil Wilayah Kajian Distrik Misool Utara.....	14
3.1.2. Profil Wilayah Kajian Distrik Makbon - Malaumkarta Raya.....	18
3.1.3. Profil Wilayah Kajian Distrik Bikar – Werur Raya.....	29
3.2. PROFIL RESPONDEN.....	40
3.2.1. DISTRIK MISOOL UTARA.....	40
3.2.1.1. Sebaran Umur Responden.....	40
3.2.1.2. Sebaran Jenis Kelamin Responden. ....	41
3.2.1.3. Sebaran Suku Responden.....	42
3.2.1.4. Jumlah Tanggungan Keluarga.....	43
3.2.1.5. Pekerjaan Utama Responden.....	43
3.2.1.6. Pekerjaan Sampingan Responden.....	44
3.2.1.7. Status Responden Dalam Sektor Perikanan.....	45
3.2.1.8. Lama Tinggal Responden dalam kampung.....	46
3.2.1.9. Tingkat Pendidikan Responden.....	47
3.2.2. DISTRIK MAKBON – MALAUMKARTA RAYA.....	47
3.2.2.1. Sebaran Umur Responden.....	48
3.2.2.2. Sebaran jenis kelamin Responden.....	49
3.2.2.3. Sebaran suku responden. ....	50
3.2.2.4. Sebaran tingkat pendidikan Responden.....	51
3.2.2.5. Sebaran Jumlah Tanggungan Keluarga Responden.....	51
3.2.2.6. Sebaran Pekerjaan Utama Responden. ....	52
3.2.2.7. Status Responden dalam sektor perikanan. ....	53
3.2.2.8. Lama Tinggal Responden di Malaumkarta Raya.....	54
3.2.2.9. Pekerjaan Sampingan Responden.....	55
3.2.3. DISTRIK BIKAR – WERUR RAYA.....	56
3.2.3.1. Sebaran Umur Responden.....	56

3.2.3.2. Sebaran Suku Responden.....	57
3.2.3.3. Sebaran Jenis Kelamin Responden.....	58
3.2.3.4. Sebaran Tingkat Pendidikan Responden.....	59
3.2.3.5. Sebaran Jumlah Tanggungan Keluarga Responden.....	60
3.2.3.6. Sebaran Pekerjaan Utama Responden.....	61
3.2.3.7. Sebaran Jenis Pekerjaan Sampingan Responden.....	62
3.2.3.8. Sebaran status responden dalam sektor perikanan.....	63
3.2.3.9. Sebaran Lama Tinggal Responden di kampung.....	64
3.3. Aspek Sosial ekonomi dan Budaya.....	64
3.3.1. Kepemilikan Hak Ulayat Atau Sistem Penguasaan Tanah.....	64
3.3.2. Kelembagaan dan Modal Sosial.....	67
3.3.3. Peran Lembaga Pemerintah.....	69
3.3.4. Peran Lembaga Adat.....	70
3.3.5. Peran Lembaga Agama.....	72
3.3.6. Kerjasama Masyarakat di wilayah survei.....	73
3.3.7. Kecukupan Pangan dalam Keluarga.....	74
3.4. Distribusi Pendapatan Masyarakat di wilayah survei.....	76
3.4.1. Pendapatan utama dan sampingan dari pekerjaan sebagai nelayan.....	76
3.4.2. Pendapatan utama dan sampingan dari pekerjaan sebagai petani.....	78
3.4.3. Pendapatan di sektor perkebunan.....	80
3.4.4. Pendapatan di sektor perkebunan.....	80
3.4.5. Pendapatan di sektor Peternakan.....	81
3.4.6. Pendapatan Penadah Ikan di kampung.....	82
3.4.7. Pendapatan Penadah Kopra.....	82
3.4.8. Alokasi Pendapatan RT.....	83
3.4.8.1. Alokasi untuk kegiatan Produksi (Rumah Tangga Nelayan).....	83
3.4.8.2 Alokasi untuk kegiatan Produksi (Rumah Tangga Non Nelayan).....	85
3.4.8.3. Biaya Pemasaran.....	87
3.4.8.4 Alokasi untuk konsumsi(Rumah Tangga Nelayan).....	87
3.4.8.5 Alokasi untuk konsumsi(Rumah Tangga Non Nelayan).....	88
3.4.9. Rantai Pemasaran.....	89
<b>BAB IV. TATA KELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN ADAT DI PERAIRAN MISOOL UTARA, MALAUMKARTA SORONG DAN BIKAR TAMBRAUW</b>	93
4.1. Hak Terhadap Sumberdaya.....	93
4.1.1. Hak Masuk dan memanfaatkan sumberdaya.....	93
4.1.2. Hak Pengelolaan/Mengatur.....	97
4.1.3. Konflik Sosial dalam pemanfaatan sumberdaya.....	99
4.1.4. Organisasi Kemasyarakatan.....	103
4.1.5. Struktur dan Peran Pemerintah Kampung.....	104
4.1.6. Kelembagaan ADAT.....	109
4.1.7. Struktur kelembagaan Adat.....	112
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	121
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	123
<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI</b>	125

## Daftar Tabel

Tabel 1. Tim Peneliti survei sosial ekonomi di wilayah kerja BAF tahun 2021.....	7
Tabel 2. Data RW dan RT di Distrik Misool Utara.....	15
Tabel 3. Jenis alat transportasi di Distrik Misool Utara.....	18
Tabel 4. Topografi Wilayah Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Makbon, 2020.....	19
Tabel 5. Status Pemerintahan dan Jumlah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkecil berdasarkan Kampung/Kelurahan.....	19
Tabel 6. Jumlah Aparat Kampung/Kelurahan Menurut Kampung/Kelurahan.....	19
Tabel 7. Jumlah Keluarga Pengguna Listrik dan Bukan Pengguna Listrik Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Makbon, 2020.....	24
Tabel 8. Kampung/Kelurahan Menurut Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang digunakan oleh sebagian besar Keluarga Kampung/Kelurahan Menurut Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Digunakan oleh Sebagian Besar Keluarga di Distrik Makbon, 2020.....	24
Tabel 9. Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kampung/Kelurahan di Distrik Makbon, 2020.....	25
Tabel 10. Banyaknya Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Ibtidaiyah Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Makbon, 2020.....	25
Tabel 11. Banyaknya Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Makbon, 2020.....	25
Tabel 12. Kemudahan untuk Mencapai Sarana Pendidikan Terdekat Bagi Kampung/Kelurahan yang Tidak ada Sarana Pendidikan Menurut Kampung/Kelurahan dan Jenjang Pendidikan di Distrik Makbon, 2020.....	26
Tabel 13. Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Kampung/Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Makbon, 2020.....	26
Tabel 14. Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Jenis dan Kampung/Kelurahan di Distrik Makbon, 2020.....	27
Tabel 15. Jumlah Koperasi Menurut Jenis dan Kampung/Kelurahan di Distrik Makbon, 2020.....	27
Tabel 16. Jumlah Menara dan Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler Serta Kondisi Sinyal Telepon Seluler Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Makbon, 2020.....	28
Tabel 17. Kondisi Jalan Darat Antar Kampung/Kelurahan Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Makbon, 2020.....	28
Tabel 18. Topografi wilayah berdasarkan Kampung/Kelurahan di Distrik Bikar, 2020.....	29
Tabel 19. Status Pemerintahan dan Jumlah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) Terkecil Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Bikar, 2020.....	30
Tabel 20. Jumlah Aparat Kampung/Kelurahan Menurut Kampung/Kelurahan.....	30
Tabel 21. Jumlah Keluarga Pengguna Listrik dan Bukan Pengguna Listrik Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Bikar, 2020.....	35
Tabel 22. Kampung/Kelurahan Menurut Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Digunakan oleh Sebagian Besar Keluarga di Distrik Bikar, 2020.....	35
Tabel 23. Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kampung/Kelurahan di Distrik Bikar, 2020.....	36
Tabel 24. Banyaknya Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Bikar, 2020.....	36
Tabel 25. Banyaknya Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Bikar, 2020.....	36
Tabel 26. Kemudahan untuk Mencapai Sarana Pendidikan Terdekat Bagi Kampung/Kelurahan	37

yang Tidak ada Sarana Pendidikan Menurut Kampung/Kelurahan dan Jenjang Pendidikan di Distrik Makbon, 2020.....	
Tabel 27. Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Kampung/Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Bikar, 2020.....	37
Tabel 28. Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Jenis dan Kampung/Kelurahan di Distrik Bikar, 2020.....	38
Tabel 29. Jumlah Menara dan Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler Serta Kondisi Sinyal Telepon Seluler Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Bikar, 2020.....	38
Tabel 30. Kondisi Jalan Darat Antar Kampung/Kelurahan Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Makbon, 2020.....	39
Tabel 31. Jenis Penerangan Jalan Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Bikar, 2020.....	39
Tabel 32. Model jalur pemasaran ikan oleh nelayan.....	90

## Daftar Gambar

Gambar 1. Lokasi Survei Sosek dan Livelihood di Distrik Misool Raja Ampat.....	8
Gambar 2. Lokasi Survei Sosek dan Livelihood di Distrik Makboon wilayah Malaumkarta Raya.....	9
Gambar 3. Lokasi Survei Sosek dan Livelihood di Distrik Bikar wilayah Werur Raya.....	9
Gambar 4. : FGD di Kampung Atkari.....	12
Gambar 5. Wawancara mendalam face to Face di Kampung Salafen.....	12
Gambar 6. Jumlah Penduduk perkampung di Distrik Misool Utara.....	15
Gambar 7. Penggunaan Listrik PLN dan Non-PLN di Distrik Misool Utara.....	16
Gambar 8. Fasilitas Peribadatan di Distrik Misool Utara.....	16
Gambar 9. Fasilitas Sekolah di Distrik Misool Utara.....	16
Gambar 10. Fasilitas Kesehatan di Distrik Misool Utara.....	17
Gambar 11. Fasilitas Toko/Warung kelontong/Kios.....	17
Gambar 12. Jumlah penduduk di distrik Makbon .....	20
Gambar 13. Data jumlah penduduk di distrik Makbon .....	21
Gambar 14. Rasio Jenis Kelamin di Distrik Makbon-Malaumkarta Raya .....	21
Gambar 15. Jumlah Penduduk Malaumkarta Raya .....	22
Gambar 16. Jumlah Kepala Keluarga di Malaumkarta Raya.....	22
Gambar 17. Interval usia (tahun) di Malaumkarta Raya.....	23
Gambar 18. sebaran gender di Malaumkarta Raya.....	23
Gambar 19. Alat Transportasi yang dimiliki di Malaumkarta Raya.....	29
Gambar 20. Jumlah penduduk di Distrik Bikar.....	31
Gambar 21. Persentase penduduk di distrik Bikar.....	31
Gambar 22. Rasio jenis Kelamin di distrik Bikar.....	32
Gambar 23. Jumlah penduduk di wilayah werur raya.....	33
Gambar 24. Jumlah Kepala Keluarga di wilayah Werur Raya.....	33
Gambar 25. Jumlah Usia penduduk di wilayah Werur raya.....	34
Gambar 26. sebaran gender di wilayah werur raya.....	34
Gambar 27. Alat Transportasi yang dimiliki di Malaumkarta Raya.....	40
Gambar 28. Sebaran dan Persentase umur Responden di Distrik Misool Utara.....	40
Gambar 29. Sebaran responden berdasarkan jenis kelamin di setiap kampung Pengamatan.....	41
Gambar 30. Sebaran Persentase keseluruhan responden di Distrik Misool Utara.....	42
Gambar 31. Sebaran Jumlah Tanggungan dalam Keluarga di Distrik Misool Utara.....	43
Gambar 32. Sebaran dan Persentase jenis pekerjaan utama responden di Distrik Misool Utara.....	44
Gambar 33. Sebaran dan Persentase jenis pekerjaan sampingan responden di Distrik Misool	45

Utara.....	45
Gambar 34. Status Responden dalam sektor perikanan di Malaumkarta Raya.....	45
Gambar 35. Sebaran dan Persentase lama tinggal Responden di Distrik Misool Utara.....	46
Gambar 36. Sebaran dan Persentase tingkat pendidikan responden di Distrik Misool Utara.....	47
Gambar 37. Sebaran Umur Responden di Malaumkarta Raya.....	48
Gambar 38. Sebaran Jenis Kelamin Responden di Malaumkarta Raya.....	49
Gambar 39. Sebaran Suku di wilayah Malaumkarta raya.....	50
Gambar 40. Sebaran tingkat pendidikan Responden.....	51
Gambar 41. sebaran Jumlah Tanggungan keluarga Responden.....	52
Gambar 42. Sebaran Pekerjaan Utama Responden.....	53
Gambar 43. Sebaran dan Persentase Jenis Kelamin Responden di Werur ray.....	53
Gambar 44. Lama Tinggal Responden di Malaumkarta Raya.....	54
Gambar 45. Pekerjaan Sampingan Responden di wilayah Malaumkarta Raya.....	55
Gambar 46. Sebaran dan persentase umur responden di wilayah Werur Raya.....	57
Gambar 47. Sebaran dan Persentase Suku Responden di Werur Raya.....	58
Gambar 48. Sebaran dan Persentase Jenis Kelamin Responden di Werur raya.....	59
Gambar 49. Sebaran dan Persentase Tingkat Pendidikan Responden di Werur raya.....	60
Gambar 50. Sebaran dan Persentase Tingkat Pendidikan Responden di Werur raya.....	61
Gambar 51. Sebaran dan Persentase Pekerjaan Utama Responden di wilayah Werur Raya.....	62
Gambar 52. Sebaran dan Persentase Jenis Pekerjaan Sampingan Responden di wilayah Werur Raya.....	63
Gambar 53. Sebaran dan persentase status responden dalam sektor perikanan di wilayah Werur Raya.....	63
Gambar 54. Sebaran Lama Tinggal Responden di kampung Werur Raya.....	64
Gambar 55. Peran Lembaga Tiga Tungku di wilayah Survei.....	68
Gambar 56. Peran Pemerintah dalam kehidupan masyarakat di Lokasi Survei.....	69
Gambar 57. Peran Dewan Adat dalam kehidupan masyarakat di Lokasi Survei.....	71
Gambar 58. Peran Lembaga Keagamaan Dalam Kehidupan Masyarakat Di Lokasi Survei.....	72
Gambar 59. Kerjasama masyarakat di Tiga Distrik wilayah Survei.....	74
Gambar 60. Persentase Persediaan Pangan Pada RT.....	75
Gambar 61. Persentase Kekurangan Pangan Pada RT.....	76
Gambar 62. Pendapatan nelayan sebagai pekerjaan utama masyarakat di wilayah survei.....	77
Gambar 63. Pendapatan nelayan sebagai pekerjaan sampingan masyarakat di wilayah survei.....	78
Gambar 64. Pendapatan Pertanian Sebagai Pencaharian Utama masyarakat di wilayah survei.....	79
Gambar 65. Pendapatan Pertanian Sebagai Pencaharian sampingan masyarakat di wilayah Survei.....	80
Gambar 66. Pendapatan sektor perkebunan masyarakat di wilayah survei.....	81
Gambar 67. Pendapatan dari Peternakan masyarakat di wilayah survei.....	81
Gambar 68. Pendapatan Penadah Ikan di wilayah survei.....	82
Gambar 69. Pendapatan Penadah Kopra di wilayah survei.....	83
Gambar 70. Alokasi biaya tetap RT nelayan di tiga Distrik pengamatan.....	84
Gambar 71. Alokasi biaya tidak tetap RT nelayan di tiga Distrik pengamatan.....	85
Gambar 72. Alokasi biaya tetap RT Non Perikanan tetap di tiga Distrik pengamatan.....	86
Gambar 73. Alokasi biaya tidak tetap RT Non Perikaan di tiga Distrik pengamatan.....	86
Gambar 74. Alokasi Biaya Pemasaran di 3 Distrik pengamatan.....	87
Gambar 75. Sebaran pengeluaran konsumsi RT Nelayan di tiga Distrik pengamatan.....	88
Gambar 76. Sebaran Pengeluaran konsumsi RT Non Nelayan di 3 Distrik pengamatan.....	89
Gambar 77. Pemahaman masyarakat Misool tentang Akses masuk wilayah tangkap dan akses	94

terhadap pemanfaatan sumberdaya.....	
Gambar 78. Persepsi masyarakat malaumkarta Raya terhadap hak akses ke daerah penangkapan dan hak pemanfaatan sumberdaya.....	96
Gambar 79. Persepsi masyarakat Werur Raya terhadap hak akses ke daerah penangkapan dan hak pemanfaatan sumberdaya.....	96
Gambar 80. Persepsi masyarakat Misool Utara dalam membuat keputusan pengelolaan akses ke FG dan menjual atau menyewakan hak.....	97
Gambar 81. Persepsi masyarakat Malaumkarta Raya dalam membuat keputusan Pengelolaan, akses Ke FG dan menjual/menyewakan hak.....	98
Gambar 82. Persepsi masyarakat Werur Raya dalam membuat keputusan Pengelolaan, akses Ke FG dan menjual/menyewakan hak.....	99
Gambar 83. Tingkat Konflik pemanfaatan sumberdaya di KKP Misool Utara.....	100
Gambar 84. Tingkat Konflik pemanfaatan sumberdaya di Malaumkarta Raya.....	101
Gambar 85. Presentase dan tingkat Konflik pemanfaatan sumberdaya di Werur Raya.....	102
Gambar 86. Struktur dan Peran Pemerintah kampung dalam Pembangunan Kampung di Misool Utara.....	105
Gambar 87. Peran Pemerintah kampung dalam Kegiatan pemberdayaan kesehatan dan Pendidikan Masyarakat di Misool Utara.....	106
Gambar 88. Struktur dan Peran Pemerintah kampung dalam Pembangunan Kampung di wilayah Malaumkarta Raya.....	106
Gambar 89. Peran Pemerintah kampung dalam pemberdayaan, kesehatan dan pendidikan masyarakat di Malaumkarta Raya.....	107
Gambar 90. Struktur dan Peran Pemerintah kampung dalam Pembangunan Kampung di wilayah Werur Raya.....	108
Gambar 91. Peran Pemerintah kampung dalam pemberdayaan, kesehatan dan pendidikan masyarakat di Werur Raya.....	109
Gambar 92. Keberadaan dan Peran Perkumpulan Adat di Misool Utara.....	110
Gambar 93. Keberadaan dan Peran Perkumpulan Adat di Malaumkarta Raya.....	111
Gambar 94. Keberadaan dan Peran Perkumpulan Adat di Werur Raya.....	112
Gambar 95. Struktur kelembagaan Adat suku Maya.....	115
Gambar 96. Struktur kelembagaan pengelolaan Sumberdaya ikan secara tradisional (Sasi Egek) di wilayah MHA Malaumkarta Sorong.....	117
Gambar 97. Struktur Pemerintahan Adat Komunitas Bikar.....	119



## RINGKASAN

Tujuan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dibentuk adalah untuk menjamin pengelolaan efektif dalam jangka panjang dari kekayaan sumberdaya laut dalam rangka menjamin ketahanan pangan, keuntungan ekonomi yang berkelanjutan, dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Untuk memastikan tujuan dari pembentukan KKP baru dan efektivitas KKP maka penelitian aspek sosial ekonomi dilakukan di wilayah KKP Misool Utara, MHA Malaumkarta dan MHA Werur Papua Barat. Survei ini Dilaksanakan pada 18 Oktober–1 November 2021 di 3 kawasan konservasi yang terletak di 3 Distrik dan 15 kampung pengamatan dengan 170 responden. Data dan informasi diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam kepada responden menggunakan panduan pertanyaan dan juga dengan Fokus Grup Diskusi (FGD) di kampung. Informasi dari responden yang diperoleh kemudian diolah secara statistik deskriptif yakni data tersebut di tabulasi dan di tampilkan dalam bentuk gambar, tabel dan grafik untuk menjelaskan hasil yang diperoleh dalam survei ini. Parameter sosial ekonomi yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebaran umur, sebaran suku, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan utama dan sampingan, lama tinggal di kampung, jumlah tanggungan dalam keluarga, status dalam sektor perikanan, kelembagaan dan modal sosial, hak ulayat, peran lembaga pemerintah, lembaga adat dan lembaga gereja, kecukupan pangan dalam keluarga. Hasil menunjukkan bahwa secara keseluruhan aspek sosial ekonomi yang disebutkan ini mendukung rencana pembentukan KKP baru. Aspek ekonomi terutama pasar menjadi program utama yang harus direncanakan dengan baik dalam mendukung keberlangsungan KKP yang ada. Untuk mencapai level KKP Mandiri dengan tujuan kesejahteraan masyarakat meningkat berdampak secara positif kepada dukungan masyarakat terhadap program konservasi, maka perlu pelibatan masyarakat lokal khususnya masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat sebagai subyek dari kegiatan konservasi yang ada. Dengan pengakuan terhadap Hak Kepemilikan wilayah serta praktek pemanfaatan secara tradisional yang telah mengakar pada komunitas tersebut.

Kata kunci : konservasi, aspek sosial ekonomi, KKP Misool Utara, MHA Malaumkarta, MHA Werur

## **LAPORAN AKHIR**

### **Survei Sosial Ekonomi Masyarakat di Kawasan Konservasi Wilayah Kerja Blue Action Fund (BAF) Tahun Pertama**

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Kawasan konservasi perairan (KKP) didefinisikan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan berdasarkan PP No. 60 Tahun 2007 pasal 1. IUCN – The Conservation Union, mendefinisikan kawasan konservasi laut sebagai suatu area atau daerah di kawasan pasang surut beserta kolom air di atasnya dan flora dan fauna serta lingkungan budaya dan sejarah yang ada di dalamnya, yang diayomi oleh undang-undang untuk melindungi sebagian atau seluruh lingkungan yang tertutup. Lebih lanjut, menurut UU 27/2007, Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.

Tujuan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dibentuk adalah untuk menjamin pengelolaan efektif dalam jangka panjang dari kekayaan sumberdaya laut dalam rangka menjamin ketahanan pangan, keuntungan ekonomi yang berkelanjutan, dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Besarnya Potensi sumberdaya ikan bernilai ekonomis penting di setiap kawasan konservasi perairan yang ada, maka perlu diterapkan sistem pengelolaan perikanan yang memberikan ruang bagi keberlanjutan sumberdaya ikan tersebut serta mendukung sosial ekonomi masyarakat di Kawasan KKP tersebut. Model pengelolaan yang tepat dan didasarkan kepada hasil kajian ilmiah yang tersedia akan berguna dalam pemanfaatan sumberdaya ikan dan biota lainnya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada kawasan konservasi tersebut.

KKP tidak hanya mengandalkan tingkat perlindungan, tetapi juga dalam desain awal jejaring untuk meningkatkan stok ikan dan biomassa. Ini akan memastikan bahwa jejaring Kawasan

Konservasi Perairan adalah termasuk semua spesies, tahap kehidupan dan hubungan ekologis (Friedlander *et al.*, 2003). Meskipun suatu habitat dapat memfasilitasi pergerakan spillover secara terus menerus, namun ada kemungkinan terjadi peningkatan spillover spesies tertentu hanya menuju ke tempat dan terarah tertentu, sehingga desain KKP harus didasarkan pada perilaku spesies-spesifik termasuk habitat yang berdekatan yang cukup besar untuk mendukung rentang pergerakan spillover spesies ikan (Kaundra-Arara dan Rose, 2004).

Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi Perairan meliputi: peningkatan perlindungan kawasan konservasi; pencegahan dampak negatif kegiatan/aktivitas manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; dan peningkatan fungsi kawasan konservasi untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung.

Tujuan Penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan adalah untuk: melindungi dan melestarikan sumber daya ikan serta tipe ekosistem penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya; mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya serta jasa lingkungannya secara berkelanjutan; melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Konservasi Perairan; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.

Potensi terumbu karang di Raja Ampat berhasil diidentifikasi sebanyak 456 jenis karang yang termasuk dalam 77 marga (Veron 2002). Di wilayah Misool Utara Ditemukan sebanyak 55 marga dari 17 suku karang keras di 24 titik pengambilan data. *Acropora*, *Montipora*, *Porites*, *Favia*, dan *Galaxea* adalah marga karang yang sering dijumpai di Misool Utara. Pulau Yeflie stasiun 16 adalah lokasi yang paling tinggi keanekaragaman genus karangnya yaitu 41 genus. Di pulau ini juga ditemukan banyak rekrutmen karang keras yang menjadi penyusun utama terumbu karang (hasil *Marine Rapid Assessment Program (MRAP)*, 2019).

Atas inisiatif Masyarakat Adat di wilayah Misool Utara dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat, Kawasan Konservasi Perairan Adat Misool Utara telah ditetapkan oleh Masyarakat Adat melalui Deklarasi Adat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2018 bertempat di Pulau

Muslat, Distrik Misool Utara. Luas wilayah Kawasan Konservasi Perairan Adat yang dideklarasikan secara adat oleh masyarakat adalah seluas 313.708 hektar. Acara deklarasi ini juga didukung dan turut dihadiri oleh Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2019, Loka PSPL Sorong sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) melaksanakan identifikasi potensi Calon Kawasan Konservasi Perairan (CKKP) di perairan yang meliputi Distrik Makbon, Selemkai dan Mega, kabupaten Sorong dan Distrik Selemkai dan Moraid, kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat dengan luas area perairan yang menjadi area perencanaan meliputi  $\pm$  140,000 Ha.

Komunitas Bikar, yang hidup di 8 kampung di Distrik Bikar, Kabupaten Tambrauw merupakan salah satu komunitas yang memiliki ragam budaya dan tradisi, khususnya yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Salah satu yang terkenal adalah praktik Sasi Laut dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut. Praktek Sasi laut memberi ruang keadilan distribusi sumberdaya secara komunal, juga keadilan ekologis karena sumberdaya dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan ekosistem perairan tetap dijaga.

Praktik Sasi sangat rentan terhadap perubahan sosial baik yang terjadi di internal masyarakat maupun tekanan eksternal dari luar masyarakat. Beberapa kasus hilangnya praktek sasi laut di desa-desa adat di Maluku menjadi fakta ancaman perubahan dimaksud. Untuk itu diperlukan sebuah rencana aksi bagi pemberdayaan masyarakat adat Komunitas Bikar agar dapat mempertahankan keberlanjutan Sasi ke depannya. Sedangkan Masyarakat di Amberbaken Barat termasuk dalam Suku *Mpur Wot* lokasi tinggal mereka berada di wilayah pesisir pantai. Dengan lokasi mereka yang tinggal di pantai maka mereka memiliki wilayah ulayat di laut. Dalam pengelolaannya mereka menerapkan aturan sasi laut yang menjadi salah satu aturan adat mereka

Kawasan konservasi perairan pada dasarnya memiliki tujuan supaya tercapainya keterpaduan antara kepentingan ekologis, sosial dan ekonomi. Dengan dicadangkannya suatu kawasan menjadi kawasan konservasi itu berarti bahwa kawasan tersebut secara ekologis diharapkan dapat melindungi, memelihara dan melestarikan ekosistem yang ada dan yang berasosiasi dengannya sedangkan terhadap kondisi sosial dan ekonomi diharapkan supaya tercipta suatu sistem dan mekanisme pengelolaan yang berbasis masyarakat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek hukum dalam pemanfaatan potensinya sehingga

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan KKP haruslah dilakukan dengan cara : meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi yang adaptif, berbasis ekosistem, keterpaduan dan kelestarian; meningkatkan kapasitas kelembagaan yang partisipatif dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut; mengintegrasikan dan mensinergikan fungsi kawasan dengan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; memberdayakan kelompok sosial, budaya dan ekonomi masyarakat kawasan konservasi; mengendalikan aktivitas penangkapan ikan skala kecil di zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan konservasi; pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut di kawasan konservasi.

Untuk mencapai level KKP Mandiri dengan tujuan kesejahteraan masyarakat meningkat berdampak secara positif kepada dukungan masyarakat terhadap program konservasi, maka perlu pelibatan masyarakat lokal khususnya masyarakat adat pemilik kawasan sebagai subyek dari kegiatan konservasi yang ada. Dengan pengakuan terhadap Hak Kepemilikan wilayah serta praktek pemanfaatan secara tradisional yang telah mengakar pada komunitas tersebut.

Berdasarkan latar belakang maka data sosial ekonomi budaya dan kelembagaan lokal menjadi salah satu informasi penting yang harus dikaji, sebagai basis data untuk kemudian dilakukan penilaian terhadap kondisi sosial ekonomi budaya dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam tahap pengembangan perencanaan pengelolaan KKP di wilayah kerja Proyek BAF.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Kawasan Konservasi Perairan didirikan untuk tujuan melestarikan keanekaragaman hayati dan sumberdaya perairan sekaligus mendukung pemanfaatan yang berkelanjutan. Oleh karenanya, pendirian KKP dilakukan dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan ekosistem yang sehat. Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan tempat berlindung dan berkembang biak bagi sumberdaya ikan guna menjamin kelestarian dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Bila dirancang dan dikelola dengan baik, KKP dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, banyak pihak dan negara yang mendirikan KKP guna mendukung pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya pesisir dan laut.

Menurut Claudet et al. (2006), kawasan konservasi dapat memberikan pengaruh positif terhadap kondisi ekosistem seperti yang ditunjukkan dengan melimpahnya populasi ikan dan tingginya keanekaragaman jenis ikan di dalam kawasan konservasi, dibandingkan dengan sebelum kawasan tersebut menjadi KKP (Bohnsack et al. (2000)), juga menjelaskan bahwa KKP memberikan manfaat langsung dalam pemulihan stok ikan yang telah mengalami tangkap lebih (*overfishing*), disamping sebagai perangkat yang efektif untuk pengelolaan perikanan.

Selain kelebihan KKP ada juga kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan ukuran, cakupan kawasan, maupun letaknya. Sebagai contoh, ukuran KKP yang relatif kecil tidak serta-merta dapat melindungi keanekaragaman hayati dan sumberdaya yang berada di dalamnya. Selain itu, kemungkinan letaknya yang 'kurang menguntungkan' menyebabkannya rentan terhadap dampak negatif.

Aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan merupakan ancaman yang paling dominan dan sangat berpotensi merusak ekosistem sekaligus menghilangkan keanekaragaman terumbu karang serta biota lainnya. Salah satu kegiatan yang berpotensi merusak terumbu karang yaitu eksploitasi karang yang dijadikan sebagai bahan rumah tangga, penurunan jangkar kapal pada daerah terumbu karang, dan berjalan diatas terumbu karang (Suharsono, 1998 in Defi et al 2009).

Seperti halnya di Misool Utara pemanfaatan berlebih sudah berlangsung di perairan ini, banyaknya perahu bagan berukuran besar maupun kecil. Info dari petuanan dan tim patroli masyarakat, bahwa belum ada pengaturan yang baik terkait ini. Pemilik perahu bagan hanya meminta izin kepala kampung dan petuanan. Salah satu upaya untuk mengurangi dampak kerusakan antropogenik adalah dengan program pemberdayaan kepada masyarakat.

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang belum berjalan optimal oleh karena itu program pemberdayaan haruslah dalam segala aspek kehidupannya mulai dari mata pencaharian, tata kelola sumberdaya, ekonomi dan politik, budaya dan seni, serta kelembagaan lokal dalam mendukung perlindungan adat dan kebudayaan serta peningkatan kesejahteraan mereka, perlu ditingkatkan. Sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah aksi adaptif yang dapat diterima oleh masyarakat.

Disisi lain, pengembangan masyarakat adat dan kelembagaannya harus memperhatikan norma, nilai, dan praktek-praktek kearifan lokal yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari aspek kebudayaan dan adat-istadat masyarakat. Prasyarat ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan upaya kehadiran negara dengan kedaulatan budaya masyarakat adat dalam menata kelola kehidupan komunitas tersebut dalam sebuah KKP (KKP, 2013).

### **1.3. Tujuan**

Tujuan dari survei sosial ekonomi masyarakat di wilayah KKP MHA adalah :

Tujuan 1. Pengumpulan data sosial ekonomi budaya dan kelembagaan lokal Masyarakat KKP Misool Utara di Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat (Kampung Atkari, Solal, Salafen, Waigama dan Aduwei)

Tujuan 2. Pengumpulan data sosial ekonomi budaya dan kelembagaan lokal Masyarakat di Distrik Makbon Kabupaten Sorong (MHA Malaumkarta Raya – kampung Malaumkarta, Suatolo, Mibi dan Suatut)

Tujuan 3. Pengumpulan data sosial ekonomi budaya dan kelembagaan lokal Masyarakat di Werur raya Kab Tambrauw (kampung werur, werkaf, wertam, wertim, Bukit dan Suyam)

### **1.4. Output**

- Mendapatkan data dan Informasi lengkap tentang kondisi sosial ekonomi budaya dan kelembagaan lokal masyarakat di kawasan proyek BAF
- Data yang dihasilkan mendukung pembentukan kawasan konservasi perairan atau perikanan berbasis hak teritorial (TURFs) untuk melindungi habitat penting
- Pengembangan perencanaan pengelolaan KKP di wilayah Proyek BAF

### **1.5. Lingkup Pekerjaan**

Lingkup Pekerjaan 1. Pengumpulan data aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang ada di wilayah proyek BAF.

Lingkup Pekerjaan 2. Pengumpulan informasi terkait dengan kelembagaan lokal dan praktek pengetahuan lokal atau tradisi masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.

### 1.6. Susunan/Organisasi laporan

Tim Peneliti survei Sosial Ekonomi di wilayah kerja BAF terdiri dari tenaga ahli, asisten ahli dan enumerator :

Tabel 1. Tim Peneliti survei sosial ekonomi di wilayah kerja BAF tahun 2021.

No	Nama	Keahlian/tanggungjawab
1	Dr. Selvi Tebay	Sosek Perikanan/Tenaga Ahli/Penulis
2	Yustina L Yambrauw. SP, Magris	Sosek Pertanian/Asisten tenaga ahli/Penulis
3	Denny Cliff Mampioper. S.Pi	MSP/ Enumerator dan Penulis
4	Regina Rumayomi. S.Pi	MSP/ Enumerator



## BAB 2

### METODE PENELITIAN

#### 2.1. Lokasi Dan Waktu Studi

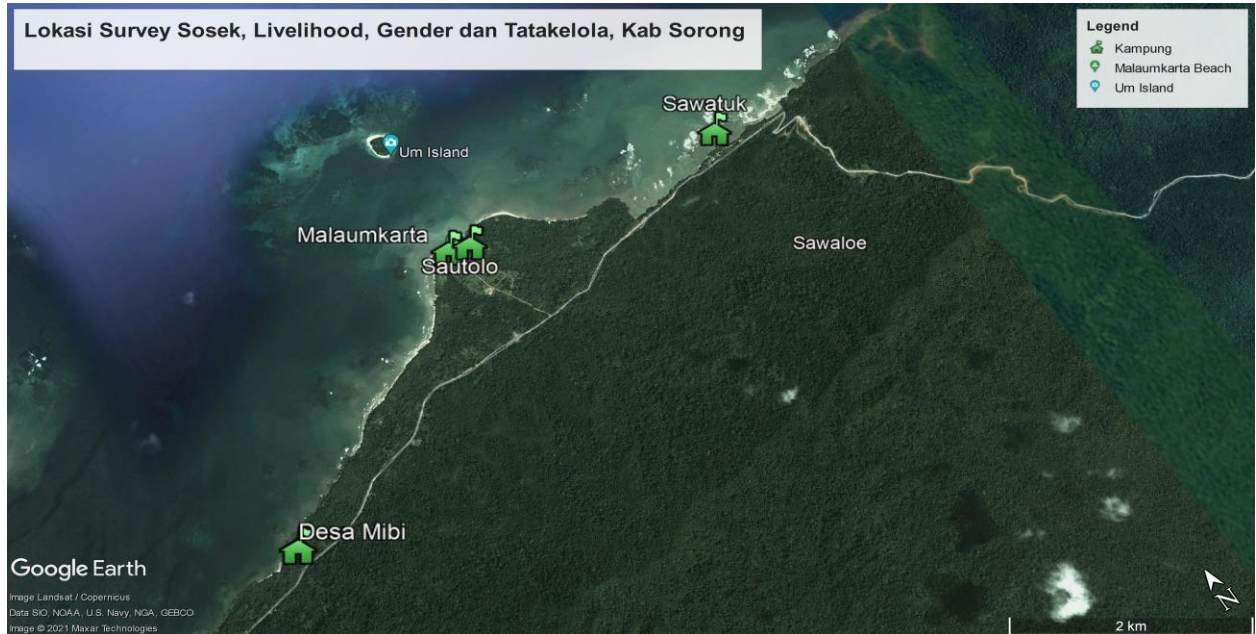
Survei sosial ekonomi ini dilaksanakan pada Bulan Oktober – Desember Tahun 2021 bersama dengan survei penghidupan masyarakat (livelihood) di lokasi Proyek Blue Action Fund (BAF) (Gambar 1) yaitu di tiga wilayah kawasan konservasi Perairan. Survei lapangan dilaksanakan pada 18 Oktober – 1 November 2021.

1. Wilayah KKP Misool Utara Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat melingkupi 5 kampung pengamatan yaitu kampung Atkari, Solal, Salafen, Waigama dan Aduwei.



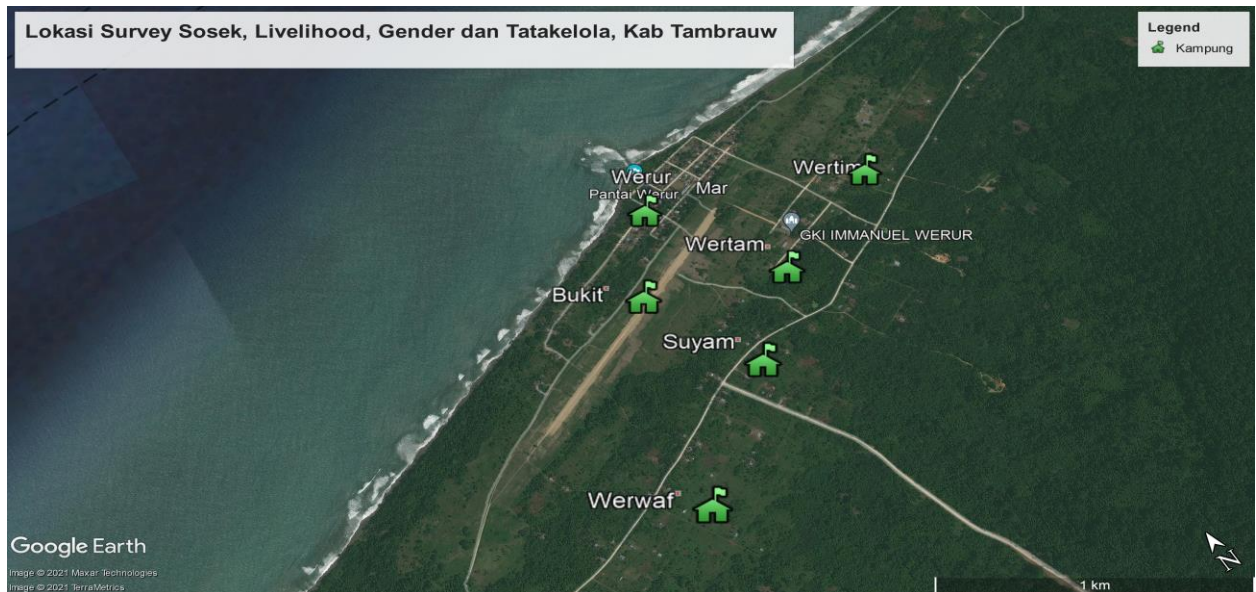
Gambar 1. Lokasi Survei Sosek dan Livelihood di Distrik Misool Raja Ampat

2. Wilayah MHA Malaumkarta Distrik Makbon Kabupaten Sorong dmelingkupi kampung Malaumkarta, Suatolo, Mibi dan Suatut.



Gambar 2. Lokasi Survei Sosek dan Livelihood di Distrik Makboon wilayah Malaumkarta Raya

3. Wilayah MHA Bikar Distrik Bikar Kabupaten Tambrau meliputi Kampung Werur, Werwaf, Werwaf, Wertim, Wertam, Bukit dan Suyam.



Gambar 3. Lokasi Survei Sosek dan Livelihood di Distrik Bikar wilayah Werur Raya

## 2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer yang berasal dari survei lapang dengan menggunakan kuesioner terstruktur dan didukung oleh data sekunder yang berasal dari hasil hasil kajian instansi terkait : BPS Kabupaten Raja Ampat, Sorong dan Tambrauw, Rujukan hasil penelitian dari CII, UNIPA, YKAN dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Raja Ampat, Sorong dan Tambrauw serta Provinsi Papua Barat dan Kementrian Kelautan dan Perikanan RI serta informasi lainnya yang mendukung informasi yang dibutuhkan.

Data primer yang dikumpulkan meliputi Data kondisi sosial, ekonomi dan budaya mencakup beberapa variabel yaitu :

### 1. Aspek sosial dan budaya:

- a. Kependudukan: jumlah penduduk total, jumlah penduduk berdasarkan gender, jumlah penduduk berdasarkan komposisi umur, rata-rata jumlah anggota keluarga dalam, jumlah penduduk berdasarkan agama, suku, pendidikan
- b. Kesehatan: sarana dan prasaran kesehatan (puskesmas, pustu, jumlah dokter/bidan/perawat, penyakit yang paling sering diderita warga secara luas, bagaimana cara mengobatinya)
- c. Pendidikan: jumlah sekolah, guru, prasarana sekolah
- d. Dukungan masyarakat
- e. Kelembagaan masyarakat :
  - kelembagaan yang ada dan sistem keanggotaannya
  - Tempat-tempat penting bagi masyarakat secara sosial budaya di wilayah pesisir dan laut
  - Aturan pengelolaan dan pemanfaatan hasil laut yang pernah berlaku di masyarakat (praktik pengetahuan lokal/ traditional knowledge)
- f. Potensi konflik kepentingan
- g. Persepsi masyarakat atas kondisi sumber daya alam laut
- h. Partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan pengelolaan kawasan konservasi perairan

## 2. Aspek Ekonomi:

### a. Sumber penghidupan masyarakat:

- Jumlah orang yang memanfaatkan laut dan hasilnya berdasarkan musim
- Lokasi pemanfaatan
- Pemanfaatan sumber daya yang tidak ramah lingkungan

### b. Nilai penting perikanan

### c. Kemudahan mencapai kawasan, termasuk didalamnya sarana dan prasana kampung secara umum

## 2.3. Metode Studi

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif eksploratif yaitu kegiatan survei lapangan ke lokasi penelitian yang ditentukan yaitu lokasi Proyek BAF, sesuai dengan kebutuhan atau tujuan penelitian (Pare,2015). Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena. Dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan yang dijumpai dilapangan berdasarkan fakta/kebenarannya.

### 2.3.1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terhadap Masyarakat di Kampung kampung wilayah kerja BAF. Teknik wawancara yang digunakan yaitu dengan FGD (*Focus Group Discussion*) dan wawancara mendalam (*depth interview*) person to person.

Jumlah Sampel dalam studi ini didasarkan pada Fokus target masyarakat adalah masyarakat yang melakukan kegiatan di kawasan KKP. Pemilihan target masyarakat didasarkan kepada: perwakilan jumlah populasi, persentase penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan, representasi kegiatan ekonomi yang dominan yang dimanfaatkan masyarakat dalam kawasan konservasi (misalnya perikanan tangkap/ nelayan penuh, pariwisata, dan budidaya, Petani dan Perkebunan).

Penentuan responden dan besaran responden ditentukan berdasarkan jumlah persentasi (30%) dari Populasi yang ada dengan pertimbangan melihat sebaran masyarakat berdasarkan mata pencaharian yang ada. Total jumlah responden yang dapat diwawancara adalah 200

responden pada 15 kampung di wilayah Kerja Proyek BAF. Menurut Sanafah Faisal dengan mengutip pendapat Spradley mengemukakan bahwa, situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang didalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. Selanjutnya sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tapi juga dihayati.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang diteliti.
3. Mereka yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.



Gambar 4. : FGD di Kampung Atkari



Gambar 5. Wawancara mendalam face to Face di Kampung Salafen

#### **2.4. Metode Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan statistic deskriptif yaitu tabulasi sederhana untuk mendapatkan gambaran aspek sosial, ekonomi, budaya dan kelembagaan dari masyarakat lokal. Hasil dari analisis tersebut kemudian diinterpretasikan untuk menjawab tujuan penelitian yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel dan gambar

## **BAB 3**

### **PROFIL UMUM WILAYAH KAJIAN**

#### **3.1. Profile Umum Wilayah Kajian Dan Responden**

##### **3.1.1. Profil Wilayah Kajian Distrik Misool Utara**

Kabupaten Raja Ampat adalah salah satu kabupaten dari 12 kabupaten di provinsi Papua Barat. Kabupaten Raja Ampat memiliki potensi wisata yang telah terkenal diseluruh dunia. Secara geografis Kabupaten Raja Ampat memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan samudra pasifik, selatan berbatasan dengan kabupaten seram utara, timur berbatasan dengan kota Sorong dan Kabupaten Sorong, sebelah barat berbatasan dengan laut seram dan halmahera tengah (BPS, 2021). Kabupaten Raja Ampat terbagi menjadi 24 distrik dengan total luas wilayah daratan adalah 7.559,6 km<sup>2</sup>.

Salah satu distrik yang menjadi fokus penelitian di Kabupaten Raja Ampat yaitu Distrik Misool Utara. Distrik Misool terletak di Pulau Misool. Sebagian besar wilayah Distrik Misool merupakan daerah dataran rendah. Distrik Misool terletak di bagian selatan wilayah Kabupaten Raja Ampat dengan batas–batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Distrik Kofiau
- Sebelah timur berbatasan dengan Distrik Misool Timur dan Misool Selatan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Seram Bagian Timur
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Selatan

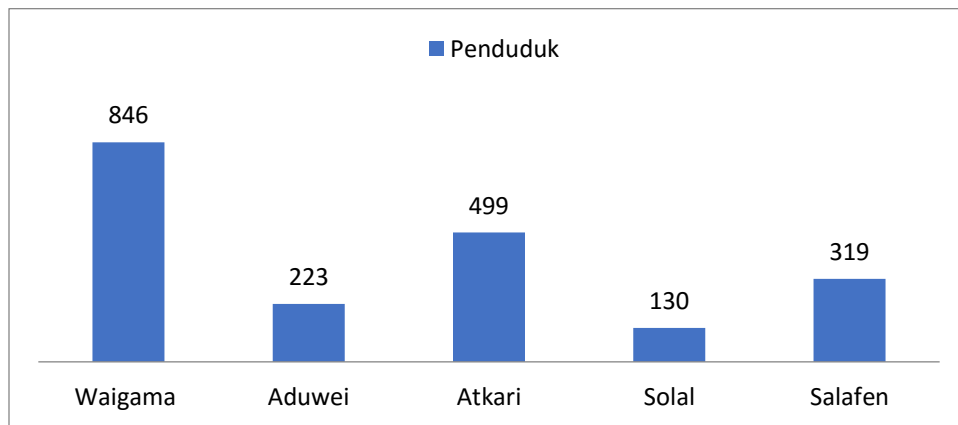
Ada 5 kampung di Distrik Misool yaitu Kampung Waigama, Kampung Aduwei, Kampung Atkari, Kampung Solal, dan Kampung Salafen. Didalam masing-masing kampung terdiri dari Rukun Warga (RW) dan Rukun tetangga (RT) sebagai berikut :

Tabel 2. Data RW dan RT di Distrik Misool Utara

No	Kampung	Distrik	RW	RT
1	Waigama	Misool Utara	2	4
2	Aduwei	Misool Utara	2	4
3	Atkari	Misool Utara	2	4
4	Solal	Misool Utara	1	3
5	Salafen	Misool Utara	1	2

Sumber : DDA, 2021

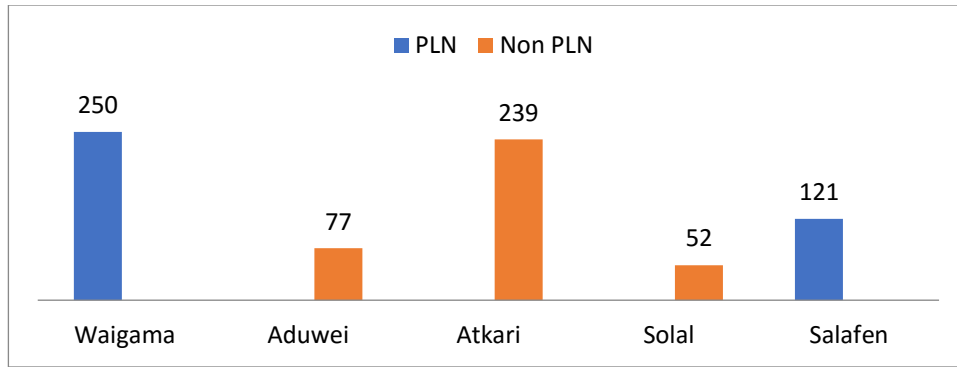
Data diatas memperlihatkan bahwa tiga kampung memiliki jumlah RW dan RT yang sama. Namun, secara jumlah penduduk masing-masing kampung memiliki jumlah penduduk yang berbeda. Data penduduk terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 6. Jumlah Penduduk perkampung di Distrik Misool Utara

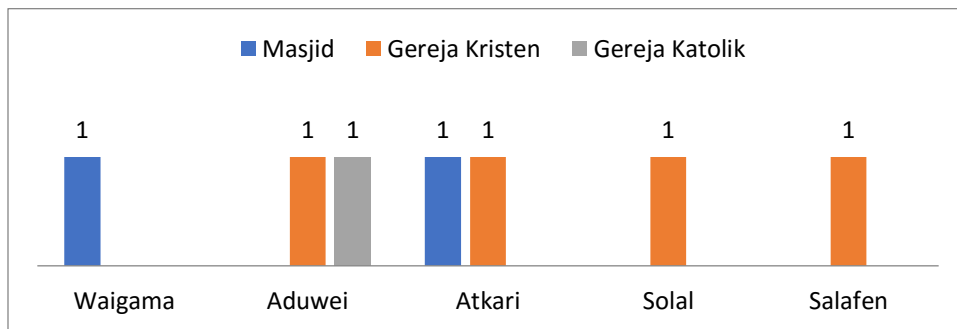
Berdasarkan gambar 6 diatas terlihat bahwa penduduk terbanyak berada di Kampung Waigama sebagai Ibukota Distrik, kedua terbanyak berada di Kampung Atkari, selanjutnya Kampung Salafen dan kampung Aduwai. Sedangkan, Kampung Solal memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 130 jiwa. Sehingga jika ditotal keseluruhan penduduk di distrik misool utara sebanyak 2.017 Jiwa. Secara fasilitas publik yang dimiliki dijelaskan dalam gambar 7 ini





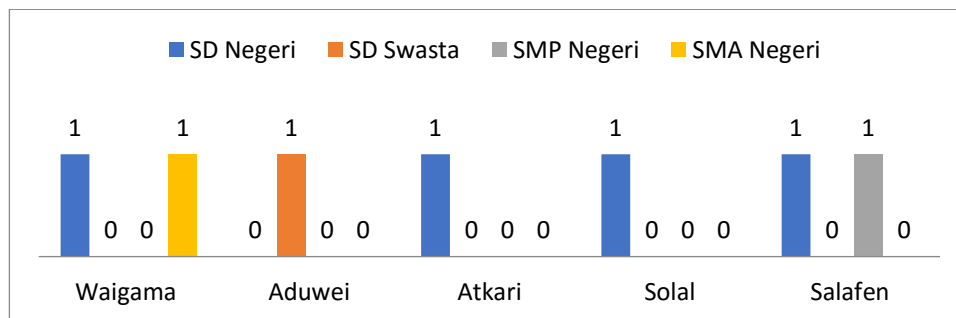
Gambar 7. Penggunaan Listrik PLN dan Non-PLN di Distrik Misool Utara

Dari data diatas terdapat 3 kampung yang menggunakan listrik Non PLN yaitu kampung Aduwei, atkari dan solal. Sedangkan 2 kampung lainnya yaitu waigama dan salafen menggunakan listrik PLN. Selanjutnya, Fasilitas peribadatan yang ada di Distrik Misool Utara terlihat pada gambar dibawah ini



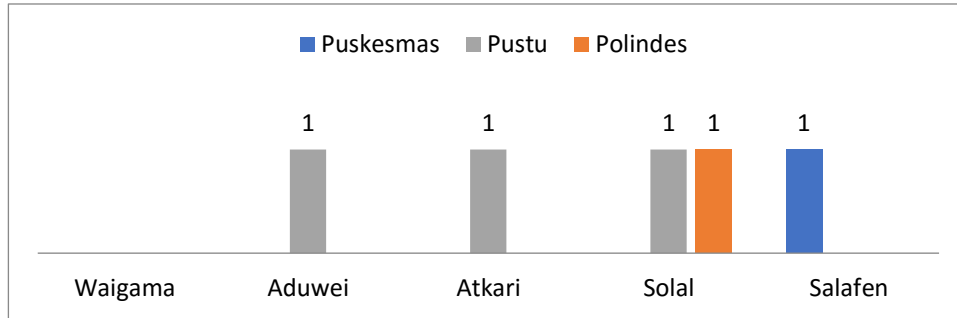
Gambar 8. Fasilitas Peribadatan di Distrik Misool Utara

Data diatas memperlihatkan bawah fasilitas peribadatan yang dimiliki distrik misool utara terbanyak yaitu gereja kristen sebanyak 4 gereja di 4 kampung, 2 masjid di 2 kampung dan 1 gereja katolik di satu kampung. Selanjutnya, Fasilitas sekolah yang dimiliki setiap kampung dengan gambaran sebagai berikut :



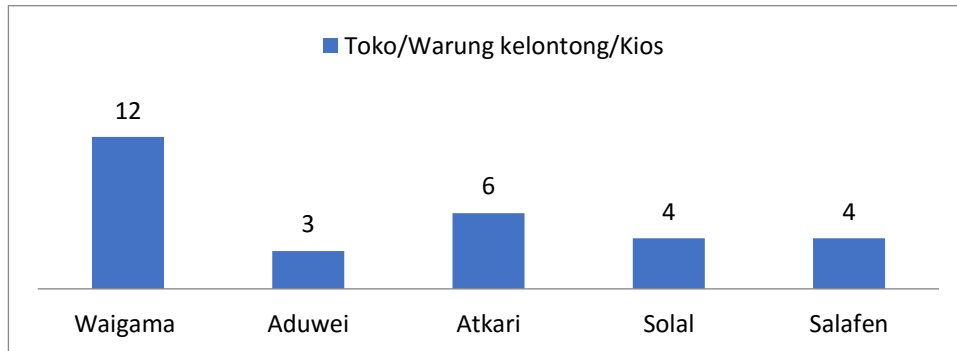
Gambar 9. Fasilitas Sekolah di Distrik Misool Utara

Berdasarkan data diatas fasilitas sekolah dasar berada dilima kampung dalam distrik, namun untuk SMP hanya berada dikampung Salafen dan SMA berada di kampung Waigama. Sedangkan, untuk fasilitas kesehatan sebagai berikut :



Gambar 10. Fasilitas Kesehatan di Distrik Misool Utara.

Fasilitas kesehatan terbanyak yaitu pustu yaitu sebanyak 3 kampung, polindes sebanyak 1 dan puskesmas sebanyak 1 berada diwilayah salafen dengan nama puskesmas waigama. Jarak antara salafen dan waigama cukup dekat, sehingga masyarakat waigama bisa menggunakan fasilitas puskesmas dengan mudah. Selanjutnya untuk ketersediaan barang keperluan sehari-hari dan sembako, setiap kampung memiliki kios. Data kios sebagai berikut:



Gambar 11. Fasilitas Toko/Warung kelontong/Kios

Data di atas memperlihatkan secara ketersediaan kios, terbanyak berada di Kampung Waigama dan paling sedikit berada di Kampung Aduwei. Ketersediaan transportasi akan memberikan pengaruh bagi kelancaran akses masyarakat dalam beraktivitas (Tabel 3).

Tabel 3. Jenis alat transportasi di Distrik Misool Utara

Kampung	Jenis Transportasi	Keberadaan Angkutan Umum
Waigama	Darat dan Air	Ada dengan Trayek tetap
Aduwe	Air	Tidak ada Angkutan Umum
Atkari	Air	Tidak ada angkutan umum
Solal	Air	Tidak ada angkutan umum
Salafen	Darat dan Air	Ada dengan Trayek tetap

Sumber : BPS, *Permutakhiran Data Perkembangan Desa (Podes) 2021*

Berdasarkan Tabel 3, hanya ada 2 kampung yang memiliki akses transportasi angkutan umum tetap yaitu kampung waigama dan salafen. Sedangkan, 3 kampung lain tidak memiliki angkutan umum tetap. Masyarakat adewei, atkari dan solal harus menggunakan angkutan pribadi untuk melakukan perjalanan keluar kampung. Angkutan yang harus dimiliki yaitu perahu atau jenis transportasi air.

### 3.1.2. Profil Wilayah Kajian Distrik Makbon - Malaumkarta Raya

Malaumkarta terletak di distrik Makbon bagian utara Kabupaten Sorong provinsi Papua Barat, Malaumkarta berasal dari tiga suku kata yaitu: Mala yang artinya gunung atau dataran yang luas, Um yaitu suatu nama pulau yang terletak di kampung Malaumkarta ± 0,16 mil dari bibir pantai kampung Malaumkarta dan kata Karta di ambil dari nama ibukota negara Ja-karta. penduduk kampung Malaumkarta telah mendiami wilayah ini berabad-abad tahun lamanya seperti yang tercatat dalam legenda peradaban suku Moi di wilayah kepala burung Papua (Malamoi). Secara definitive kampung Malaumkarta di SK kan sebagai pemerintah kampung yang otonom (mandiri) pada tanggal, 20 Desember 1991 oleh Gubernur Papua Barnabas Swebu, SH (Iran Jaya pada waktu itu) Sebelum kampung Malaumkarta di mekarkan menjadi kampung yang devinitif, kampung Malaumkarta merupakan bagian dari kampung Makbon atau di sebut dengan istilah dusun saat itu.

Batas Wilayah Kampung Malaumkarta terdiri dari:

- Sebelah Timur berbatasan dengan kampung Asbaken
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kwasdas-makbon

- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kampung Klayili Distrik Klayili
- Sebelah Utara berbatasan dengan samudra Pasifik 3 mil dari pantai

Topografi kampung Malaumkarta berfariasi terdiri dari gunung dan lembah serta lereng-lereng gunung panjang yang menjurus dari arah timur Papua hingga barat semenanjung gugusan pulau-pulau di kepala burung, membentuk teluk menonjol ke laut melingkar berbentuk tanjung berhadapan langsung dengan arah utara laut pasifik, searah garis khatulistiwa. Data topografi wilayah untuk empat kampung yang menjadi fokus penelitian yaitu berupa dataran dan lembah.

Tabel 4. Topografi Wilayah Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Makbon, 2020

Kampung Kelurahan	Topografi Wilayah		
	Lereng/puncak	Lembah	Dataran
Malaumkarta			√
Suatolo			√
Sawatuk			√
Mibi		√	√

Sumber: BPS, *Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa), 2020*

Tabel 5. Status Pemerintahan dan Jumlah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkecil berdasarkan Kampung/Kelurahan

No	Kampung	Distrik	Nama SLS terkecil	Jumlah SLS
1	Malaumkarta	Makbon	RT	2
2	Suatolo	Makbon	RT	1
3	Sawatuk	Makbon	RT	1
4	Mibi	Makbon	RT	1

Sumber: BPS, *Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa), 2020*

Satuan lingkungan setempat (SLS) adalah bagian wilayah dalam desa/kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan. Syarat-syarat pembentukannya harus memperhatikan faktor jumlah penduduk, luas wilayah, letak, prasarana, dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat. Setiap dusun/lingkungan paling sedikit dibentuk oleh 2-3 RW/RK (Permendagri No.5 Th 1981, pasal 4).

Tabel 6. Jumlah Aparat Kampung/Kelurahan Menurut Kampung/Kelurahan

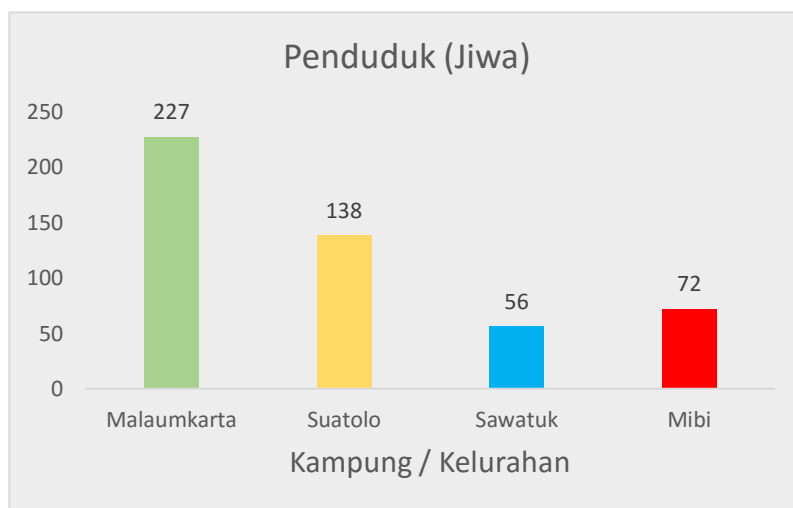
Kampung/Kelurahan	Kepala Kampung/Lurah	Sekretaris Kampung	Sekretariat	Teknis
Malaumkarta	1	1	4	-
Suatolo	1	1	4	-
Sawatuk	1	1	4	-
Mibi	1	1	4	-

Sumber: BPS, *Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa), 2020*

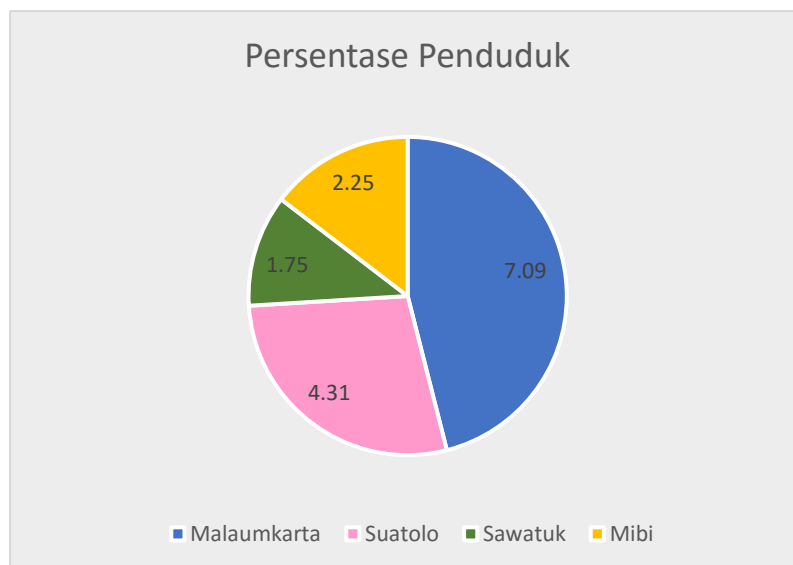
Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK)/Rukun Warga (RW) adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan masyarakat di desa/kelurahan. Dari segi ukuran, RT biasanya lebih kecil dari RW/RK. <https://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/3071/datafile/F1/V20>

Jumlah kepala keluarga/keluarga di dalam RT biasanya lebih kecil dari 30 keluarga/keluarga untuk desa dan 50 untuk kelurahan. Dari setiap RW/RK biasanya terdiri dari paling sedikit 2 RT di desa dan 3 RT di kelurahan ( Permendagri No.5 Th 1981 tentang pembentukan dusun dalam dan lingkungan dalam kelurahan, pasal 4). Dari data di atas (table Status Pemerintahan dan Jumlah Satuan Lingkungan Setempat (SLS)) diantara empat kampung tersebut kampung Malaumkarta mempunyai jumlah SLS 2 dan tiga kampung lainnya hanya berjumlah 1, yang berarti bahwa jumlah kepala keluarga (RT) di dalam kampung tersebut lebih banyak.

Hal ini dapat dilihat juga pada data Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan. Berdasarkan data BPS pada kampung Malaumkarta berjumlah 227 penduduk (Jiwa) dengan persentase sebesar 7,09 % dan yang kedua yaitu Kampung Suatolo jumlah 138 dengan persentase penduduk 4.31 % dan selanjutnya diikuti oleh Kampung Mibi dengan jumlah 72 penduduk (jiwa) dengan persentase penduduk 2,25 %, sedangkan yang paling sedikit atau kecil yaitu kampung Sautuk dengan jumlah 56 penduduk (jiwa) dengan persentase 1.75 %.



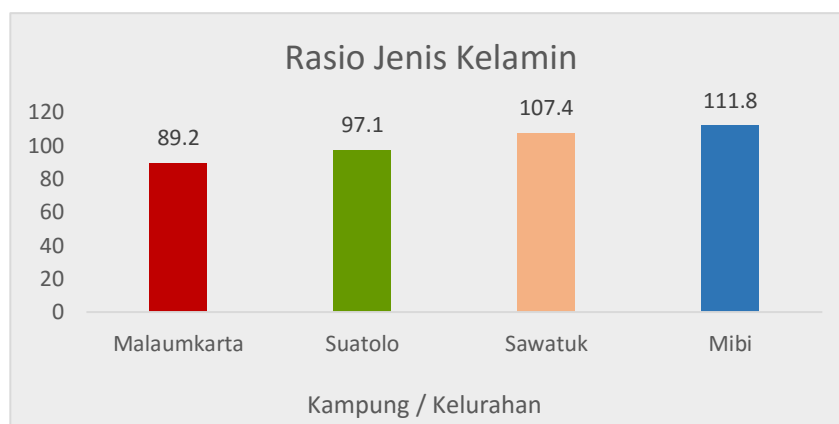
Sumber: BPS, *Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa)*, 2020  
Gambar 12. Jumlah penduduk di distrik Makbon



Sumber: BPS, Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa), 2020

Gambar 13. Data jumlah penduduk di distrik Makbon

Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, karena adat dan kebiasaan jaman dulu yang lebih mengutamakan Pendidikan laki-laki dibanding perempuan, maka pengembangan Pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama.



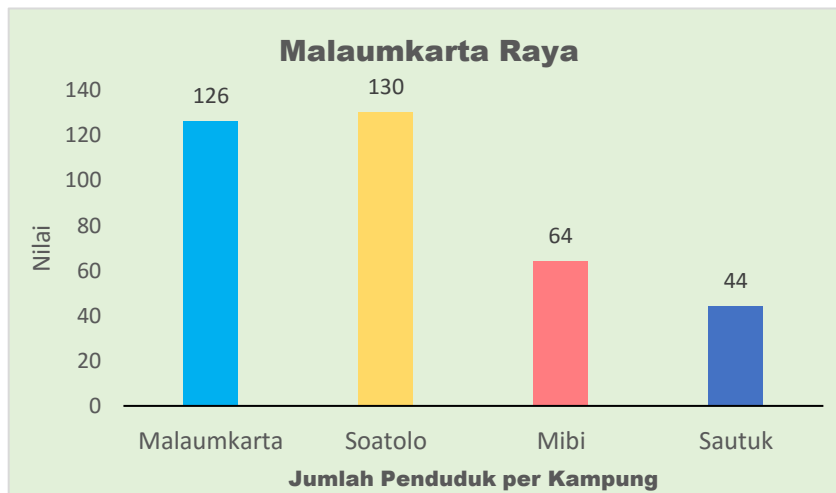
Sumber: BPS, Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa), 2020

Gambar 14. Data jumlah penduduk di distrik Makbon

Berdasarkan data dari BPS bahwa rasio dari keempat kampung tersebut menjelaskan perbandingan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nilai SR (rasio jenis kelamin) untuk kampung Malaumkarta sebesar 89,2 dan kampung Suatolo sebesar 91,1. Angka ini kurang dari 100 ( $< 100$ ) yang menandakan bahwa pada kedua kampung tersebut jumlah penduduk

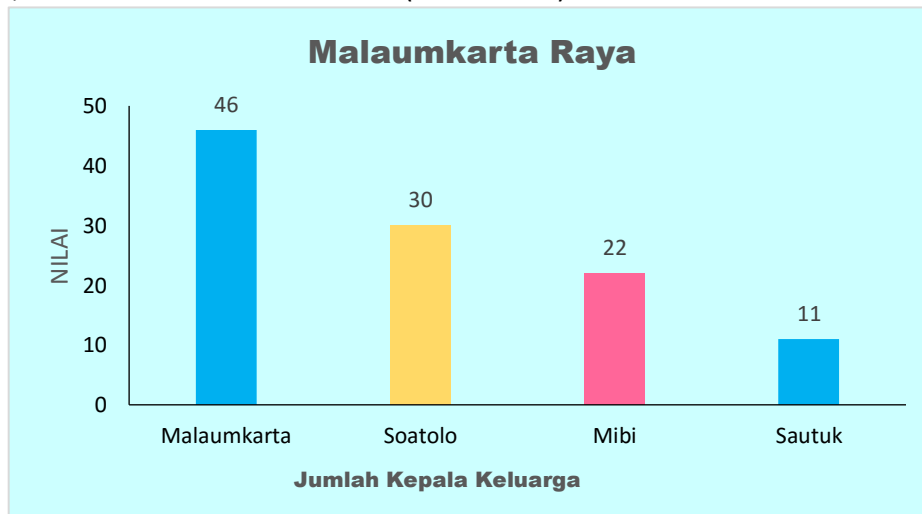
perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki, sedangkan untuk kampung Sautuk sebesar 107,4 dan Mibi sebesar 111,8, angka ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan.

Wilayah Malaumkarta raya terdiri dari empat kampung pengamatan yakni Kampung Malaumkarta, Soatolo, Mibi dan Suatut. Berdasarkan data yang diperoleh tim di lokasi studi bahwa jumlah penduduk yang mendiami Malaumkarta raya tertinggi di kampung Soatolo 130 jiwa, Kampung Malaumkarta 126 Jiwa, Mibi 64 Jiwa dan Sautut 44 jiwa (Gambar 12)



Sumber : hasil wawancara Tahun 2021

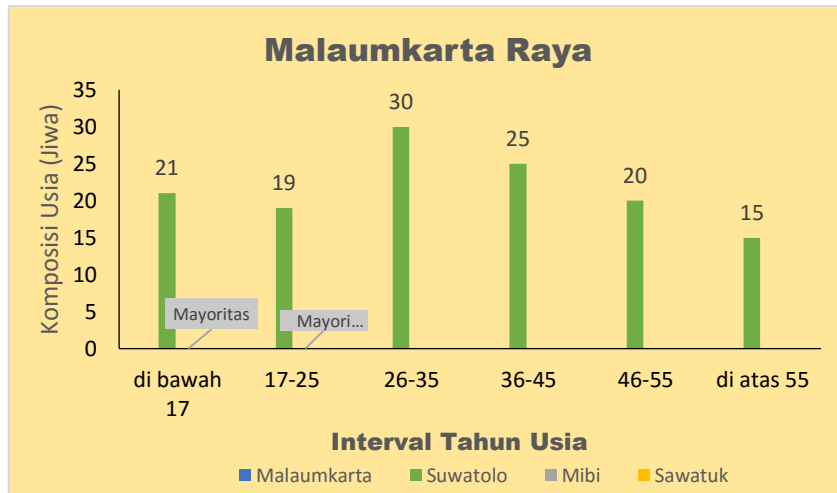
Gambar 15. Jumlah Penduduk malaumkarta Raya  
 Jumlah KK (Kepala Keluarga) yang tertinggi berada pada kampung Malaumkarta Raya 46 KK, Soatolo 30 KK, Mibi 22 KK dan Suatut 11 KK (Gambar 13).



Sumber : hasil wawancara, 2021

Gambar 16. Jumlah Kepala Keluarga di Malaumkarta Raya

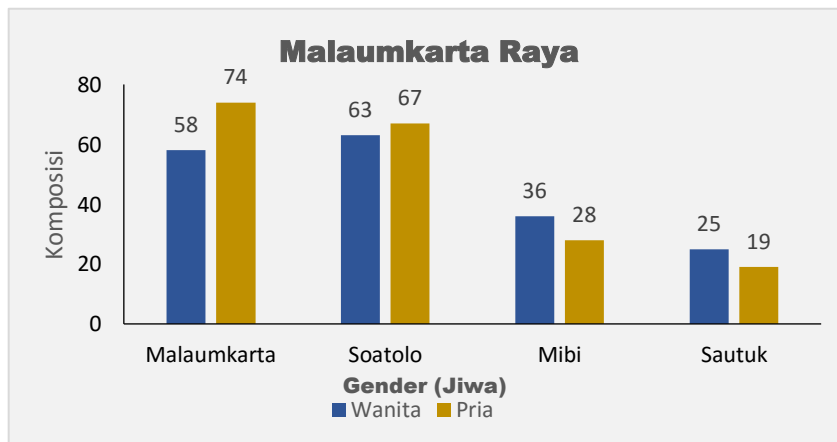
Penduduk Malaumkarta raya dengan total jiwa kurang lebih 350 jiwa tersebar dalam kelompok usia tertinggi adalah 26-35 tahun, 36-45 tahun dan yang terendah adalah usia diatas 55 Tahun. Penduduk dengan usia produktif dalam jumlah yang tinggi berada di wilayah Malaumkarta Raya, hal ini berhubungan dengan ketersediaan tenaga kerja di kampung dalam usia produktif (Gambar 14).



Sumber : hasil wawancara, 2021

Gambar 17. Interval usia (tahun) di Malaumkarta Raya

Jumlah laki-laki dan perempuan di wilayah Malaumkarta Raya terlihat laki laki memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan kelompok perempuan. Di kampung Suwatolo jumlah laki laki hampir sama dengan jumlah perempuan. Di kampung Malaumkarta laki laki lebih tinggi dari perempuan (Gambar 15), data tersebut sama seperti yang diperoleh dari data BPPS tahun dari hasil survei tahun 2020.



Sumber : hasil wawancara, 2021

Gambar 18. Sebaran gender di Malaumkarta Raya



Tabel 7. Jumlah Keluarga Pengguna Listrik dan Bukan Pengguna Listrik Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Makbon, 2020

Kampung/ Kelurahan	Pengguna Listrik		Bukan Pengguna Listrik
	PLN	Non PLN	
Malaumkarta	-	62	-
Suatolo	-	38	-
Sawatuk	-	42	-
Mibi	-	20	-
<i>Sumber: BPS, Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa), 2020</i>			

Listrik di keempat kampung ini telah tersedia dan berdasarkan data jumlah keluarga pengguna listrik umumnya yang digunakan adalah Non PLN. Penggunaan listrik non PLN ini yang paling banyak terdapat di kampung Malaumkarta dan Sautuk dan kemudian diikuti oleh kampung Suatolo dan Mibi. Penggunaan listrik pada keempat kampung yaitu melalui pemanfaatan dengan bantuan tenaga air, dimana masyarakat telah menyediakan bak penampung untuk pembangkit listrik.

Tabel 8. Kampung/Kelurahan Menurut Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang digunakan oleh sebagian besar Keluarga Kampung/Kelurahan Menurut Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Digunakan oleh Sebagian Besar Keluarga di Distrik Makbon, 2020

Kampung/ Kelurahan	Bahan Bakar
Malaumkarta	Kayu Bakar
Suatolo	Kayu Bakar
Sawatuk	Kayu Bakar
Mibi	Kayu Bakar

Sebanyak 5.116 keluarga di Papua masih menggunakan kayu bakar untuk kegiatan memasak rumah tangga. Jumlah ini sekaligus menjadi yang terbesar secara nasional pada tahun 2019 menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini juga dapat dilihat dari keempat kampung dengan data yang diperoleh dari BPS bahwa kayu bakar merupakan bahan bakar utama yang digunakan oleh keluarga untuk bahan bakar.

Tabel 9. Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kampung/Kelurahan di Distrik Makbon, 2020

Kampung/ Kelurahan	Masjid	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
Malaumkarta	-	1	-	-	-
Suatolo	-	-	-	-	-
Sawatuk	-	1	-	-	-
Mibi	-	-	-	-	-

*Sumber: BPS, Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa), 2020*

Jumlah tempat ibadah hanya terdapat satu bangunan gedung gereja GKI yang terdapat pada kedua kampung yaitu kampung Malaumkarta dan Kampung Sautuk. Pada kampung Sautuk dan Mibi tidak terdapat bangunan gedung gereja, namun dalam peribadatnya warga dari kedua kampung ini akan beribadah di gedung gerja di malaumkarta, karena kampung Suatolo dan Malaumkarta merupakan satu tempat yang dipisahkan hanya jalan saja, sedangkan kampung Mibi terpisah dengan jarak agak jauh namun tetap beribadah pada gedung gereja yang sama di Malaumkarta.

Tabel 10. Banyaknya Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Ibtidaiyah Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Makbon, 2020

Kampung/ Kelurahan	Sekolah Dasar		
	Negeri	Swasta	Jumlah
Malaumkarta	1		1
Suatolo	-		-
Sawatuk	1		1
Mibi	-	-	-

Tabel 11. Banyaknya Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Makbon, 2020

Kampung/ Kelurahan	Sekolah Menengah Pertama		
	Negeri	Swasta	Jumlah
Malaumkarta	1	-	1
Suatolo	-	-	-
Sawatuk	-	-	-
Mibi	-	-	-

Tabel 12. Kemudahan untuk Mencapai Sarana Pendidikan Terdekat Bagi Kampung/Kelurahan yang Tidak ada Sarana Pendidikan Menurut Kampung/Kelurahan dan Jenjang Pendidikan di Distrik Makbon, 2020

Kampung/ Kelurahan	SD	SMP	SMA	SMK	Perguruan Tinggi
Malaumkarta	-	-	2	2	2
Suatolo	1	1	2	2	2
Sawatuk	-	2	3	3	3
Mibi	2	2	3	2	2

Catatan:\* 1 = Sangat Mudah 2 = Mudah 3 = Sulit 4 = Sangat Sulit

Sumber: BPS, *Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa)*, 2020

Data mengenai banyaknya sekolah untuk keempat kampung untuk sekolah dasar (SD) hanya berjumlah satu sekolah yang hanya terdapat di kampung Malaumkarta dan Sautuk sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya terdapat satu sekolah saja di Malaumkarta, dan untuk SMA sekolahnya terdapat di Distrik Makbon. Berdasarkan kemudahan untuk menjangkau sarana Pendidikan dari data menjelaskan bahwa untuk kampung Malaumkarta dan kampung Suatolo mudah/sangat mudah, sedangkan untuk kampung Sawatuk sulit untuk menjangkau sarana Pendidikan yaitu untuk tingkat Pendidikan SMA/SMK dan perguruan tinggi sedangkan untuk kampung Mibi yang sulit untuk dijangkau adalah sarana Pendidikan tingkat SMA.

Tabel 13. Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Kampung/Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Makbon, 2020

Kampung/ Kelurahan	Rumah Sakit	Poliklinik/Balai Pengobatan	Puskesmas		Apotek
			Rawat Inap	Tanpa Rawat Inap	
Malaumkarta	2	2	2	2	2
Suatolo	2	2	2	2	2
Sautuk	3	3	3	2	3
Mibi	2	2	2	3	2

Catatan:\* 1 = Sangat Mudah 2 = Mudah 3 = Sulit 4 = Sangat Sulit

Sumber: BPS, *Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa)*, 2020

Berdasarkan data Kemudahan mencapai sarana Kesehatan dapat dijelaskan bahwa Kampung Malaumkarta, Suatolo dan Mibi dengan mudah dapat menjangkau sarana Kesehatan dari beberapa sarana kesehatan yang tersedia yaitu rumah sakit, Poliklinik/balai pengobatan, Puskesmas (rawat inap/tanpa inap) serta apotek sedangkan untuk kampung Sautuk sulit untuk mencapai sarana Kesehatan secara khusus untuk Puskesmas tanpa rawat inap.

Tabel 14. Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Jenis dan Kampung/Kelurahan di Distrik Makbon, 2020

Kampung/ Kelurahan	Bahan Bakar			Minimarket/ Swalayan	Toko/ Warung Kelontong
	Permanen	Semi Permanen	Tanpa Bangunan		
Malaumkarta	-	-	-	-	2
Suatolo	-	-	-	-	2
Sautuk	-	-	-	-	-
Mibi	-	-	-	-	1

*Sumber: BPS, Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa), 2020*

Tabel 15. Jumlah Koperasi Menurut Jenis dan Kampung/Kelurahan di Distrik Makbon, 2020

Kampung/ Kelurahan	Koperasi Unit Desa	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat	Koperasi Simpan Pinjam	Koperasi Lainnya
Malaumkarta	-	-	-	1
Suatolo	-	-	-	-
Sautuk	-	-	-	-
Mibi	-	-	-	-

*Sumber: BPS, Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa), 2020*

Perkembangan Ekonomi suatu wilayah selain dapat diukur dengan indikator perekonomian juga dapat dilihat dari perkembangan jumlah sarana dan prasarana perekonomian yang ada pada wilayah tersebut. Data sarana dan prasarana perekonomian yang ada di distrik Makbon secara khusus di kampung Malaumkarta, Suatolo, Sautuk dan Mibi hanya terdapat toko/warung kelontong dan itu hanya ada pada tiga kampung saja, yang tidak ada yaitu Kampung Sautuk.

Sarana perekonomian ini masing-masing kampung Malaumkarta dan Suatolo terdapat 2 toko/warung kelontong, sedangkan di Mibi hanya terdapat 1. Selain Sarana Perekonomian yang tersedia pada keempat kampung tersebut, terdapat juga koperasi lainnya yang hanya terdapat di kampung Malaumkarta dan koperasi yang dibentuk ini juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau kampung yang tentunya dibangun dengan tujuan Bersama-sama.

Tabel 16. Jumlah Menara dan Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler Serta Kondisi Sinyal Telepon Seluler Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Makbon, 2020

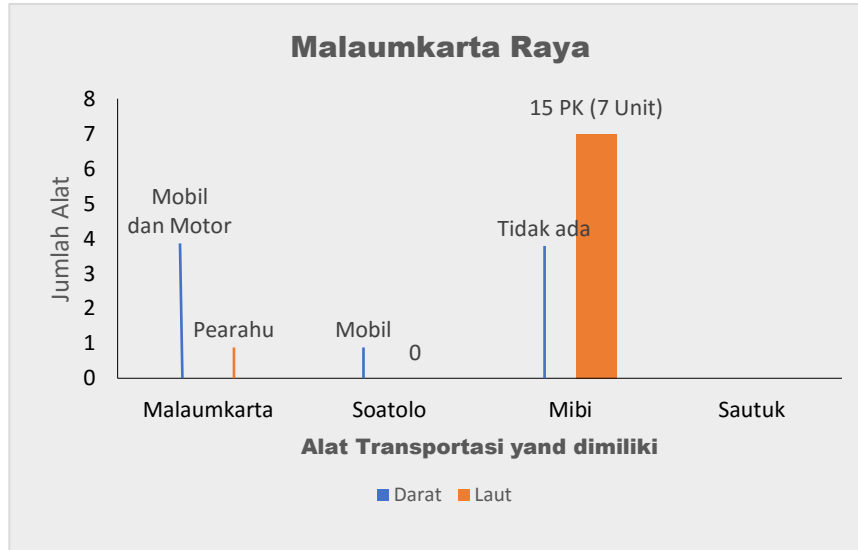
Kampung/ Kelurahan	Jumlah Menara Telepon Seluler (BTS)	Jumlah Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler	Kondisi Sinyal Telepon Seluler di Sebagian Besar Wilayah
Malaumkarta	-	1	Sinyal sangat kuat
Suatolo	-	1	Sinyal sangat kuat
Sawatuk	-	1	Sinyal sangat kuat
Mibi	-	1	Sinyal sangat kuat

Tabel 17. Kondisi Jalan Darat Antar Kampung/Kelurahan Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Makbon, 2020

Kampung/ Kelurahan	Jenis Permukaan Jalan	Dapat Dilalui Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih
Malaumkarta	Aspal/Beton	Sepanjang tahun
Suatolo	Aspal/Beton	Sepanjang tahun
Sawatuk	Diperkeras	Sepanjang tahun
Mibi	Aspal/Beton	Sepanjang tahun

Transportasi dan komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pendapatan suatu daerah maupun Negara (Szkudlareket al., 2020). Hal ini dikarenakan perkembangan media transportasi dan komunikasi sangat maju dan menjanjikan terkhusus di zaman modern seperti sekarang ini (Abugre, 2018).

Penyediaan sarana komunikasi Menara dan Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler Serta Kondisi Sinyal Telepon Seluler untuk mendukung komunikasi di keempat kampung tersebut berdasarkan data BPS yaitu terdapat 1 operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler untuk masing-masing kampung dimana kondisi sinyal telepon seluler sangat kuat sehingga komunikasi dari kampung ke kota atau sebaliknya dapat dilakukan. Selain komunikasi, juga transportasi ditunjang dengan adanya akses jalan umum yang mempermudah pengaksesan dari kampung ke kota maupun sebaliknya, dimana permukaan jalan itu berupa aspal/beton sehingga dapat dilalui kendaraan sepanjang tahun. Aksesibilitas ke wilayah Malaumkarta Raya dapat diakses dengan melalui jalan darat dan laut. Alat transportasi yang digunakan yaitu mobil, motor dan perahu. Sedangkan akses antar kampung di dalam Malaumkarta Raya dapat juga ditempuh dengan jalan kaki (Gambar 16)



Sumber: Hasil wawancara, 2021

Gambar 19. Alat Transportasi yang dimiliki di Malaumkarta Raya

### 3.1.3. Profil Wilayah Kajian Distrik Bikar – Werur Raya

Kampung Werur adalah Salah satu Kampung di distrik Bikar, kabupaten Tambrauw, Papua Barat. Kampung Werur adalah kampung tertua di distrik Bikar yang turut dimekarkan menjadi 3 Kampung yaitu Wertam, Werwaf dan Wertim dan ditambah dengan beberapa kampung yaitu kampung Bukit dan Sunyam yang menjadi lokasi pengambilan data sosial ekonomi masyarakat. Berikut ini merupakan letak geografis dari kampung distrik Bikar:

Utara : Distrik Bikar

Selatan : Distrik Yembun

Timur : Distrik Syujak

Barat : Distrik Yembun dan Sausapor

Tabel 18. Topografi wilayah berdasarkan Kampung/Kelurahan di Distrik Bikar, 2020

Kampung Kelurahan	Topografi Wilayah		
	Lereng/puncak	Lembah	Dataran
Werwaf			√
Suyam			√
Wertam			√
Wertim			√
Werur			√
Bukit			√

Sumber : BPS, Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa), 2020

Kondisi topografi sangat mempengaruhi pembangunan infrastruktur dan juga pengaksesan ke wilayah atau kampung yang mana masyarakat mendiaminya. Dari data topografi di atas terlihat kampung Werur, Werwaf, Suyam, Wertam, Wertim dan Bukit yang termasuk dalam wilayah studi merupakan daerah yang berada di dataran rendah karena wilayah ini ada di sepanjang wilayah pesisir.

Tabel 19. Status Pemerintahan dan Jumlah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) Terkecil Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Bikar, 2020

No	Kampung/Kelurahan	Status Pemerintahan	Nama SLS terkecil	Jumlah SLS
1	Werwaf	Kampung	Kampung	2
2	Suyam	Kampung	Kampung	2
3	Wertam	Kampung	Kampung	2
4	Wertim	Kampung	Kampung	2
5	Werur	Kampung	Kampung	2
6	Bukit	Kampung	Kampung	2

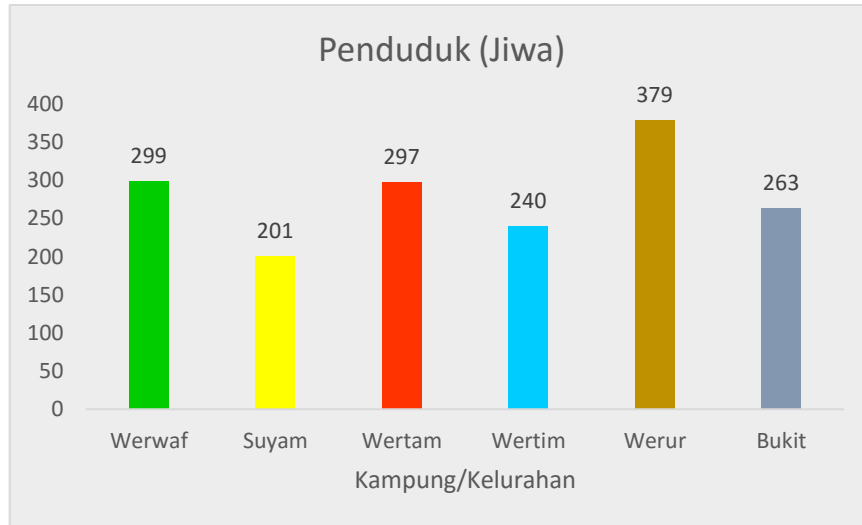
Sumber : BPS, Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa), 2020

Pada data status pemerintahan dan jumlah satuan lingkungan setempat dapat dilihat bahwa Werwaf, Suyam, Wertam, Wertim, Werur dan Bukit memiliki status pemerintahan adalah kampung dan masing-masing kampung ini mempunyai dua bagian wilayah. Hal ini berkaitan dengan jumlah jiwa atau penduduk yang terdapat di masing-masing kampung tersebut. Selanjutnya masing-masing kampung ini mempunyai satu orang kepala kampung yang dipercayakan untuk mengkoordinasi masyarakat setempat dengan dibantu oleh satu orang sekretaris, namun untuk masing-masing kampung jumlah sekretariat dibagi lagi yaitu untuk kampung Werwaf, Wertim, Werur dan Bukit mempunyai empat orang dengan teknis berjumlah tiga orang. Untuk Kampung Suyam dan Wertam memiliki tiga orang yang menangani sekretariat seperti yang ditampilkan melalui data pada table 22.

Tabel 20. Jumlah Aparat Kampung/Kelurahan Menurut Kampung/Kelurahan

Kampung/ Kelurahan	Kepala Kampung/ Lurah	Sekretaris Kampung	Sekretariat	Teknis
Werwaf	1	1	4	3
Suyam	1	1	3	3
Wertam	1	1	3	3
Wertim	1	1	4	3
Werur	1	1	4	3
Bukit	1	1	4	3

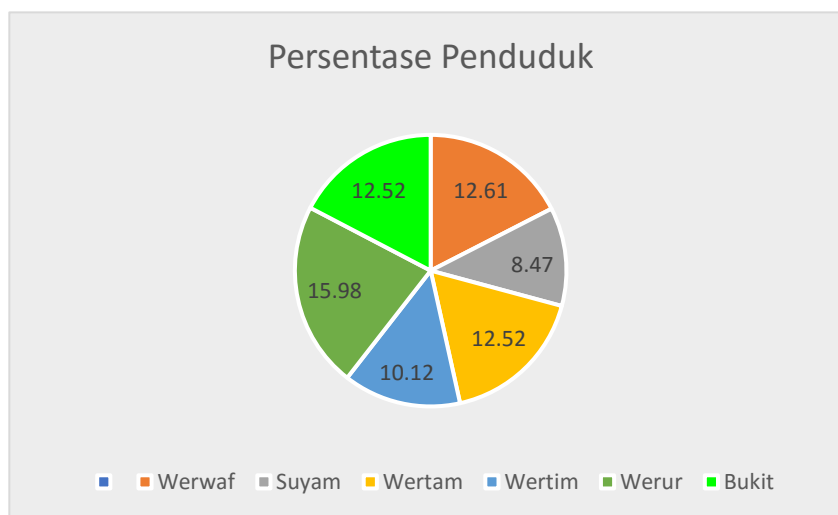
Sumber : BPS, Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa), 2020



Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2020

Gambar 20. Jumlah penduduk di Distrik Bikar

Data Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan pada kampung Werur jumlah penduduk 379 jiwa dengan persentase sebesar 19,98 % dan yang kedua yaitu Kampung Werwaf dengan jumlah penduduk 138 jiwa dengan persentase penduduk 15,98 % dan selanjutnya diikuti oleh Kampung Wertam dengan jumlah penduduk 297 jiwa dengan persentase penduduk 12,52 %, kampung Bukit dengan jumlah penduduk 263 jiwa dengan persentase sebesar 12,52 %, kampung Werur dengan jumlah penduduk 263 jiwa dengan persentase sebesar 12,52 %, kampung Wertim dengan jumlah penduduk 240 jiwa dengan persentase 10,12 % dan yang terakhir yaitu kampung Suyam dengan jumlah penduduk 201 jiwa dengan persentase 8,47 %

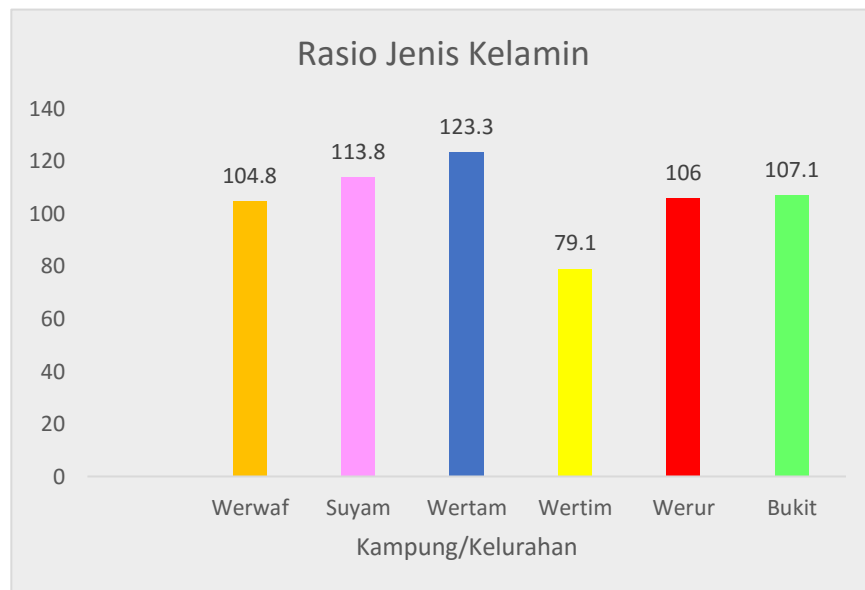


Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2020

Gambar 21. Persentase penduduk di distrik Bikar



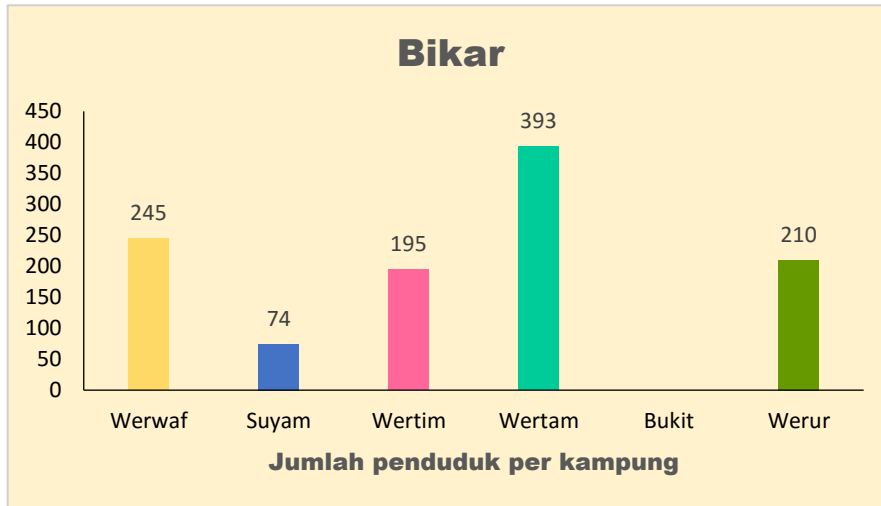
Berdasarkan data rasio dari keenam kampung tersebut menjelaskan perbandingan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nilai SR (rasio jenis kelamin) untuk kampung Wertam sebesar 123,3; kampung Suyam 113,8 dan kampung Bukit 107,1; kampung Werur 106; kampung Werwaf 104,8. Data ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki paling banyak terdapat pada kelima kampung tersebut, sedangkan kampung Wertim 79,1 (Angka ini kurang dari 100) (< 100) yang menandakan bahwa kampung tersebut jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki.



Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2020

Gambar 22. Rasio jenis Kelamin di distrik Bikar

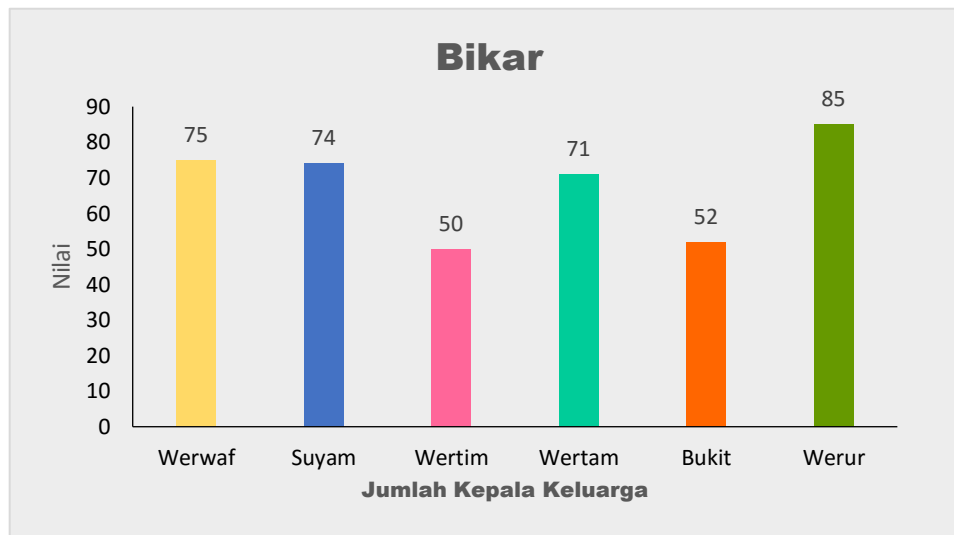
Wilayah survei di werur raya termasuk dalam Distrik Bikar terdiri dari enam kampung. Jumlah penduduk di setiap kampung berbeda-beda. Jumlah penduduk terbanyak di Kampung Wertam 393 Jiwa, Werwaf 245 jiwa dan yang paling sedikit jumlah penduduknya ditemukan di Kampung Suyam sebanyak 74 Jiwa (Gambar 23)



Sumber: Hasil wawancara, 2021

Gambar 23. Jumlah penduduk di wilayah werur raya

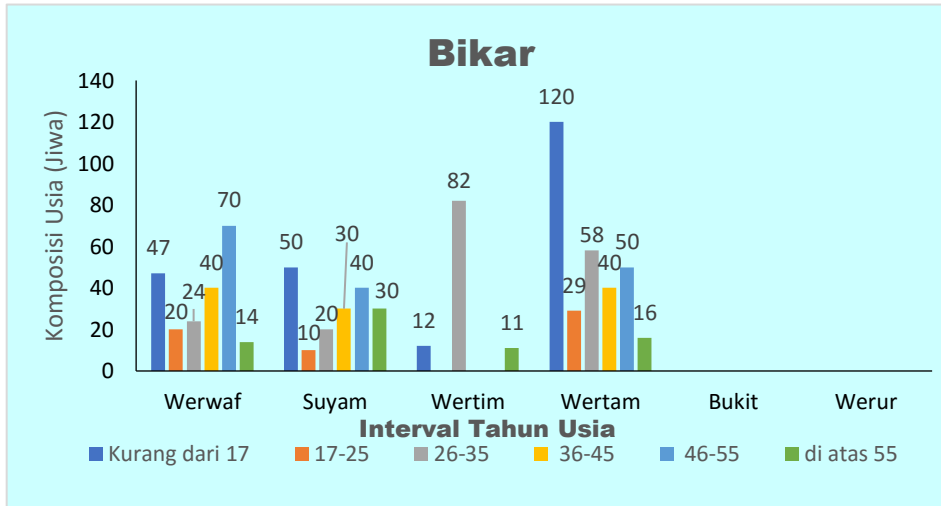
Total Jumlah penduduk di Werur Raya kurang lebih 400 jiwa tersebar dalam 6 kampung dengan Jumlah Kepala Keluarga terbanyak di kampung Werur 85 KK, Werwaf 75 KK dan yang paling sedikit KK ditemukan di kampung Wertim 50 KK.



Sumber: Hasil wawancara, 2021

Gambar 24. Jumlah Kepala Keluarga di wilayah Werur Raya

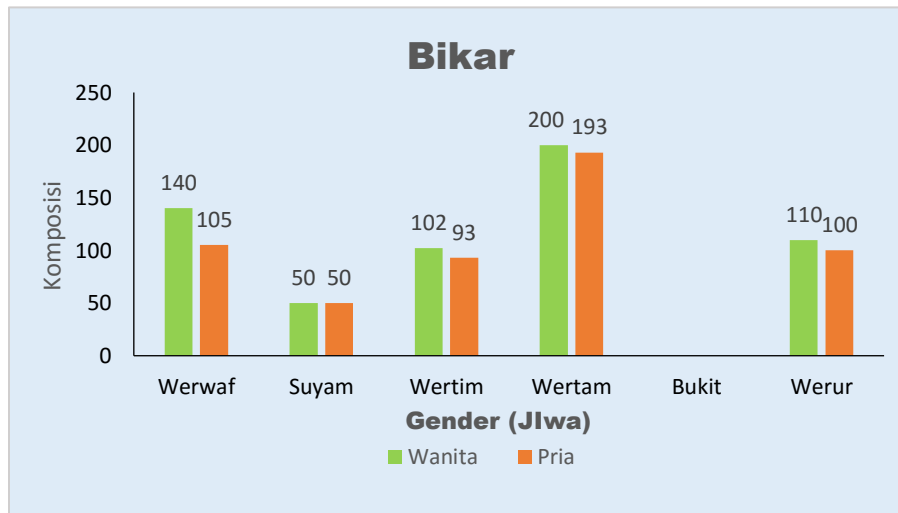
Berdasarkan usia atau tahun hidup masyarakat di Malaumkarta Raya maka kelompok usia 46-55 tahun terbanyak ditemukan di kampung Werwaf, kelompok umur kurang dari 17 tahun tertinggi berada di kampung Wertam. Kelompok umur 36-45 tahun tersebar di Suyam, Werwaf, dan Wertim.



Sumber: Hasil wawancara, 2021

Gambar 25. Jumlah Usia penduduk di wilayah Werur raya

Komposisi laki laki dan perempuan di Werur Raya, jumlah perempuan lebih banyak di bandingkan laki laki. Di kampung Wertam perempuan 200 jiwa dan 193 laki laki. Werwaf perempuan 140 jiwa dan laki laki 105 jiwa. Kampung Suyam jumlah perempuan dan laki laki seimbang (gambar 20)



Sumber: Hasil wawancara, 2021

Gambar 26. sebaran gender di wilayah werur raya

Tabel 21. Jumlah Keluarga Pengguna Listrik dan Bukan Pengguna Listrik Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Bikar, 2020

Kampung/Kelurahan	Pengguna Listrik		Bukan Pengguna Listrik
	PLN	Non PLN	
Werwaf	-	76	-
Suyam	-	41	8
Wertam	-	86	-
Wertim	-	54	-
Werur	-	72	-
Bukit	-	43	-

Sumber: BPS, Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa), 2020

Listrik di keenam kampung ini telah tersedia dan berdasarkan data jumlah keluarga pengguna listrik, umumnya yang digunakan adalah Non PLN. Penggunaan listrik non PLN ini yang paling banyak terdapat di kampung Wertam sebanyak 86 rumah, kampung Werwaf berjumlah 76 rumah, kampung Werur berjumlah 72 rumah, kampung Wertim berjumlah 54 rumah, kampung Bukit 43 dan yang paling sedikit yaitu di kampung Suyam berjumlah 41 rumah.

Tabel 22. Kampung/Kelurahan Menurut Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Digunakan oleh Sebagian Besar Keluarga di Distrik Bikar, 2020

Kampung/Kelurahan	Bahan Bakar
Werwaf	Kayu Bakar
Suyam	Kayu Bakar
Wertam	Minyak Tanah
Wertim	Kayu Bakar
Werur	Kayu Bakar
Bukit	Kayu Bakar

Sumber: BPS, Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa), 2020

Pada kampung Werwaf, Suyam, Wertim, Werur dan Bukit, berdasarkan data pada table di atas bahan bakar yang digunakan oleh masyarakat atau masing-masing keluarga yaitu mereka menggunakan kayu bakar dan hanya di kampung Wertam saja yang menggunakan bahan bakar minyak tanah.

Tabel 23. Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kampung/Kelurahan di Distrik Bikar, 2020

Kampung/Kelurahan	Masjid	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
Werwaf	-	-	-	-	-
Suyam	-	-	1	-	-
Wertam	-	1	-	-	-
Wertim	-	-	-	-	-
Werur	-	-	-	-	-
Bukit	-	-	-	-	-

Sumber: BPS, Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa), 2020

Pada table di atas dari keenam kampung tempat ibadah hanya terdapat di kampung Wertam yaitu satu bangunan gedung gereja Kristen protestan dan satu bangunan gedung gereja katolik yang terdapat di kampung Sunyam.

Tabel 24. Banyaknya Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Bikar, 2020

Kampung/ Kelurahan	Sekolah Dasar			Sekolah Menengah Pertama		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
Werwaf	-	-	-	-	-	-
Suyam	-	-	-	-	-	-
Wertam	-	-	-	-	-	-
Wertim	-	-	-	-	-	-
Werur	-	1	1	-	-	-
Bukit	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPS, Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa), 2020

Tabel 25. Banyaknya Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Bikar, 2020

Kampung/Kelurahan	Sekolah Menengah Atas			Sekolah Menengah Kejuruan		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
Werwaf	-	-	-	-	-	-
Suyam	-	-	-	-	-	-
Wertam	-	-	-	-	-	-
Wertim	-	-	-	-	-	-
Werur	-	1	1	-	-	-
Bukit	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPS, Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa), 2020

Tabel 26. Kemudahan untuk Mencapai Sarana Pendidikan Terdekat Bagi Kampung/Kelurahan yang Tidak ada Sarana Pendidikan Menurut Kampung/Kelurahan dan Jenjang Pendidikan di Distrik Makbon, 2020

Kampung/ Kelurahan	SD	SMP	SMA	SMK	Perguruan Tinggi
Werwaf	2	2	2	4	4
Suyam	2	2	2	4	4
Wertam	2	2	2	4	4
Wertim	2	-	2	4	4
Werur	-	2	-	4	4
Bukit	2	2	2	4	4

Sumber: BPS, Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa), 2020

Catatan:\* 1 = Sangat Mudah 2 = Mudah 3 = Sulit 4 = Sangat Sulit

Berdasarkan data sarana Pendidikan pada tabel 23, 24 dan 25 menjelaskan bahwa sarana Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar dari keenam kampung yang menjadi lokasi studi hanya terdapat satu sekolah Swasta yang berlokasi di kampung Werur dan untuk Sekolah Menengah Pertama tidak ada, baik Swasta maupun Negeri, sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas juga hanya terdapat satu sekolah swasta yang berada di di kampung Werur. Jika dilihat dari kemudahan untuk menjangkau sarana Pendidikan SD, SMP dan SMA pada keenam kampung terlihat mudah untuk dijangkau dan yang sangat sulit dijangkau yaitu SMK dan Perguruan Tinggi.

Tabel 27. Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Kampung/Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Bikar, 2020

Kampung/ Kelurahan	Rumah Sakit	Poliklinik/Balai Pengobatan	Puskesmas		Apotek
			Rawat Inap	Tanpa Rawat Inap	
Werwaf	4	3	3	3	2
Suyam	4	3	3	3	2
Wertam	4	3	3	3	2
Wertim	4	3	3	3	2
Werur	4	3	3	3	2
Bukit	4	3	3	3	3

Catatan:\* 1 = Sangat Mudah 2 = Mudah 3 = Sulit 4 = Sangat Sulit

Pada table di atas terlihat bahwa Rumah sakit umum sangat sulit untuk dijangkau dari keenam kampung, sedangkan Poliklinik/balai pengobatan dan Puskesmas (rawat inap maupun tanpa rawat inap) itu sulit untuk dijangkau dan yang mudah untuk dijangkau hanya apotek.

Tabel 28. Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Jenis dan Kampung/Kelurahan di Distrik Bikar, 2020

Kampung/ Kelurahan	Bahan Bakar			Minimarket/ Swalayan	Toko/ Warung Kelontong
	Permanen	Semi Permanen	Tanpa Bangunan		
Werwaf	-	-	-	-	3
Suyam	-	-	-	-	4
Wertam	-	-	-	-	4
Wertim	-	-	-	-	4
Werur	-	-	-	-	2
Bukit	-	-	-	-	2

Sumber: BPS, Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa), 2020

Data sarana dan prasarana perekonomian yang ada di distrik Bikar secara khusus di kampung Werwaf, Suyam, Wertam, Wertim, Werur dan Bukit hanya terdapat toko/warung kelontong. Sarana perekonomian ini masing-masing kampung Suyam, Wertam, dan Wertim terdapat 4 toko/warung kelontong, sedangkan di Werwaf hanya terdapat 3 toko/warung kelontong dan untuk kampung Werur dan kampung Bukit terdapat 2 toko/warung kelontong .

Tabel 29. Jumlah Menara dan Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler Serta Kondisi Sinyal Telepon Seluler Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Bikar, 2020

Kampung/ Kelurahan	Jumlah Menara Telepon Seluler (BTS)	Jumlah Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler	Kondisi Sinyal Telepon Seluler di Sebagian Besar Wilayah
Werwaf		1	Sinyal lemah
Suyam	1	1	Sinyal Kuat
Wertam		1	Sinyal lemah
Wertim		1	Sinyal lemah
Werur		1	Sinyal lemah
Bukit		1	Sinyal lemah

Sumber: BPS, Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa), 2020

Data jumlah Menara untuk telepon seluler dari keenam kampung hanya terdapat satu Menara saja yang terdapat di kampung Suyam, dan jumlah Operator layanan komunikasi terdapat pada keenam kampung tersebut dan semuanya berjumlah satu operator dengan kondisi sinyal yang kuat hanya terdapat di kampung Suyam sedangkan kampung Werwaf, Wertam, Wertim, Werur dan Bukit mempunyai kondisi sinyal yang lemah.

Tabel 30. Kondisi Jalan Darat Antar Kampung/Kelurahan Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Makbon, 2020

Kampung/ Kelurahan	Jenis Permukaan Jalan	Dapat Dilalui Kendaraan Bermotor, Roda 4 atau Lebih
Werwaf	Diperkeras	Sepanjang Tahun
Suyam	Diperkeras	Sepanjang Tahun, kecuali saat tertentu
Wertam	Diperkeras	Sepanjang Tahun
Wertim	Diperkeras	Sepanjang Tahun
Werur	Diperkeras	Sepanjang Tahun
Bukit	Diperkeras	Sepanjang Tahun

Sumber: BPS, Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa), 2020

Tabel 31. Jenis Penerangan Jalan Menurut Kampung/Kelurahan di Distrik Bikar, 2020

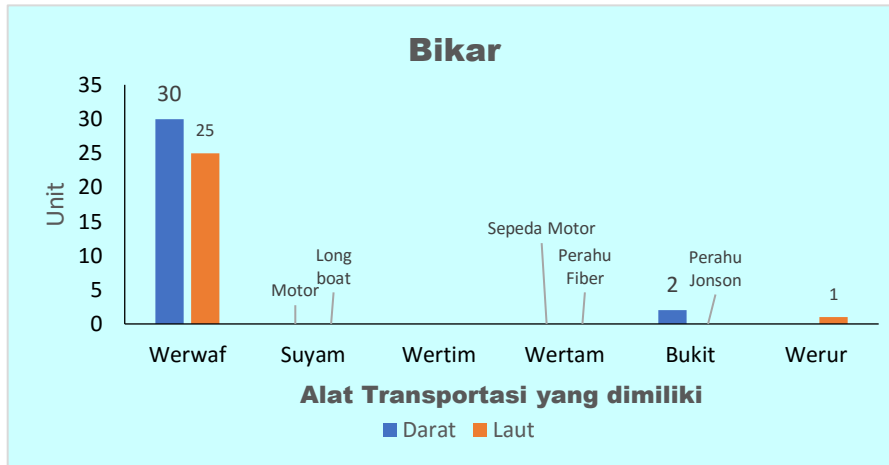
Kampung/ Kelurahan	Penerangan Jalan	Jenis Penerangan
Werwaf	Tidak ada	Tidak ada
Suyam	Ada, Sebagian Besar	Listrik Non Pemerintah
Wertam	Ada, Sebagian Besar	Listrik Non Pemerintah
Wertim	Tidak ada	Tidak ada
Werur	Tidak ada	Tidak ada
Bukit	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: BPS, Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Potensi Desa), 2020

Pada table kondisi jalan darat terlihat bahwa jenis permukaan jalan diperkeras dan dapat dilalui oleh kendaraan bermotor, roda empat atau lebih sepanjang tahun, namun untuk kampung Suyam dapat dilalui oleh kendaraan sepanjang tahun tetapi kecuali saat tertentu. Terkait penerangan jalan berdasarkan data di atas pada jalan yang digunakan ini menjelaskan bahwa hanya pada kampung Suyam dan kampung Wertam yang ada lampu penerangan jalan dengan menggunakan jenis penerangan listrik non pemerintah, sedangkan keempat kampung (Werwaf, Wertim, Werur, dan Bukit) itu belum tersedia lampu penerangan jalan.



Transportasi yang dapat digunakan untuk akses ke Werur Raya menggunakan jalur darat dan laut adalah long boat, dan Sepeda motor, Mobil dan pesawat udara. Akses di dalam kampung atau antar kampung dapat dilakukan dengan berjalan kaki (Gambar27)



Sumber: Hasil wawancara, 2021

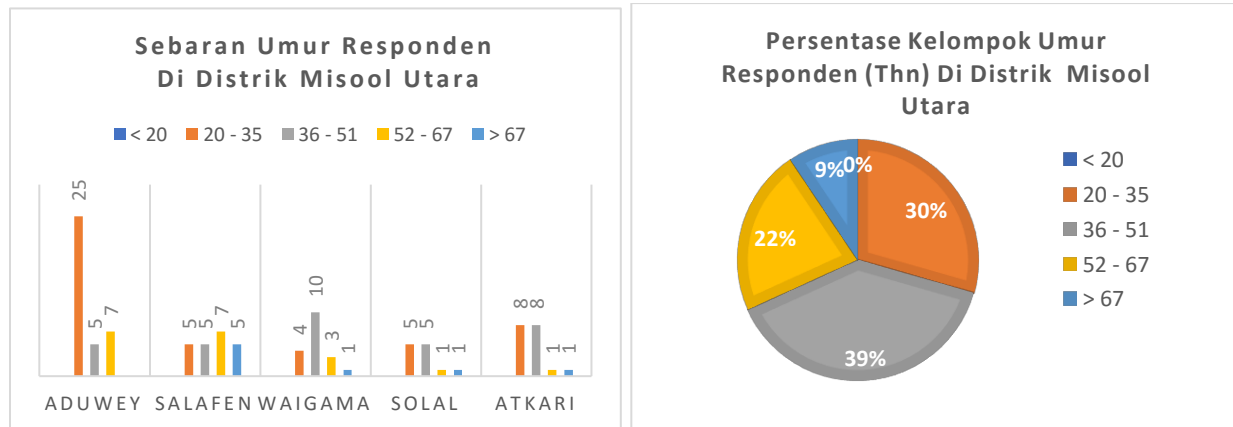
Gambar 27. Alat Transportasi yang dimiliki di Malaumkarta Raya

### 3.2. PROFIL RESPONDEN

#### 3.2.1. DISTRIK MISOOL UTARA

##### 3.2.1.1. Sebaran Umur Responden

Masyarakat di Distrik Misool Utara tersebar dalam 5 kampung memiliki tingkatan umur yang berbeda beda. Total responden adalah 85 orang. Kelompok umur 20-35 tahun ditemukan paling tinggi di kampung Aduwei, umur 36-51 tahun tertinggi ditemukan di kampung Waigama, responden pada keompok usia 52-67 tahun terbanyak ditemukan dikampung Salafen, sedangkan untuk kampung Atkari kelompok umur 20-35 tahun dan 36-51 tahun (Gambar 28).

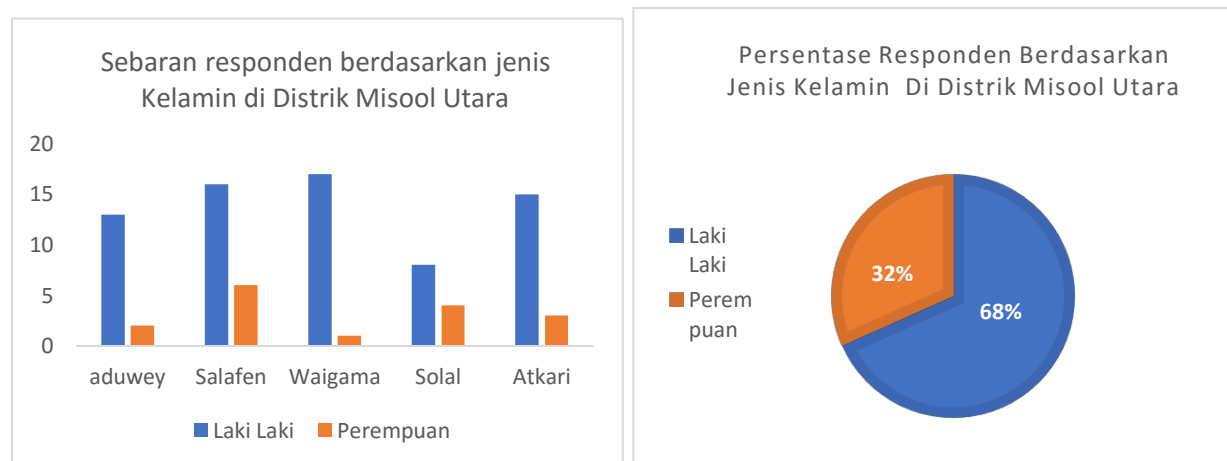


Gambar 28. Sebaran dan Persentase umur Responden di Distrik Misool Utara

Jika dilihat dari sebaran persentase kelompok umur responden maka terlihat kelompok umur 36 – 51 tahun mendominasi umur responden sebesar 39%, sedangkan kelompok umur 20 – 35 tahun merupakan kelompok umur responden terbanyak ke dua dan kelompok umur 52 – 67 tahun sebanyak 22%. Kelompok umur diatas 67 tahun masih ditemukan di Distrik Misool Utara, hal ini menggambarkan nilai harapan hidup masyarakat Distrik Misool Utara yang baik (Gambar 22).

**3.2.1.2. Sebaran Jenis Kelamin Responden.**

Keterlibatan perempuan dan laki laki sebagai responden akan memberikan gambaran atau pemahaman yang lebih komprehensif tentang pertanyaan yang diberikan (Gambar 29). Responden di setiap kampung di Distrik Misool Utara didominasi oleh kelompok laki-laki walaupun terdapat juga keterlibatan kelompok perempuan dalam jumlah yang terbatas. Di kampung Salafen keterlibatan perempuan lebih banyak di bandingkan dengan kampung-kampung lainnya



Gambar 29. Sebaran responden berdasarkan jenis kelamin di setiap kampung Pengamatan.

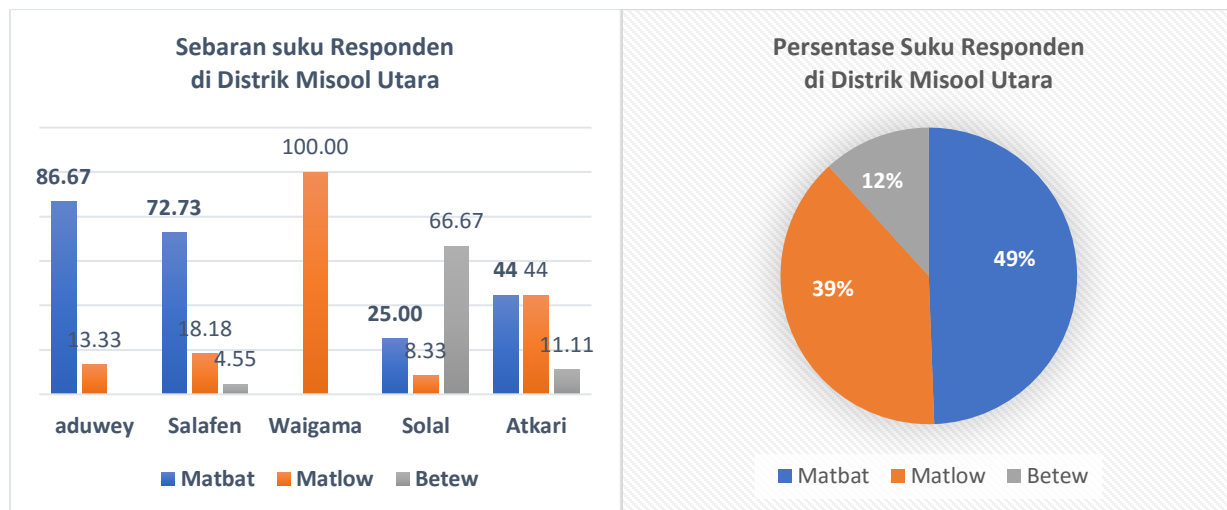
. Keterlibatan perempuan menggambarkan adanya pengakuan gender dalam kehidupan berkomunitas. Total persentase keterlibatan laki laki sebagai responden adalah sebesar 68%, dan kelompok perempuan sebesar 32%. Hal ini menunjukkan sebesar 50% atau setengah dari jumlah kelompok laki laki adalah kelompok perempuan. Implikasi bias gender secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat secara menyeluruh.

Apabila perempuan diposisikan tertinggal, maka akan sulit bagi perempuan untuk menjadi mitra sejajar laki-laki, sehingga hubungan keduanya akan menjadi timpang. Ketimpangan yang

dapat berakibat negatif, selanjutnya dapat dihindari dengan mengisi kehidupan yang “harmoni dalam berbeda”.

### 3.2.1.3. Sebaran Suku Responden

Terdapat tiga kelompok suku yang mendiami Distrik Misool Utara, yakni kelompok suku Matbat, Matlow dan Betew. Kelompok suku Matbat adalah masyarakat asli yang memiliki hak atas tanah dan sumberdaya di wilayah Misool Utara. Kelompok suku Matlow adalah kelompok masyarakat yang diartikan sebagai orang dari laut (orang luar) yang datang mendiami wilayah pesisir misool utara. Kelompok suku Betew adalah masyarakat suku Biak yang telah menetap lama di wilayah Raja Ampat. Di kampung Waigama ditemukan semua respondennya adalah masyarakat Matlow yang berasal dari daerah Ternate, Bugis, NTT, Ambon, Seram, Jawa Barat dan Jepara Jawa tengah (Gambar 30)



Gambar 30. Sebaran Persentase keseluruhan responden di Distrik Misool Utara

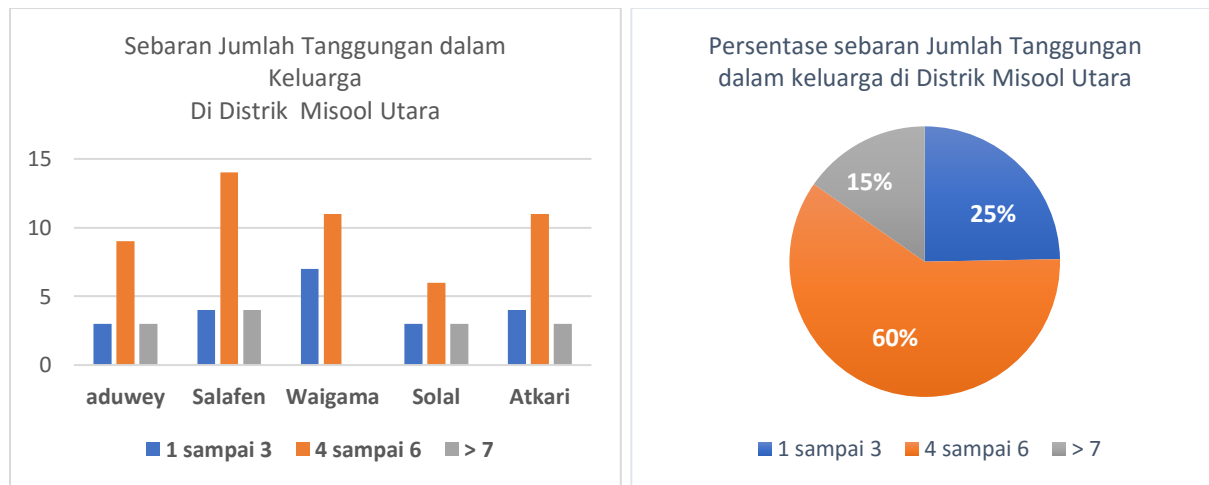
Pada Kampung Aduwey dan Salafen jumlah responden terbesar adalah mereka yang berasal dari Matbat atau orang asli Misool Utara. Di kampung Atkari jumlah responden orang Matbat dan Matlow berjumlah sama (44%) dan 11% adalah responden dari suku Betew. Pada kampung Solal responden terbanyak 66,67% adalah masyarakat dari kelompok suku Betew sedangkan jumlah Matlow hanya 8,33% dan kelompok suku Matbat sebanyak 25%.

Secara keseluruhan suku masyarakat di Distrik Misool Utara di dominasi oleh kelompok suku Matbat yang dijumpai di Kampung Aduwey, Atkari, Salafen, dan Solal sebanyak 49%. Kelompok suku Matlow tersebar di Distrik Misool Utara sebanyak 39% terdapat di 5 kampung

pengamatan. Kelompok suku Betew hanya ditemukan di kampung Solal, Atkari dan Salafen sebanyak 12%.

**3.2.1.4. Jumlah Tanggungan Keluarga**

Jumlah Tanggungan dalam sebuah keluarga akan mempengaruhi besarnya kecil biaya produksi yang digunakan dan melihat tingkat kesejahteraan RT tersebut. Jumlah Tanggungan Keluarga pada 5 kampung di Distrik Misool Utara terlihat rata rata berjumlah 4 – 6 orang ditanggung dalam 1 RT. Di kampung Waigama sebagian RT juga menanggung 1 – 3 anggota dalam satu keluarga. Tanggungan diatas 7 orang dalam RT ditemukan di Kampung Aduwey, Salafen, Solal dan Atkari. Tanggungan di atas 7 orang biasanya dijumpai pada keluarga yang menetap dalam satu Rumah lebih dari 1 KK. (Gambar 31)

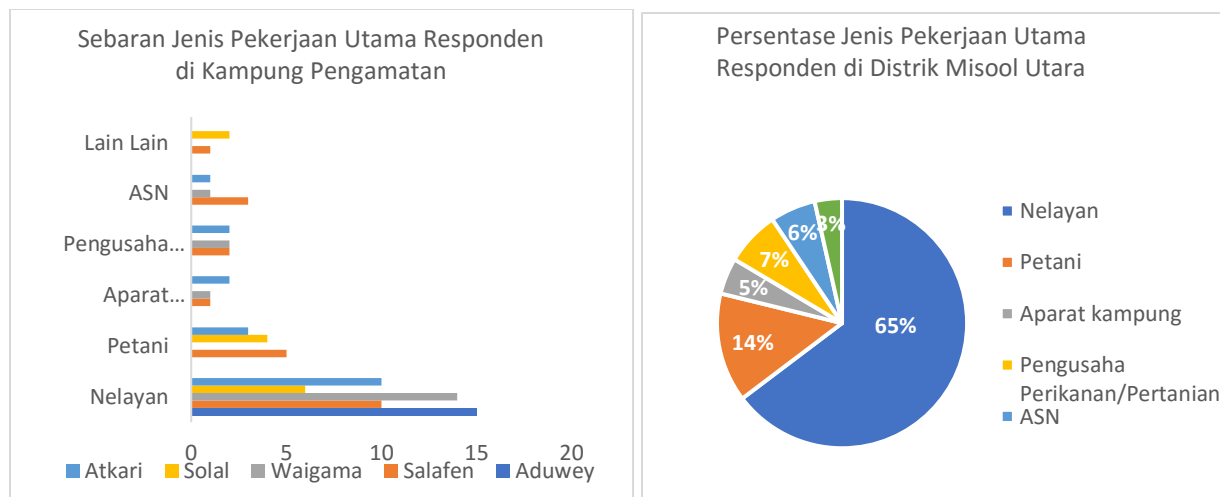


Gambar 31. Sebaran Jumlah Tanggungan dalam Keluarga di Distrik Misool Utara

Jika dilihat dalam persentase maka jumlah tanggungan dalam keluarga sebanyak 4-6 orang memiliki jumlah tertinggi yakni sebanyak 60%, 1 sampai 3 tanggungan keluarga sebanyak 25% dan diatas 7 orang tanggungan dalam satu keluarga berjumlah 15%.

**3.2.1.5. Pekerjaan Utama Responden**

Pekerjaan utama responden pada wilayah studi adalah sebagai nelayan, petani, aparat kampung, pengusaha perikanan dan pertanian (sebagai penada ikan, kapal jolor dan pengusaha kopra), ASN. Lain lain yang bekerja di NGO konservasi (YNPB) dan Tukang bangunan. Jumlah responden dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan terbanyak di Kampung Aduwey, Waigama, Atkari dan Salafen serta kampung Solal. Responden dengan Mata Pencaharian Utama Pertanian ditemukan terbanyak di kampung Salafen, Solal dan Atkari.

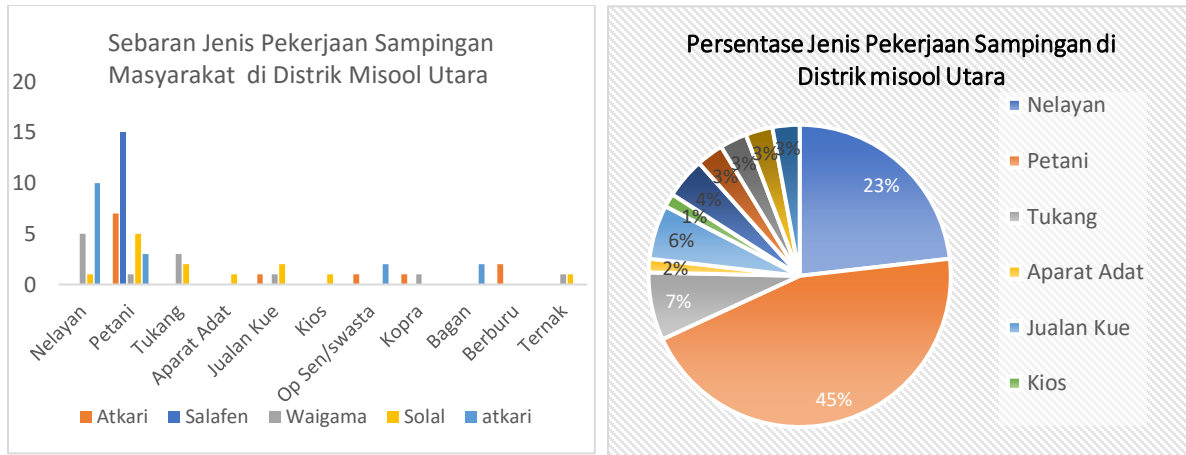


Gambar 32. Sebaran dan Persentase jenis pekerjaan utama responden di Distrik Misool Utara

Pengusaha perikanan dan pertanian ditemukan di Salafen, Waigama dan Atkari. Pengusaha perikanan berupa pemilik Bagan Ikan puri di Atkari, Kapal ikan Jolor sebagai penadan di Waigama dan bagan cumi di Waigama. Pengusaha pertanian berupa pengusaha kopra ditemukan di Waigama. Secara keseluruhan responden di distrik misool Utara di dominan oleh jenis pekerjaan Utama sebagai Nelayan yaitu sebesar 65%, petani sebesar 14%, pengusaha perikanan dan pertanian sebesar 7%, ASN, Aparat Kampung dan lain lain seperti NGO konservasi dan tukang bangunan.

### 3.2.1.6. Pekerjaan Sampingan Responden

Pekerjaan Sampingan Responden Ada 11 jenis pekerjaan sampingan dari responden di Di Distrik Misool Utara yaitu nelayan, petani, tukang bangunan, aparat adat, jualan kue, kios, operator sensor dan swasta, pengumpul kopra, pemilik bagan, berburu dan ternak. Responden dengan mata pencaharian tambahan sebagai Petani terbanyak terdapat di kampung Salafen, sedangkan di Kampung Atkari mata pencaharian tambahan tertinggi adalah Nelayan (Gambar 33).

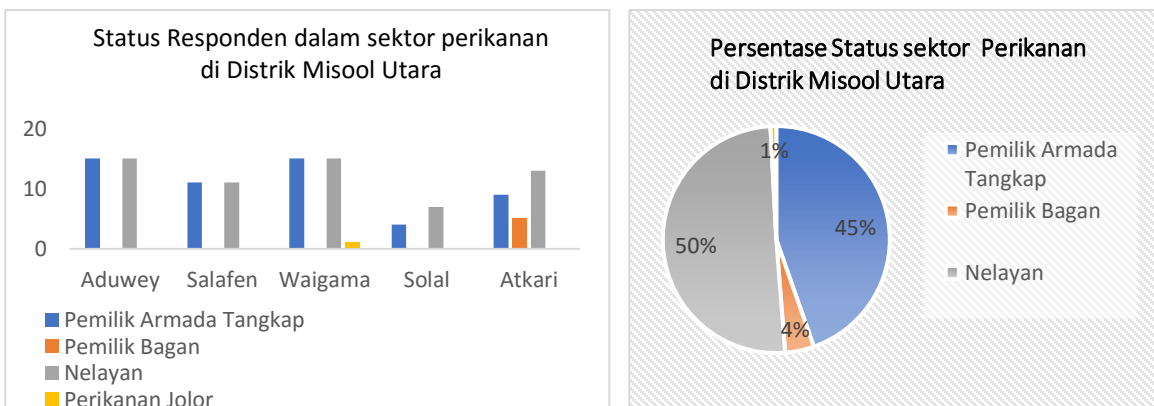


Gambar 33. Sebaran dan Persentase jenis pekerjaan sampingan responden di Distrik Misool Utara

Persentase terbesar dari jenis pekerjaan sampingan responden di Distrik Misool sebanyak 45% yaitu Pertanian, Nelayan sebanyak 23%, Tukang bangunan sebesar 7%, Penjual kue sebesar 6% sedangkan berikutnya adalah jenis pekerjaan operator sensor dan swasta.

### 3.2.1.7. Status Responden Dalam Sektor Perikanan

Status responden dari sektor perikanan di Distrik Misool Utara digambarkan sebagai pemilik armada tangkap, pemilik bagan, sebagai nelayan dan perikanan jolor (Gambar 34). Di kampung Aduwey status responden sebagai nelayan dan pemilik armada tangkap dalam jumlah yang sama terdapat di Kampung Salafen dan Aduwey. Responden di Kampung Waigama status perikanan adalah perikanan jolor, nelayan dan pemilik armada. Di kampung Atkari status responden di sekitro perikanan adalah selain nelayan dan pemilik armada tangkap ditemukan juga sebagai pemilik bagan ikan teri/puri.



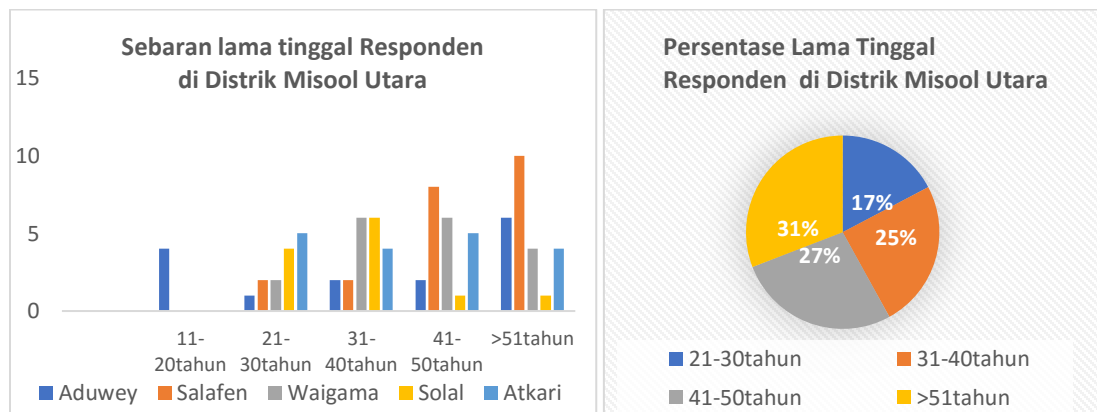
Gambar 34. Status Responden dalam sektor perikanan di Malaumkarta Raya

Jika dilihat dari persentase status responden dalam sektor perikanan di Distrik Misool Utara maka sebanyak 50% adalah sebagai Nelayan, 45% responden memiliki armada tangkap, hanya 4% responden sebagai pemilik bagan puri/teri dan 1% perikanan jolor. Dari status ini dapat dijelaskan bahwa masyarakat di Distrik Misool sangat bergantung di sektor perikanan dalam mengusahakan penghidupan rumah tangga mereka.

**3.2.1.8. Lama Tinggal Responden dalam kampung**

Variabel lama tinggal bagi seseorang di suatu wilayah atau kampung adalah menunjukkan rasa memiliki terhadap wilayah tersebut dan intensitas interaksinya dengan sumberdaya di wilayah itu. Seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah kampung atau daerah tertentu dalam waktu yang lama atau panjang akan merasa lebih memiliki wilayah tersebut, dibandingkan dengan orang yang hanya beberapa saat datang dan tinggal.

Responden di kampung Salafen, Atkari, waigama, dan Solal tinggal menetap selama 21 tahun sampai lebih dari 51 tahun, sedangkan di Kampung Aduwey responden yang dijumpai ada yang menetap di Kampung dalam kisaran 11-20 tahun (Gambar 35).

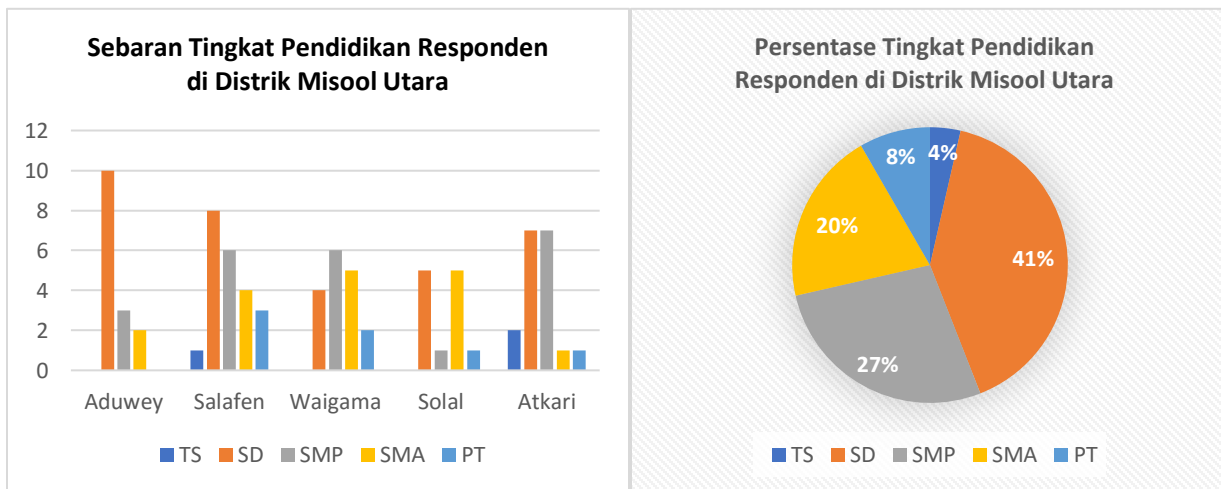


Gambar 35. Sebaran dan Persentase lama tinggal Responden di Distrik Misool Utara

Jika dilihat dari persentasenya rata-rata responden terbanyak menetap di kampung selama >51 tahun sebanyak 31%. Lama tinggal 41-50 tahun sebanyak 27% responden, sedangkan sebanyak 25% responden menetap selama 31-40 tahun dan 17% adalah mereka yang tinggal 21-30 tahun. Rata-rata responden di Misool Utara menetap di kampung sejak lahir

### 3.2.1.9. *Tingkat Pendidikan Responden*

Tingkat pendidikan responden di Distrik Misool Utara tersebar dari tingkat Tidak sekolah sampai Perguruan tinggi. Di Kampung Salafen masih ditemukan responden yang belum mengenyam pendidikan sampai yang telah menamatkan pendidikan tingkat Pascasarjana. Di Kampung Aduwey rata rata responden telah menamatkan pendidikan sekolah dasar. Di kampung Waigama responden terbanyak menamatkan pendidikan di Tingkat SMP dan di Kampung Solal responden terbanyak memiliki pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar dan SMA (Gambar 36)



Gambar 36. Sebaran dan Persentase tingkat pendidikan responden di Distrik Misool Utara

Secara keseluruhan responden di Misool Utara 41% telah mengenyam pendidikan di tingkat Sekolah Dasar. Tingkat SMP sebanyak 27% dan SMA sebanyak 20% serta Perguruan Tinggi/Universitas sebanyak 8%. Responden yang tidak sekolah hanya sebanyak 4% atau jumlah yang sedikit ditemukan. Dari keadaan ini maka digambarkan bahwa masyarakat di distrik misool utara telah mendapatkan pendidikan yang baik.

### 3.2.2. **DISTRIK MAKBON – MALAUMKARTA RAYA**

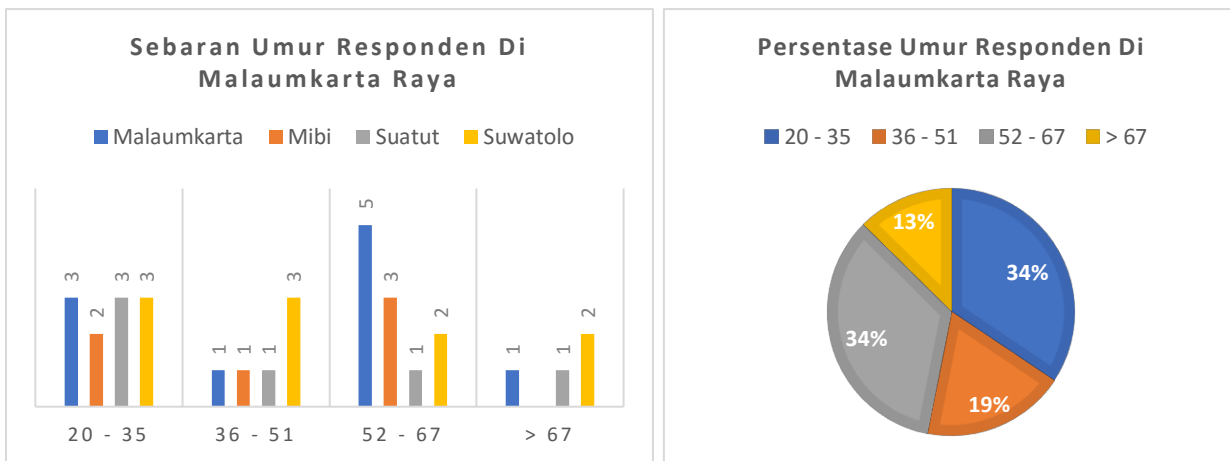
Karakteristik responden di Distrik Makbon, wilayah malaumkarta raya yang terdiri dari kampung Malaumkarta, Mibi, Suatut, Suwatolo terdiri dari 32 responden yang memberikan gambaran umum keadaan masyarakat di Malaumkarta raya yang dijelaskan dari umur, jenis kelamin, pendidikan, suku, pendidikan. Tanggungan dalam keluarga, pekerjaan utama dan



sampingan responden. Variabel variabel ini dijelaskan dengan jelas dalam setiap kampung dan persentase yang digunakan untuk menjelaskan keadaan umum dari responden.

### 3.2.2.1. Sebaran Umur Responden

Sebaran umur responden di wilayah Malaumkarta raya tertinggi terdapat pada kelompok umur 20 – 35 Tahun. Di Kampung Malaumkarta dan Mibi responden dengan kelompok usia 52-67 tahun yang banyak dijumpai, sedangkan pada Kampung responden pada kelompok usia 20-35 tahun dan usia 36-51 tahun yang paling banyak dijumpai sebagai responden. Pada Kampung Suwatolo kelompok umur 20 – 35 tahun terbanyak sebagai responden (Gambar 37).



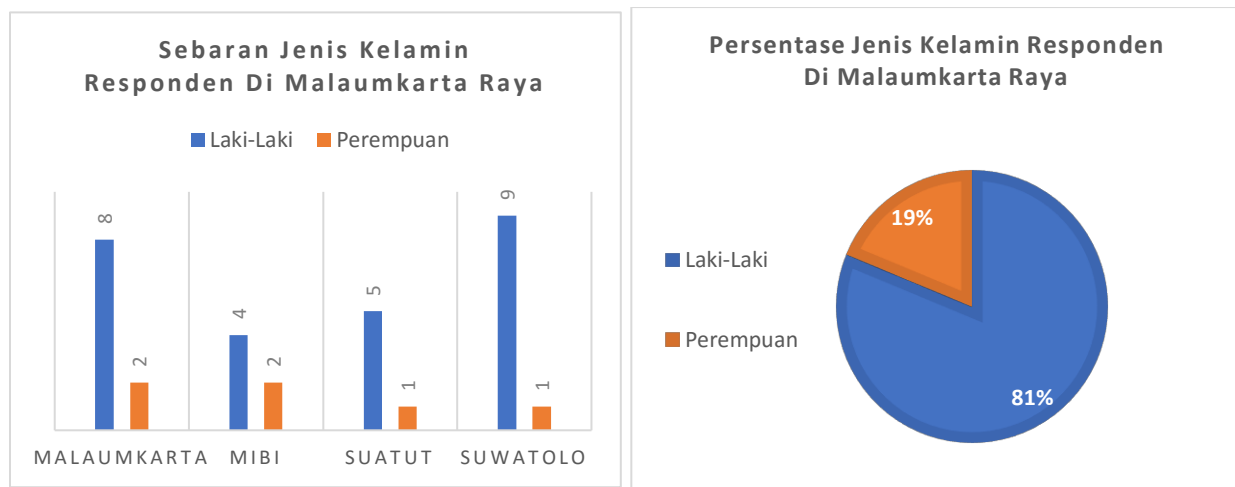
Gambar 37. Sebaran Umur Responden di Malaumkarta Raya

Jika dilihat dari persentase maka responden pada kelompok umur 20 – 35 Tahun dan 52 – 67 Tahun adalah kelompok responden terbesar yang dijumpai sebagai responden yakni 34%. Sedangkan kelompok umur 36 – 51 Tahun adalah kelompok umur terbanyak kedua dan kelompok umur diatas 67 Tahun adalah kelompok umur yang sedikit menjadi responden.

Kondisi ini dapat memberikan gambaran bahwa Masyarakat di Malaumkarta Raya yang aktif serta dapat memberikan pendapat dan menerima hal baru adalah kelompok usia produktif. Jika disuatu wilayah keterlibatan usia produktif aktif dalam sebuah pembangunan maka hal ini berdampak positif bagi pembangunan di suatu wilayah.

### 3.2.2.2. Sebaran jenis kelamin Responden

Mengetahui sebaran jenis kelamin responden di suatu wilayah dalam menerapkan sebuah program atau kegiatan baru menjadi hal yang penting. Keterwakilan kelompok perempuan dan laki laki dapat menggambarkan keterbukaan komunikasi di sebuah tempat dan keberpihakan bagi kelompok perempuan yang selama ini dalam perspektif gender adalah kesetaraan. Responden yang ada di wilayah Malaumkarta Raya berdasarkan gender terlihat di empat kampung pengamatan peran laki laki lebih aktif dari kelompok perempuan. Laki Laki mendominasi kelompok perempuan saat wawancara dilakukan (Gambar 38)



Gambar 38. Sebaran Jenis Kelamin Responden di Malaumkarta Raya

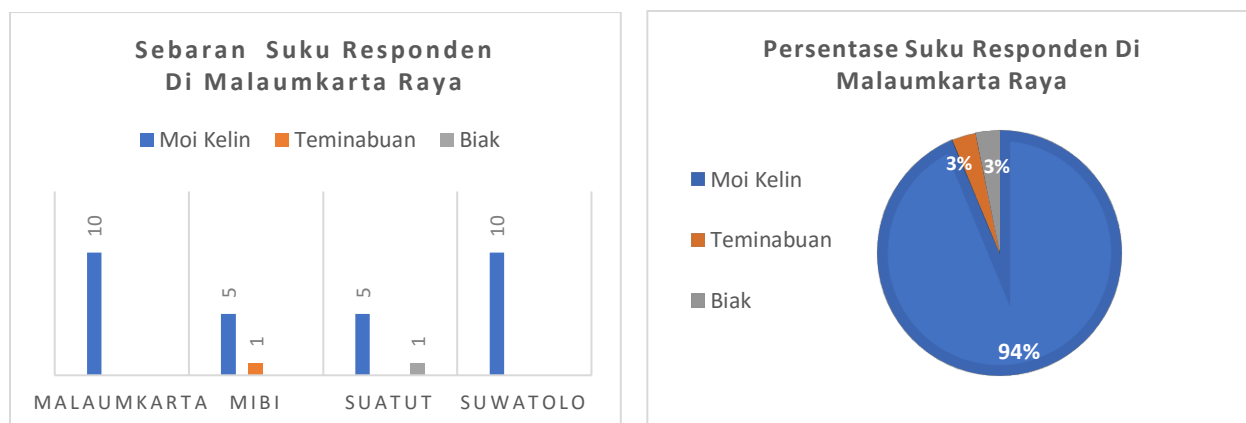
Keterlibatan perempuan sebagai responden pada empat kampung di wilayah Malaumkarta Raya sangat kecil, terlihat dari sebaran persentase kelompok laki laki lebih dominan sebesar 81%. Keterwakilan perempuan sangat kecil persentasenya hanya 19%. Keterlibatan perempuan di Malaumkarta Raya perlu mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengungkapkan pendapat mengenai hal hal baru atau program baru yang akan diimplementasikan di wilayah tersebut. Selain memberikan perlakuan yang adil, dibuka kesempatan yang sama dalam urusan publik bagi perempuan desa/kampung. Tercapainya tujuan SDGs Desa/kampung ini juga menyaratkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Beberapa indikator tercapainya tujuan SDGs Desa/kampung adalah: tersedianya ruang dan kesempatan bagi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa, baik sebagai aparatur desa

maupun dalam Badan Perwakilan Desa (BPD)/Bamuskam; median usia kawin pertama perempuan; layanan kesehatan untuk perempuan, dan layanan pendidikan untuk perempuan; serta keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa/kampung (<https://sdgsdesa.kemendes.go.id/sdgs-des-a-nomor-5-keterlibatan-perempuan-des-a>)

### 3.2.2.3. Sebaran suku responden

Suku Moi Kelin adalah pemilik Wilayah Malaumkarta Raya atau merupakan suku asli yang memiliki hak terhadap tanah dan sumberdaya alam (Gambar 39). Di kampung Malaumkarta responden semua berasal dari suku Moi. Dalam observasi yang dilakukan masyarakat di Malaumkarta menjaga wilayahnya dari masuknya orang lain dari suku lain hal ini menunjukkan integritas menjaga wilayah leluhurnya dan sumberdaya alamnya.

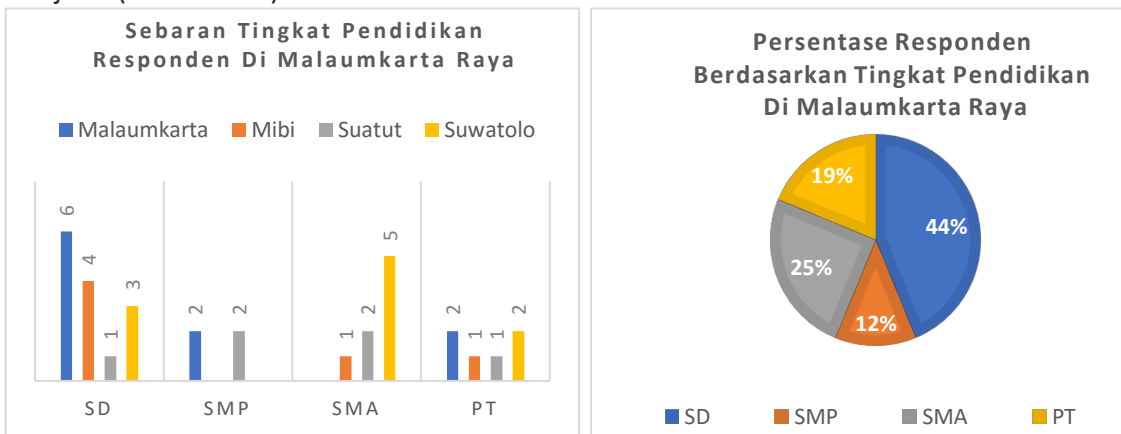


Gambar 39. Sebaran Suku di wilayah Malaumkarta raya

Pada kampung Mibi dan Suatut selain suku Moi sebagai suku utama pemilik wilayah juga ditemukan responden dari suku Teminabuan dan Biak, dalam jumlah yang sangat kecil hanya 3%. Sedangkan responden suku Moi Kelin sebanyak 94%.

### 3.2.2.4. Sebaran tingkat pendidikan Responden

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisis sumber daya manusia. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Di wilayah Malaumkarta Raya responden ditemukan telah mencapai tingkat pendidikan di Perguruan Tinggi atau Sarjana (Gambar 40)



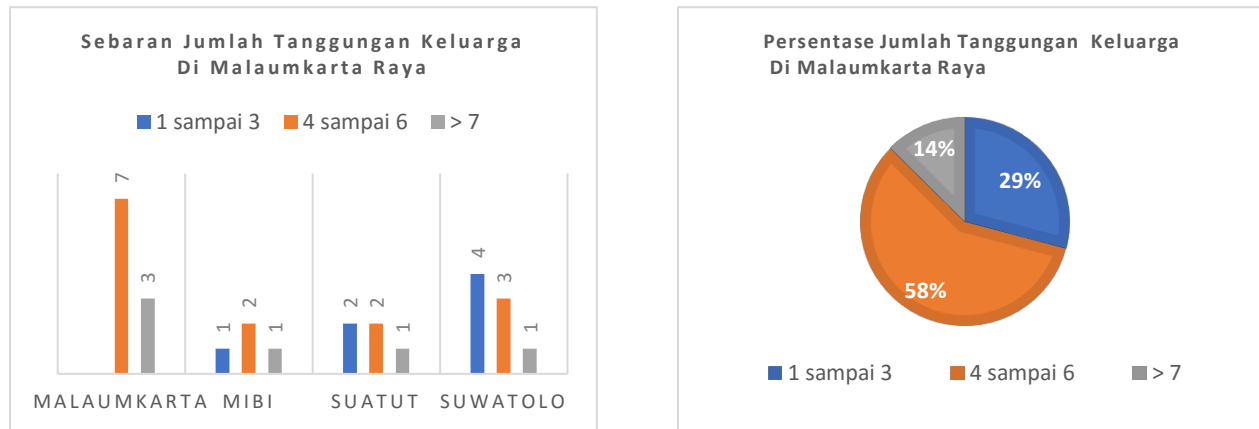
Gambar 40. Sebaran tingkat pendidikan Responden

Responden di Kampung Suwatolo terbanyak mengenyam pendidikan pada tingkat SMA. Sedangkan responden di Kampung Malaumkarta dan Mibi tertinggi memiliki pendidikan di tingkat Sekolah Dasar. Untuk responden di Kampung Suatut tertinggi mengenyam pendidikan di SMP dan SMA. Jika dilihat dari persentase maka Responden di wilayah Malaumkarta Raya telah mengenyam pendidikan pada tingkat SD sebanyak 45%. SMA 25%, Perguruan Tinggi 19% dan SMP 12%.

### 3.2.2.5. Sebaran Jumlah Tanggungan Keluarga Responden

Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan dalam sebuah Rumah Tangga/ Keluarga menjadi salah satu parameter sosial ekonomi yang penting. Besaran jumlah anggota keluarga akan menjadi beban tanggungan dan mempengaruhi alokasi biaya dalam usaha keluarga. Jumlah anggota keluarga lebih dari 7 orang ditemukan pada responden di semua kampung malaumkarta raya. Jumlah anggota keluarga 4-6 orang tertinggi ditemukan pada kampung

Malaumkarta, jumlah anggota keluarga 1-3 orang ditemukan terbanyak di kampung Suwatolol (Gambar 41).



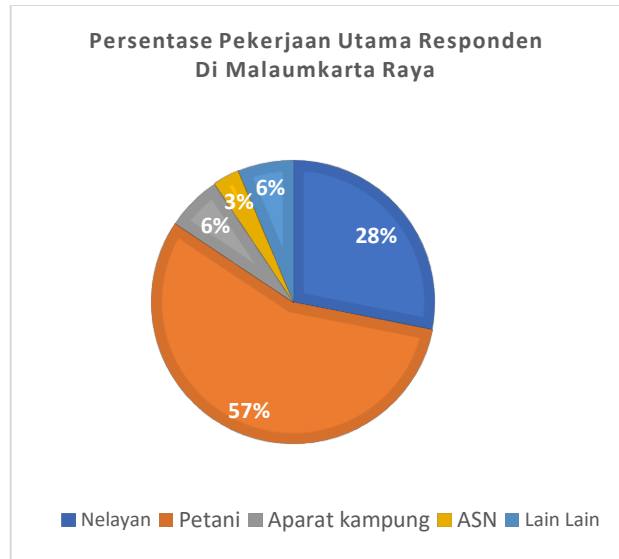
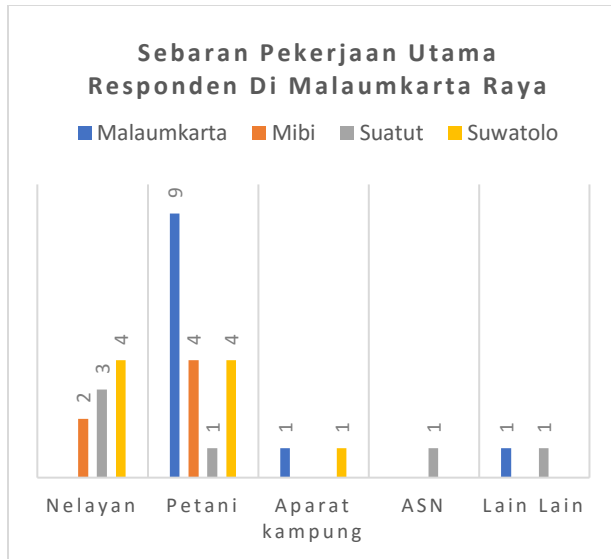
Gambar 41. Sebaran Jumlah Tanggungan keluarga Responden

Jika dilihat dari sebaran persentase tanggungan keluarga maka jumlah 4-6 orang dalam sebuah rumah tangga responden paling tertinggi 58%, jumlah 1-3 tanggungan keluarga sebanyak 28% responden dan tanggungan diatas 7 orang hanya 14%.

### 3.2.2.6. Sebaran Pekerjaan Utama Responden

Jenis pekerjaan Utama responden di wilayah Malaumkarta raya adalah Nelayan, Petani, Aparat kampung, ASN dan lain lain (Pendeta/pelayan Gereja dan Peternak). Dikampung malaumkarta petani merupakan pekerjaan utama, sebagai aparat kampung dan peternak serta pelayan gereja. Dikampung Mibi Responden memiliki pekerjaan utama sebagai petani dan nelayan. Responden sebagai nelayan terbanyak ditemukan di Kampung Suwatolo dan Suwatut (Gambar 42)

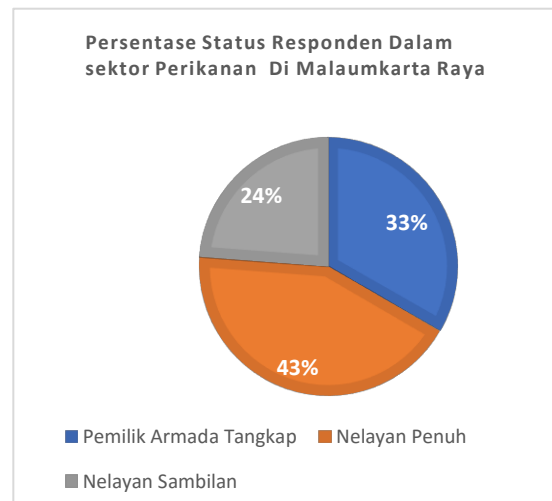
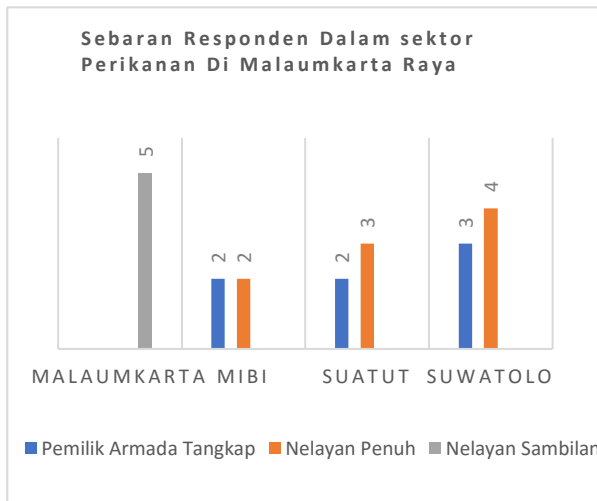
Jika dilihat dari persentase pekerjaan utama responden maka Petani adalah pekerjaan Utama responden di wilayah Malaumkarta raya sebanyak 57%, selanjutnya nelayan sebanyak 28%, responden yang bekerja sebagai aparat kampung dan peternak dan pelayan gereja sebanyak 6% dan 3% adalah responden yang bekerja sebagai ASN.



Gambar 42. Sebaran Pekerjaan Utama Responden

### 3.2.2.7. Status Responden dalam sektor perikanan

Status responden dalam sektor perikanan dijelaskan dengan status sebagai pemilik armada tangkap, Nelayan penuh dan nelayan sampingan/nelayan paruh waktu. Di kampung Malaumkarta responden adalah sebagai nelayan sambilan (gambar 43).



Gambar 43. Status Responden dalam sector perikanan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat hanya menangkap ikan dengan menggunakan pancing tidak sebagai rutinitas, ikan dimanfaatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Responden sebagai nelayan penuh dan pemilik armada tangkap ditemukan di kampung Suatut Suwatolo dan Mibi, ketiga kampung ini masyarakatnya menjadikan

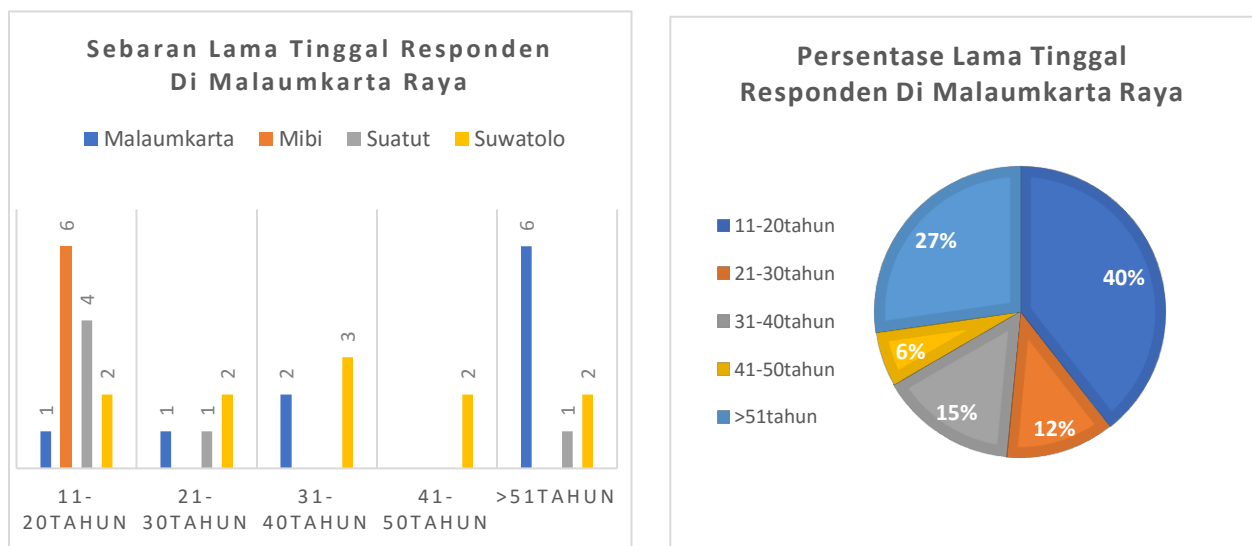
nelayan sebagai mata percaharian utama mereka. Di Kampung Mibi ditemukan responden sebagai nelayan penuh dan pemilik armada tangkap.

Secara keseluruhan responden sebagai Nelayan penuh memiliki persentase tertinggi 45%, pemilik armada tangkap 33% dan sebagai nelayan sambilan 24%. Masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya perikanan di wilayah Malaumkarta Raya menggunakan pancing untk menangkap ikan, jarak melaut nelayan di depan kampung atau pada perairan malaumkarta. Pemanfaatannya untuk konsumsi keluarga atau tidak melakukan produksi dalam jumlah besar dan belum berorientasi pasar.

**3.2.2.8. Lama Tinggal Responden di Malaumkarta Raya**

Lama tinggal seseorang di wilayah tertentu akan mempengaruhi rasa memiliki dan tanggung jawab orang tersebut terhadap tempat atau wilayah tinggalnya. Responden di Kampung Malaumkarta ditemukan menetap diatas 51 tahun dikarenakan kampung ini adalah kampung tua di wilayah Malaumkarta raya.

Kelompok dibawah 20 tahun tertinggi ditemukan di Kampung Mibi, responden rata rata tinggal 6 tahun di kampung tersebut. Responden yang telah menetap seama 21 – 40 tahun ditemukan terbanyak di kampung Suwatolo. Responden yang menetap selama 41 – 50 tahun ditemukan di Suwatolo. (Gambar 44)



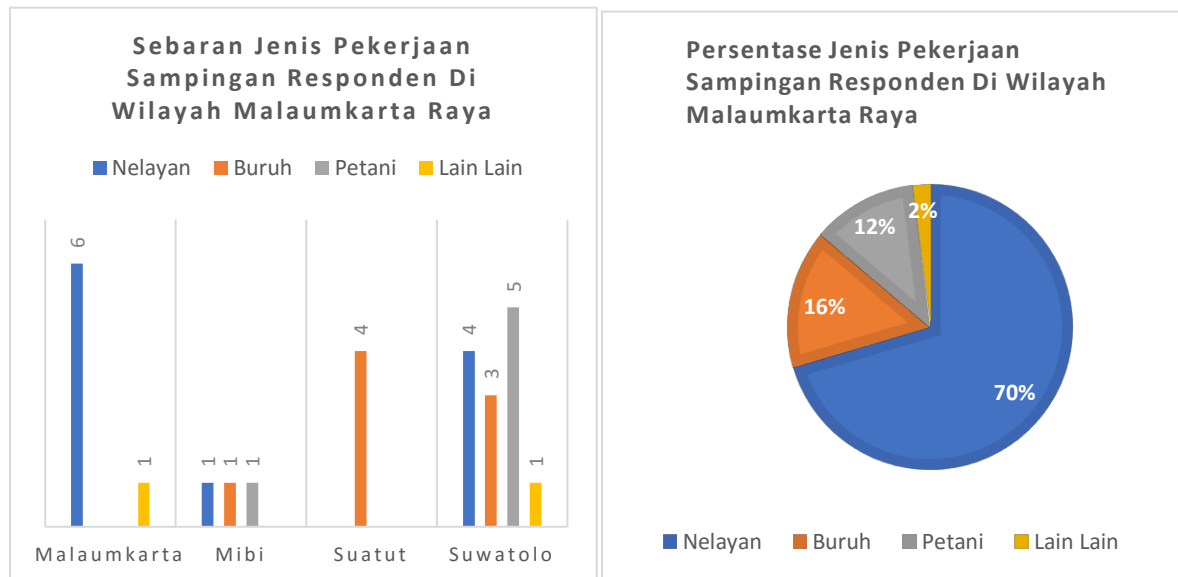
Gambar 44. Lama Tinggal Responden di Malaumkarta Raya

Sebaran berdasarkan persentase lama tinggal responden tertinggi < 20 Tahun sebanyak 40%, > 51 tahun terdapat responden sebanyak 27%. Responden yang menetap di kampung selama 31-40 tahun adalah sebesar 15%, 12% adalah 21-30 tahun sedangkan mereka yang menetap selama 41-50 tahun adalah sebanyak 6% responden.

**3.2.2.9. Pekerjaan Sampingan Responden**

Jenis pekerjaan sampingan Responden di malaumkarta Raya adalah Nelayan, Buruh, Petani dan lain-lain (Penjaga homestay dan Ojek laut ke Pulau Um). Nelayan adalah pekerjaan sampingan tertinggi responden di kampung malaumkarta. Selain di kampung malaumkarta juga nelayan ditemukan di kampung Mibi dan Suwatolo.

Pekerjaan sebagai Buruh terbanyak ditemukan di kampung Suatut, selanjutnya di Mibi dan Suwatolo. Pekerjaan sampingan sebagai Petani responden terbanyak ditemukan di kampung Suwatolo selanjutnya di Mibi. Pekerjaan lain lain sebagai ojek laut ke pulau Um ditemukan responden di Kampung Suwatolo sedangkan penjaga homestay berada di kampung Malaumkarta (Gambar 45).



Gambar 45. Pekerjaan Sampingan Responden di wilayah Malaumkarta Raya

Persentase jenis pekerjaan sampingan responden di wilayah Malaumkarta raya terlihat Nelayan sebanyak 70% dari responden, Buruh sebanyak 16% responden dan Petani sebanyak 12% serta lain lainnya hanya 2%. Jika dilihat pada pekerjaan utama responden sebagian besar adalah



Petani maka pekerjaan sampingan mereka mengarah sebagai nelayan dengan status rata rata adalah nelayan sambilan.

### **3.2.3. DISTRIK BIKAR – WERUR RAYA**

Distrik Bikar merupakan salah satu distrik di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat. Distrik Bikar mekar dari Distrik Sausapor pada tahun 2015. Komunitas Bikar secara umum merupakan migran dari Biak yang memiliki sejarah, tradisi, budaya, dan adat-istiadat yang merupakan peninggalan leluhur mereka. Salah satu tradisi yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya adalah *Sasi*, yang dalam praktiknya berperan secara arif, bertanggung jawab, kolektif, dan berkelanjutan karena mengatur pola dan waktu pemafaatan, sehingga mencegah pemanfaatan sumberdaya secara dini, berlebihan, dan tidak bertanggung jawab.

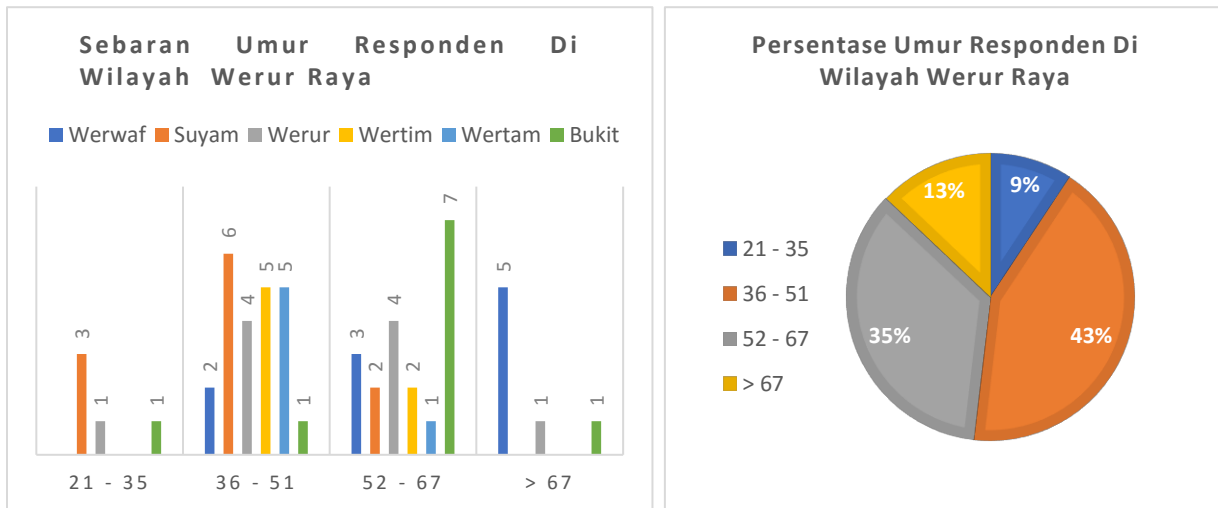
Praktik *Sasi* oleh komunitas Bikar saat ini telah mengalami banyak perkembangan dari yang dulu dipraktikkan oleh nenek moyang suku Biak di negeri asal mereka. Praktik *sasi* kini tidak hanya dilakukan oleh lembaga adat, namun juga melibatkan lembaga keagamaan, yakni gereja. Dalam praktiknya, *Sasi* oleh komunitas Bikar memang masih sangat sederhana, namun kesadaran komunitas akan urgensi praktik *Sasi* bagi keberlanjutan sumberdaya beserta keterbukaan untuk bersinergi dengan pihak pemangku kepentingan lain, menjadi potret masa depan pengelolaan sumberdaya di tingkat distrik. Kajian ini menjadi arena untuk mendalami dan mengembangkan kelembagaan *Sasi* di Distrik Bikar sebagai bagian dari upaya menghadirkan negara di komunitas-komunitas masyarakat adat (Dirjen PRL KKP, 2018).

Survei sosial ekonomi ini menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang tergambar dari profil responden yang berada di 6 kampung dalam wilayah werur raya. Informasi seperti sebaran umur, suku, jenis pekerjaan utama, pekerjaan sambilan, tingkat pendidikan, lama tinggal di kampung, tanggungan anggota keluarga dan keterlibatan dalam sektor perikanan.

#### **3.2.3..1 Sebaran Umur Responden**

Responden di wilayah Werur Raya dijumpai paling banyak berada pada kisaran umur 36 - 67 tahun. Responden di kampung Bukit tertinggi berada pada kelompok umur 52-67. Responden dengan kelompok umur diatas 67 Tahun juga ditemukan di kampung bukit dan werur. Sedangkan responden dengan kelompok umur 21-35 tahun ditemukan sebanyak 3 responden di kampung

Bukit, Suyam dan Werur. Responden di Kampung Suyam, Bukit dan Werur ditemukan pada kelompok umur 21 – 35 Tahun (Gambar 46).



Gambar 46. Sebaran dan persentase umur responden di wilayah Werur Raya

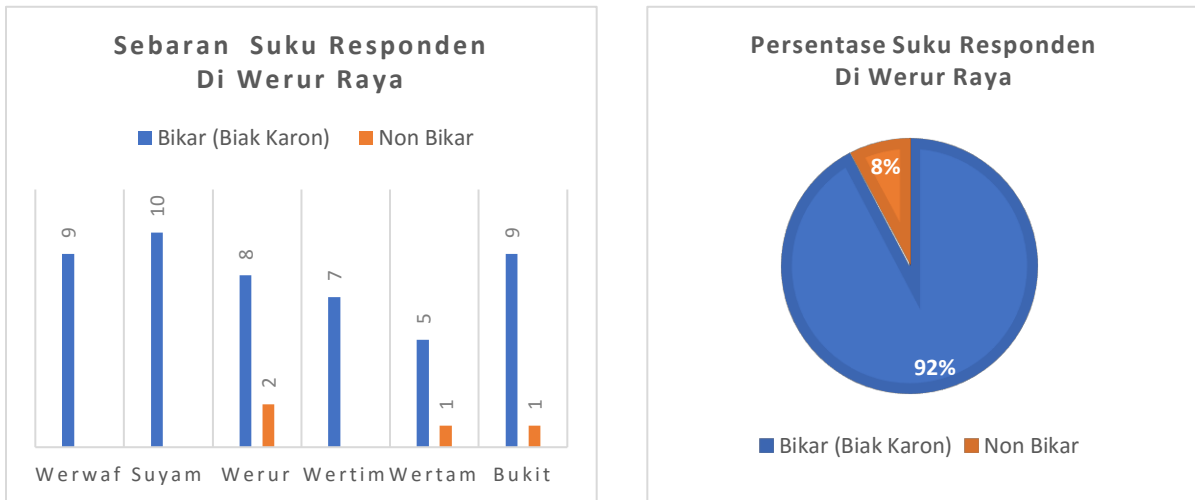
Berdasarkan persentase umur responden di wilayah Werur Raya maka kelompok umur 35-51 tahun adalah responden terbanyak yang ditemukan saat wawancara yaitu 43%. Kelompok umur terbanyak kedua adalah 51-67 tahun yakni 35%. Di werur Raya masih juga ditemukan responden dengan umur diatas 67 tahun walaupun jumlahnya terbatas 13%, Responden dengan sebaran umur 21-35 tahun ditemukan sebanyak 9%.

Jika dilihat dari komposisi umur responden maka dapat digambarkan bahwa umur masyarakat di Werur Raya terbanyak berada pada usia produktif atau ketersediaan SDM tangguh dalam siap bekerja tersedia di Kampung. Pada kelompok umur diatas 67 tahun yang masih terdapat di wilayah ini menggambarkan bahwa harapan hidup masyarakat baik.

### 3.2.3.2. Sebaran Suku Responden

Responden pada 6 kampung di wilayah Werur Raya adalah suku Bikar 92% dan suku non bikar seperti Flores dan Ambon sebanyak 8%. Adanya suku non Bikar di wilayah Werur Raya adalah mereka yang memiliki Kios/Warung di Kampung juga karena perkawinan yang terjadi.

Di kampung Werwaf, Suyam, dan Wertim responden semua berasal dari Suku Bikar, sedangkan responden yang di Kampung Werur, wertam dan Bukit ditemukan responden yang berasal dari suku non Bikar (Gambar 47).



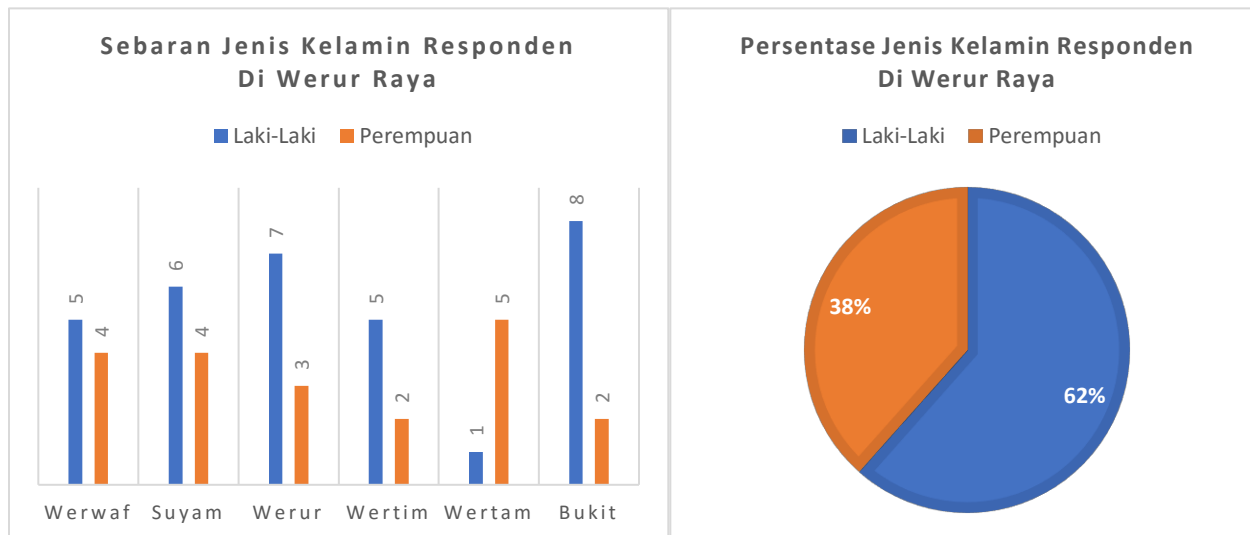
Gambar 47. Sebaran dan Persentase Suku Responden di Werur Raya

Mayoritas responden berasal dari suku Bikar atau yang disebut Biak Karon. Karon adalah sebutan dari orang Biak untuk penduduk asli daratan. Karon dalam bahasa Biak berarti tempat menyelam. Karon dipilih orang Biak untuk menggambarkan bahwa kawasan perairan sekitar Werur sebelum kepindahan mereka ke daratan Werur adalah tempat mereka menyelam. Namun karena kesalahpahaman ditengah penduduk asli, mereka salah menganggap bahwa karon sebagai karom yang berarti ulat, sehingga karon seolah adalah kata hinaan untuk mereka. Sehingga mulailah mereka disebut sebagai Suku Abun, suku asli daratan, termasuk Werur (Dirjen PRL, 2018).

### 3.2.3.3. Sebaran Jenis Kelamin Responden

Responden Laki laki dan Perempuan ditemukan di semua kampung pengamatan. Jumlah responden tertinggi untuk kelompok laki-laki ditemukan di Kampung Bukit, Werur, Suyam, Werwaf dan Wertam. Untuk kelompok perempuan responden terbanyak di temukan di kampung Wertam, Werwaf, Suyam, Werur, Wertim dan Bukit (Gambar 48). Dilihat dari persentasenya maka laki-laki sebanyak 62% dan perempuan sebanyak 38%. Perempuan telah mendapatkan

kesempatan dalam mengemukakan pendapat menunjukkan hak perempuan dalam menyampaikan pendapat telah terakomodir dengan baik.



Gambar 48. Sebaran dan Persentase Jenis Kelamin Responden di Werur raya

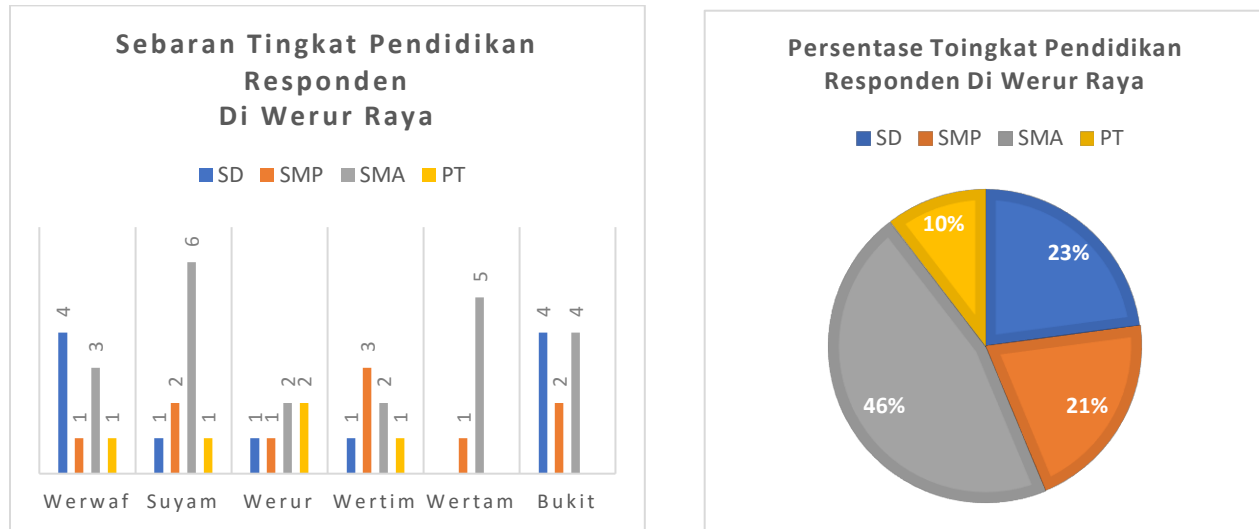
Gambaran jenis kelamin responden juga akan memberikan pengertian tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam mengemukakan pendapat. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat, dan dapat berubah. Selain itu, gender diartikan sebagai pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan mendapat dukungan masyarakat itu sendiri, yang berbeda di setiap tempat dan waktu.

World Bank menyebutkan bahwa kesetaraan gender merupakan persoalan pokok pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Dalam konteks itulah jika negara kita mau membangun pemerintahan yang maju setidaknya memperhatikan masalah secara khusus yang berkaitan dengan kesetaraan gender (World Bank, 2001).

#### **3.2.3.4. Sebaran Tingkat Pendidikan Responden**

Tingkat pendidikan responden terdiri dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Ada kampung yang tidak ditemui responden dengan pendidikan tertentu seperti kampung

Wertam dan di Kampung Bukit. Responden dengan pendidikan SD banyak ditemukan di Kampung Bukit dan Werwaf. Sedangkan yang berpendidikan SMP terbanyak ditemukan di Kampung Bukit dan Wertim. Responden dengan pendidikan SMA terbanyak di temukan di kampung Suyam dan Wertam (Gambar 49).

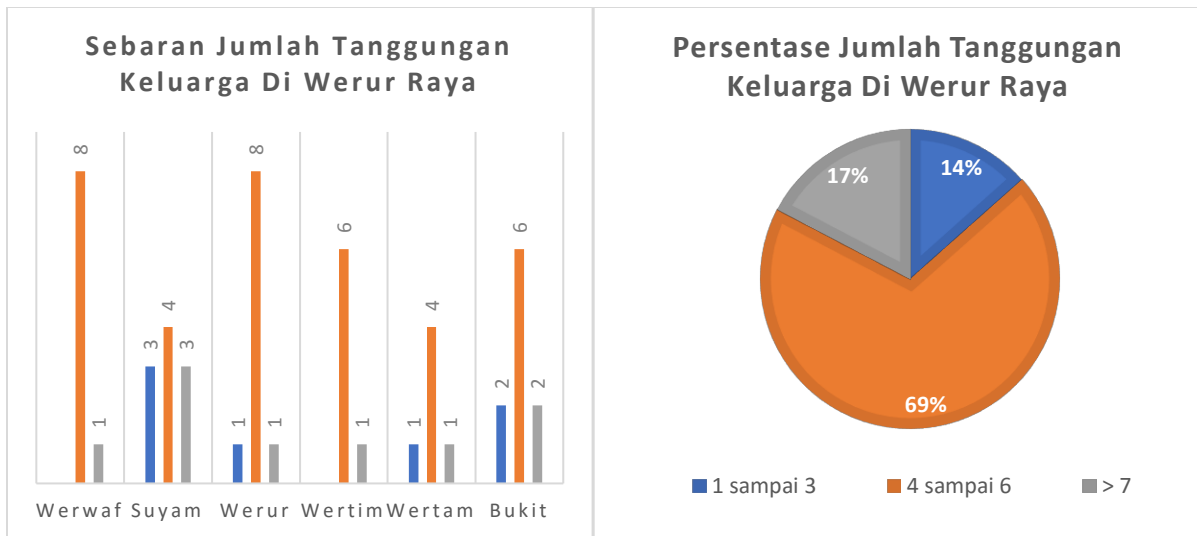


Gambar 49. Sebaran dan Persentase Tingkat Pendidikan Responden di Werur raya

Kualitas suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas dari sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu parameter di dalam mengukur indeks pembangunan manusia dalam suatu bangsa dan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat serta berperan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif.

### 3.2.3.5. Sebaran Jumlah Tanggungan Keluarga Responden

Jumlah tanggungan merupakan karakteristik yang berhubungan dalam peningkatan pendapatan, termasuk pengeluaran dan konsumsi pangan rumah tangga, semakin banyak anggota rumah tangga maka akan membutuhkan biaya yang lebih besar sehingga pengeluaran dan konsumsi juga semakin besar. Jumlah tanggungan keluarga yang tertinggi ada pada responden di Kampung Werwaf, Werur sebanyak 8 jiwa sedangkan kampung wertim serta Bukit jumlah 4 – 6 jiwa. Kampung-kampung lainnya ditemukan tanggungan sebanyak 4 jiwa (Gambar 50).



Gambar 50. Sebaran dan Persentase Tingkat Pendidikan Responden di Werur raya

Sebaran Persentase jumlah jiwa dalam RT sebanyak 4 – 6 jiwa sebanyak 69%, diatas 7 jiwa dalam satu RT ditemukan sebanyak 17% dan kurang dari 4 jiwa hanya 14%. Kehidupan sosial bersama atau ikatan kekeluargaan yang kuat dalam kehidupan sosial orang Papua menyebabkan dapat dijumpai dalam satu RT terdapat lebih dari 2 KK, Keluarga inti dan keluarga dari anak yang kawin masuk atau menetap bersama orang tua.

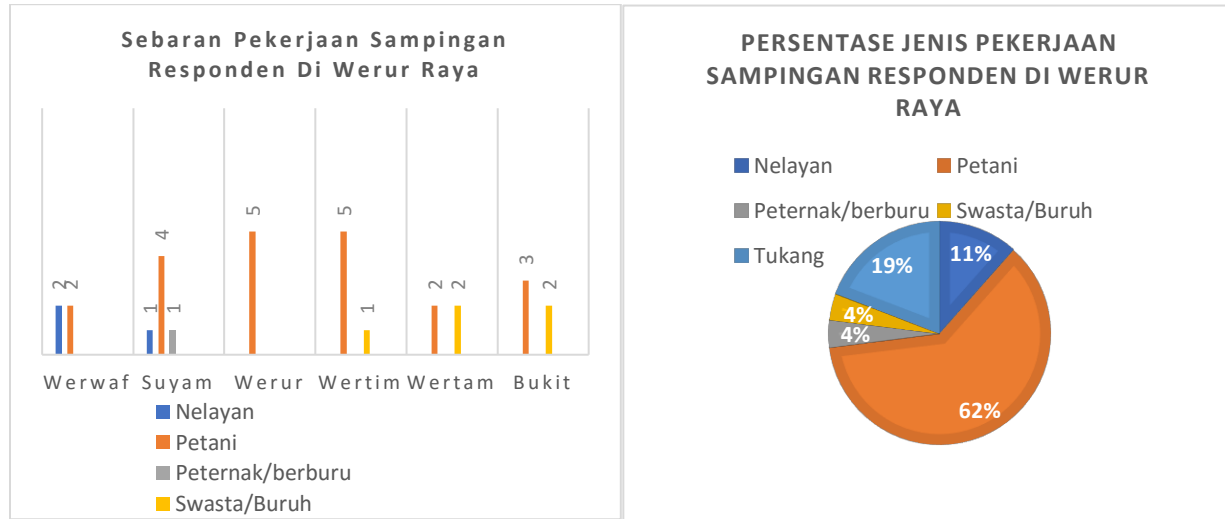
### 3.2.3.6. Sebaran Pekerjaan Utama Responden

Pekerjaan utama responden di wilayah Werur Raya adalah sebagai petani, ASN, Penginjil/pendeta, nelayan, Aparak Kampung dan Tukang atau Wirausaha. Tiga kampung dengan jumlah responden tertinggi sebagai Petani adalah kampung Werwaf, Bukit, Suyam dan Werur. Responden dengan mata pencaharian utamanya adalah nelayan terbanyak ditemukan di Kampung Wertam, dan tiga kampung berikutnya werwaf, suyam, dan bukit (Gambar 51)

Secara keseluruhan Pekerjaan Utama responden di wilayah werur raya adalah sebagai Petani dengan persentase tertinggi 45%, sebagai Aparat Kampung sebesar 21%, sebagai ASN sebanyak 13%, sebagai Nelayan 11% dan sebagai tukang atau wirausaha sebanyak 8% dan sebagai pelayan jemaat/pendeta sebanyak 2%.

Nelayan bukan menjadi jenis pekerjaan utama responden di Weruru Raya tetapi sebagian menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan pasar dikampung yang sangat terbatas untuk masyarakat menjual hasil tangkapan lautnya. Mereka menjual beberapa hasil tangkapannya ke kota Tembrauw dan bahkan lebih banyak di Kota Sorong.

Biaya transportasi yang cukup tinggi menyebabkan masyarakat tidak selalu melakukan usaha penjualan hasil perikanan ini.



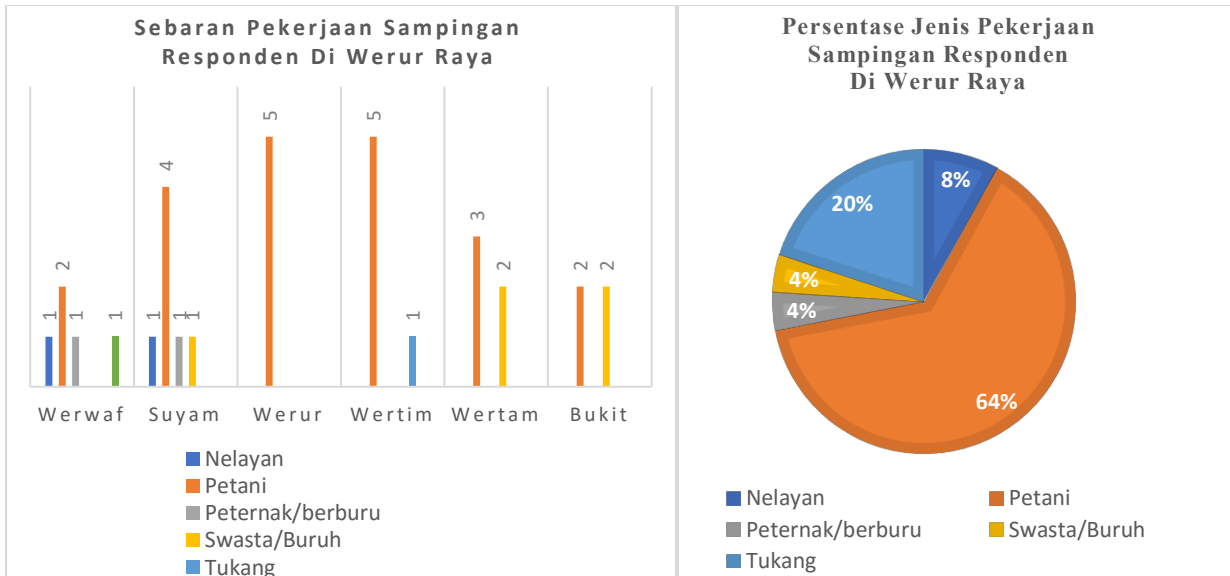
Gambar 51. Sebaran dan Persentase Pekerjaan Utama Responden di wilayah Werur Raya

### 3.2.3.7. Sebaran Jenis Pekerjaan Sampingan Responden

Jenis pekerjaan sampingan yang ada di werur raya adalah nelayan, petani, peternak/berburu, swasta/buruh dan tukang. Nelayan ditemukan dikampung werwaf, Suyam dan Wertim. Jenis pekerjaan sampingan terbanyak adalah petani. Yang menjadikan petani sebagai pekerjaan sampingan adalah mereka yang pekerjaan utamanya adalah ASN dan aparat kampung.

Pekerjaan sampingan sebagai nelayan tidak banyak dilakukan oleh masyarakat werur raya. Ditemukan pada tiga kampung dan dalam jumlah yang sangat kecil. Pekerjaan sebagai swasta/buruh lebih tinggi jumlahnya dari nelayan. Ditemukan di kampung wertam, Bukit dan Suyam. (Gambar 52).

Secara keseluruhan jenis pekerjaan sampingan responden di werur raya adalah petani 64%, tukang 20%, nelayan 8% dan 4% adalah swasta/buruh dan peternak/berburu. Jenis pekerjaan sebagai petani mendominasi persentase pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan responden di wilayah Werur Raya.

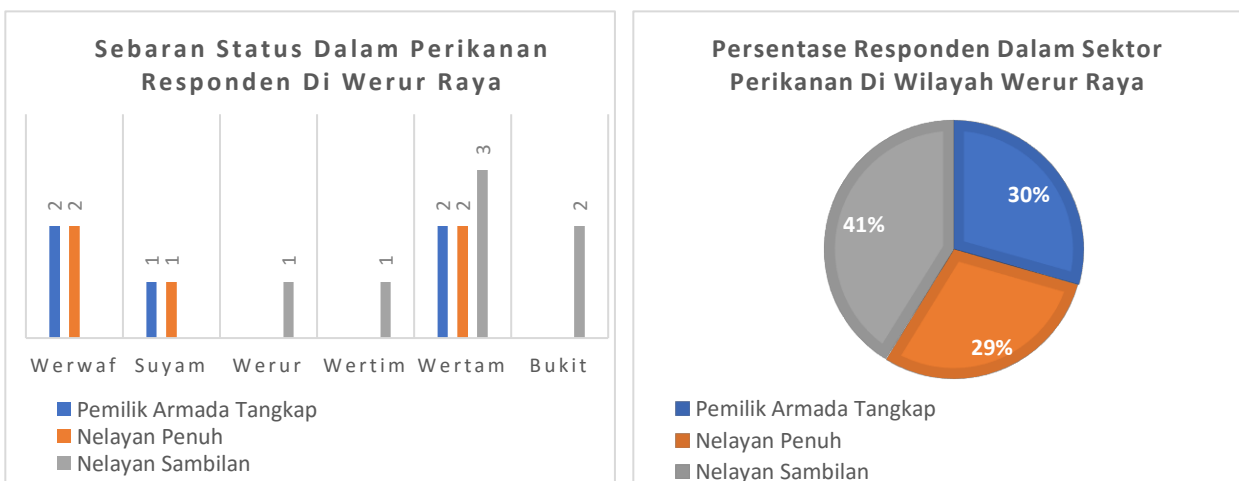


Gambar 52. Sebaran dan Persentase Jenis Pekerjaan Sampingan Responden di wilayah Werur Raya

### 3.2.3.8. Sebaran status responden dalam sektor perikanan

Mayoritas masyarakat di Werur Raya memiliki mata pencaharian utama sebagai petani, sehingga jika dilihat dari status mereka dalam sektor perikanan seperti status sebagai pemilik armada tangkap, nelayan penuh dan nelayan sambilan lebih rendah dibandingkan dengan responden atau masyarakat yang ada di Misool Utara.

Nelayan sambilan menjadi status tertinggi dari responden di wilayah werur raya yang ditemukan dikampung Wertam, Bukit, wertim dan werur. Nelayan penuh ditemukan di kampung wertam, werwaf dan Suyam. Pemilik armada melekat pada status responden sebagai nelayan penuh dan dijumpai pada kampung werwaf, suyam, dan wertam. (Gambar 53)



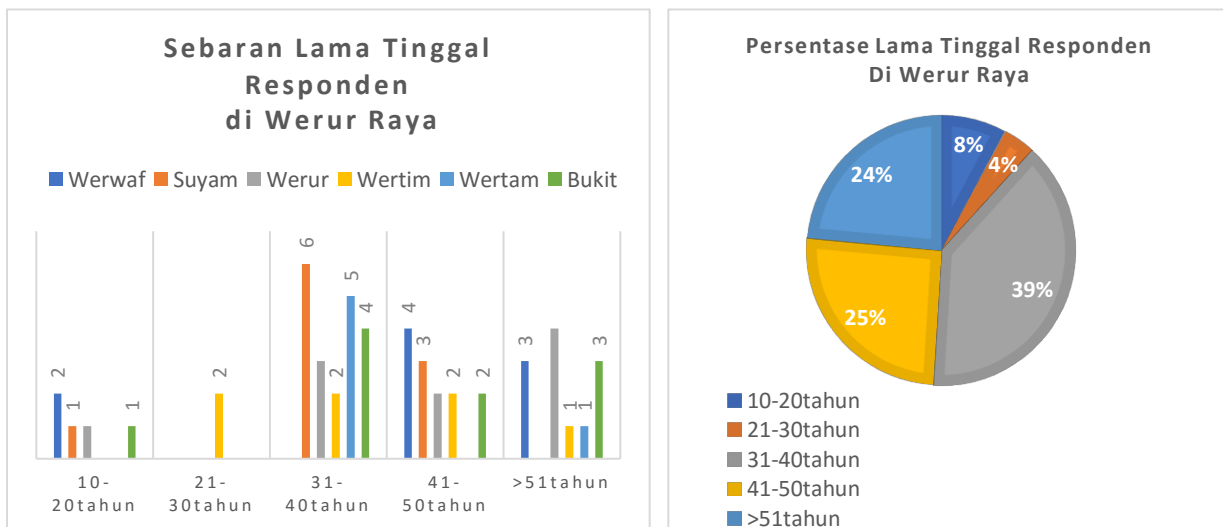
Gambar 53. Sebaran dan persentase status responden dalam sektor perikanan di wilayah Werur Raya



Persentase tertinggi status responden dalam sektor perikanan adalah nelayan sambilan sebanyak 41%, Pemilik armada tangkap sebanyak 30% dan nelayan penuh sebanyak 29%. Nelayan sambilan ini memiliki mata pencaharian utama sebagai petani. Melaut dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga atau saat ada permintaan (pasar) untuk beberapa hasil perikanan yang ada.

**3.2.3.9. Sebaran Lama Tinggal Responden di kampung**

Meihat grafik dibawah ini (Gambar 54) responden terkumpul pada kelompok tahun 31-50 tahun dan diatas dari 51 tahun. Sedangkan untuk kelompok tahun 10 – 30 terlihat responden menyebar. Di enam kampung pengamatan rata rata responden telah mendiami wilayah werur raya dalam kisaran waktu diatas 30 tahun dan diatas 51 tahun.



Gambar 54. Sebaran Lama Tinggal Responden di kampung Werur Raya

Persentase terbesar adalah mereka yang telah menetap selama 31-40 tahun (39%), 41-50 tahun (25%), diatas 51 tahun responden dijumpai sebanyak 24%, sedang yang menetap dikampung selama 10 – 30 tahun adalah sebesar 12%.

**3.3. Aspek Sosial ekonomi dan Budaya**

**3.3.1. Kepemilikan Hak Ulayat Atau Sistem Penguasaan Tanah**

Masyarakat hukum adat sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh

penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya dengan rasa solidaritas yang lebih besar diantara sesama anggota yang memandang bukan sebagai anggota masyarakat orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya (Hidayat, 2015).

Hak Ulayat berisikan wewenang untuk (Hidayat 2015)

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam), persewaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru) dan pemeliharaan tanah;
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada objek tertentu);
3. Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan)

Filosofi mendasar yang harus di pahami ketika kita berbicara mengenai tanah sebagai hak ulayat bagi orang Papua secara keseluruhan adalah bahwa berbicara tentang hubungan penduduk (masyarakat) dengan tanahnya. Dan hal ini berhubungan erat dengan hubungan kekerabatan, kekuasaan, kepemimpinan, sumber nafkah, ritus dan alam roh. Inilah yang disebut dengan hubungan hak ulayat yang bersifat „religio magis“. Hubungan ini menjadikan tanah dihayati sebagai suatu bagian integral dari kepribadian orang. (Deda, et al, 2014)

Hal ini membuat sehingga terdapat ikatan batin yang sangat kuat terhadap tanah, dan hal ini bukan berarti tanah dianggap suci tetapi hubungan batin manusianya dengan tanah itu yang suci. Dan ketika berbicara tentang „sistem penguasaan tanah“ yang dimaksud adalah pemilik dan pewaris tanah atau dengan kata lain mereka yang mempunyai hak atas tanah di wilayah tertentu.

Secara internal ada tata aturan yang mengatur ke dalam keluarga (marga) tentang pembagian hak dari penguasaan maupun pengelolaan tanah dan disana diakui bagian dari setiap anggota sesuai marga. Namun kekuasaan kepemimpinan atas tanah secara sosial religi berada pada orang tertentu yang berasal dari garis keturunan tertua. Jadi secara umum hak penguasaan ada dua yaitu hak persekutuan dan hak perseorangan. Hak perseorangan bersifat sekunder sedangkan hak persekutuan bersifat primer.

Bagi orang Papua hubungan atas tanah (adat/ulayat) bukan semata – mata hubungan ekonomi yang dapat memberi makan tetapi juga merupakan wilayah dalam pengertian ulayat dimana kejadian – kejadian menurut cerita – cerita rakyat pernah berlangsung. Dengan kata lain hubungan itu tidak bisa di lihat secara sepihak pada manusia sebagai *homo economicus* tetapi juga sebagai *homo humanicus* dan *homo culturalis* artinya tanah itu mempunyai hubungan yang suci secara batin dengan manusia.

Hak kepemilikan (hak ulayat) di Malaumkarta raya dimiliki oleh suku Moi kelin, marga paling banyak yaitu Kalami, Mobalen, Magablo, Su, Do, Malasamuk, Salamala, Sapisa, Pa, Mainolo, Ulimpa. Marga marga ini yang memiliki hak ulayat terhadap tanah dan laut. Hak kepemilikan di laut didasarkan pada hak atas tanah yang di miliki dan basisnya pada kampung/marga.

Suku yang memiliki hak kepemilikan di wilayah Misool Utara adalah suku Matbat sedangkan suku Biga dan Matlau adalah suku yang juga mendiami pulau Misool Utara dan memiliki hak dalam memanfaatkan sumberdaya (darat dan laut) secara bersama sama dengan suku Matbat. Hak kepemilikan atas tanah dan laut adalah hak yang melekat pada suku asli sebagai pewaris.

Dua suku besar yang berada dan hidup di wilayah pesisir utara TAMBRAUW adalah suku Abun dan suku Bikar (Biak Karon). Suku Bikar mendiami wilayah pesisir yang kemudian dikenal dengan nama werur raya sejak tahun 1820-an setelah terjadi konflik di daerah asal mereka yakni Biak. Interaksi yang terus menerus terhadap SD yang ada menyebabkan rasa memiliki atas tanah dan perairan juga melekat terhadap mereka. Berjalannya waktu suku Bikar berinteraksi dengan suku Abun yang merupakan Suku Asli TAMBRAUW yang mendiami wilayah daratan dan telah bersama sama hidup di wilayah pesisir.

Interaksi ini mendekatkan hubungan kedua suku ini. Orang Bikar mengajarkan pola hidup menetap, bertani dan melaut kepada orang Abun. Mereka juga mengajarkan bagaimana membuat peralatan dari besi seperti parang. Sebagaimana diketahui, orang Abun sebelumnya hidup dengan pola berburu dan meramu dan berpindah-pindah. Mereka belum mengenal hidup bercocok tanam apalagi melaut. Alat berburu yang digunakan pun masih sederhana berupa beliung dari batu dan sejenisnya. Tingkat interaksi paling erat antara kedua suku ini ditandai dengan adanya beberapa anak angkat yang diambil oleh orang Bikar dari suku Abun

Suku Bikar telah ditetapkan menjadi salah satu suku asli yang mendiami Kabupaten Tambrauw dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor No. 6/37/2018 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Tambrauw. Selanjutnya pengakuan tdan perlindungan MHA Werur Distrik Bikar dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut berbasis Hukum Adat Kabupaten Tambrauw.

Pada umumnya di wilayah lingkaran hukum adat Papua di kenal dua sistem penguasaan/ kepemilikan tanah yaitu kepemilikan komunal dan kepemilikan individu. Kepemilikan komunal ini masih dapat dibedakan lagi menjadi kepemilikan berbasis marga kecil yaitu *clan* atau marga tertentu, dan kepemilikan berbasis marga besar yaitu kepemilikan berdasarkan kampung dalam pengertian suku mana sebagai penduduk asli kampung. Sedangkan kepemilikan individu bukan perorangan tetapi keturunan.

### **3.3.2. Kelembagaan dan Modal Sosial**

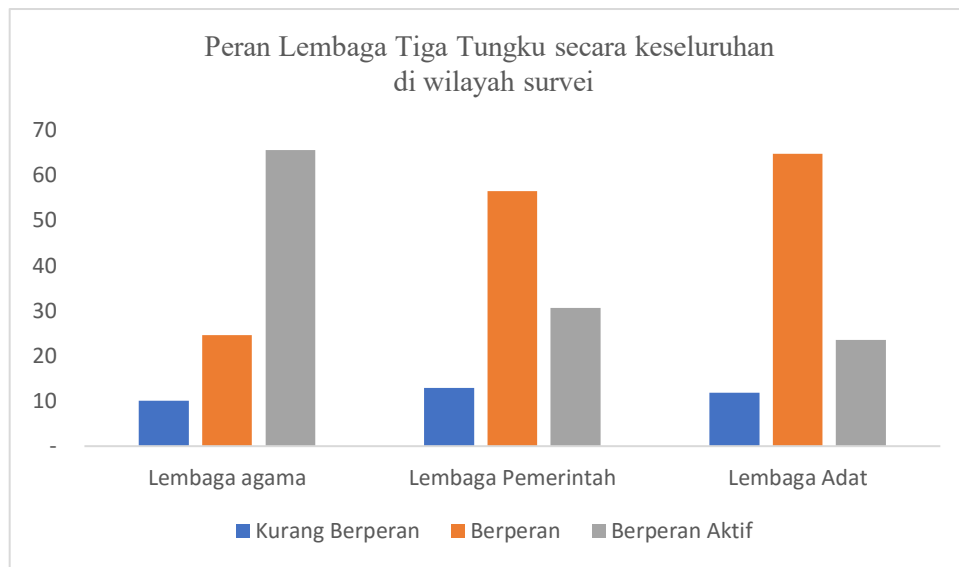
Konsep modal sosial (*social capital*) menjadi salah satu komponen penting untuk menunjang model pembangunan manusia, karena dalam model ini manusia ditempatkan sebagai subjek penting yang menentukan arah penyelenggaraan pembangunan. Partisipasi dan kapasitas mengorganisasikan diri menjadi penting agar masyarakat dapat berperan dalam model pembangunan manusia.

Keberadaan modal sosial berupa nilai, jejaring kerja (*network*) dan saling percaya (*mutual trust*) di masyarakat diharapkan dapat memperluas akses terhadap sumber-sumber daya kehidupan. Keberadaan modal sosial ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, kesejahteraan, termasuk juga masalah kesehatan. Modal sosial dalam bentuk nilai (*norm*) yaitu gotong-royong dan kebersamaan mengatasi masalah, memunculkan ide yang berkembang kemudian membentuk dan mempengaruhi pengembangan kelembagaan

Pada Gambar 50 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan lembaga agama sangat berperan aktif dalam masyarakat pada ketiga distrik pengamatan dibandingkan dengan peran pemerintah dan lembaga adat yang hanya berperan sedang (50% - 100%). Pada kampung - kampung pengamatan, terdapat tiga lembaga penting yang sangat berpengaruh dalam masyarakat yaitu Lembaga Pemerintah, Lembaga Adat dan Lembaga Keagamaan. Tiga lembaga ini dikenal dengan

istilah tiga tungku yang turut berperan dalam mengatur warga kampung dalam berbagai aspek kehidupan mereka seperti aspek sosial, ekonomi, budaya dan adat serta politik.

Tiga Tungku merupakan salah satu gaya kepemimpinan di wilayah Papua. Peranan hubungan dan pengaruh tingkat interaksi antara tokoh pemerintah, tokoh adat dan tokoh agama sebagai faktor determinan yang terkadang dianggap bersifat kreatif. Konsep ini sangat mendukung gaya kepemimpinan dalam sebuah kegiatan atau program, termasuk program pemberdayaan masyarakat di kampung – kampung. <http://penarafflesia.com/peran-tiga-tungku/>



Gambar 55. Peran Lembaga Tiga Tungku di wilayah Survei

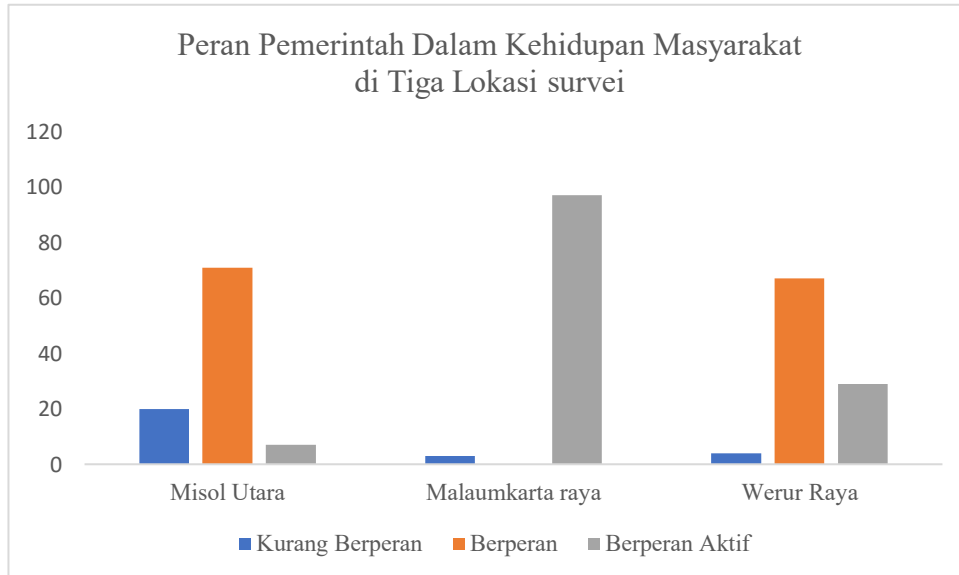
Tiga tungku merupakan bentuk pemerintahan kampung yang mengintegrasikan tiga unsur yaitu unsur pemerintahan, adat dan agama. Bentuk pemerintahan tiga tungku merupakan bentuk pemerintahan kampung yang ideal bagi masyarakat Papua dan Kota Jayapura khususnya. Masing-masing unsur memiliki fungsi dan peran yang berbeda yang dibutuhkan oleh masyarakat kampung.

Fungsi pemerintahan mengatur sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan kampung agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Unsur adat memelihara nilai-nilai budaya yang berkembang dimasyarakat kampung. Unsur agama memberikan pemahaman tentang kerohanian bagi masyarakat kampung. Pengintegrasian ketiga unsur yang dinamakan tiga tungku diharapkan dapat memberikan stimuli bagi kemajuan masyarakat kampung.

Peran tiga tungku dalam bentuk pemerintahan ini hanya dapat kita temukan di wilayah Papua saja. Peran tiga tungku tidak dapat dikatakan hanya terpaku dalam masyarakat hukum adat dan hak ulayat di wilayah Papua. Hal ini dapat dilihat secara nyata dalam bentuk pemerintahan di tingkat kampung yang merupakan salah satu gaya kepemimpinan. Bahkan menurut Boclaars (1998), tradisi masyarakat Papua dalam kehidupan sehari-hari selalu mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, keselarasan dan keseimbangan antara tujuan ekonomi, pelestarian lingkungan dan budaya, estetika dan spiritual.

### 3.3.3. Peran Lembaga Pemerintah

Tugas utama pemerintah ditengah masyarakat adalah memfasilitasi masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan proses pembangunan. Sedangkan masyarakat memahami posisi dan perannya dalam pembangunan desa. Masyarakat telah menyadari arti penting keterlibatan mereka untuk menentukan hingga mengawasi proses pembangunan. Secara fakta di setiap kampung memiliki struktur pemerintahan kampung yang tertata dengan baik. Namun dalam implementasinya ada yang berperan aktif, ada yang berperan dana dal kurang berperan atau bahkan tidak aktif sama sekali (Gambar 56)



Gambar 56. Peran Pemerintah dalam kehidupan masyarakat di Lokasi Survei

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa, peran pemerintah yang sangat tinggi berada pada Distrik Malaumkarta Raya yaitu sebesar 97% dimana pemerintah kampung berkoordinasi dengan baik dengan kelompok pemuda pemerhati kegiatan konservasi serta

lembaga lainnya. Sedangkan pada distrik lainnya, peran pemerintah cukup baik 70%. Peran aktif pemerintah didalam mendukung kehidupan masyarakat secara maksimal sangat ditentukan juga oleh factor kerjasama masyarakat dan pemerintah.

Kerjasama yang terjadi bersifat mutualistik dimana pihak yang terlibat saling memahami posisi dan perannya dalam pembangunan desa. Pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan. Masyarakat berperan dalam menyumbangkan pemikiran, tenaga, hingga harta benda untuk demi keberhasilan pembangunan (Prasojo et al, 2015)..

Faktor pendukung kerjasama pemerintah-masyarakat adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah desa terhadap masyarakat manusiawi, dan masyarakat sendiri telah memahami dengan baik posisi dan perannya dalam pembangunan. Selain itu, faktor penghambatnya adalah minimnya kesadaran masyarakat pada kebersihan lingkungan serta masih adanya anggapan pemerintah bahwa masyarakat adalah bawahan dan objek dalam pengawasan pembangunan (Prasojo et al, 2015).

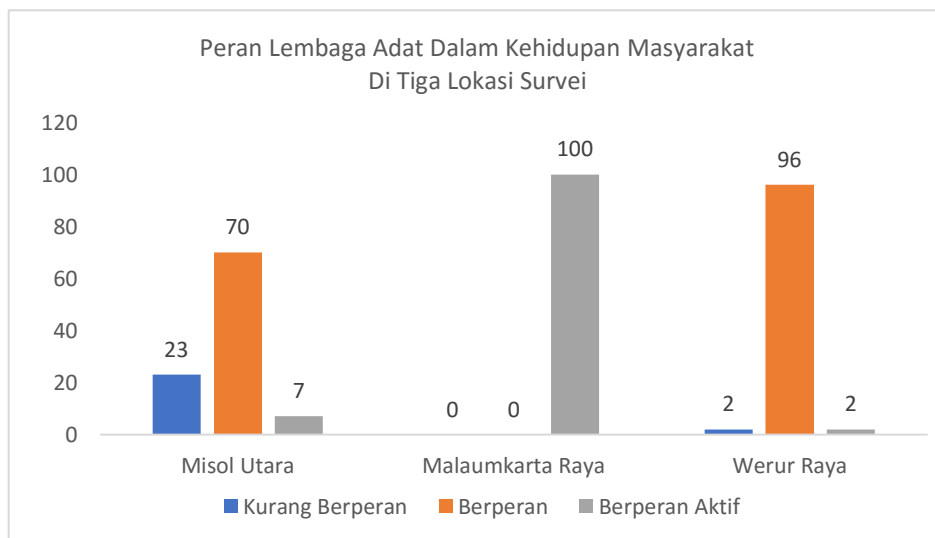
#### **3.3.4. Peran Lembaga Adat**

Pada daerah yang praktek adatnya masih sangat kuat, seperti di Papua maka peran lembaga adat sangat menentukan jalannya kehidupan sosial dalam masyarakat berdasarkan aturan adat dalam sebuah komunitas adat. Lembaga Adat mempunyai tugas membina, melestarikan dan melindungi budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Berdasarkan (Gambar 57) dapat dilihat bahwa, peran Lembaga adat yang sangat tinggi berada pada Distrik Malaumkarta Raya yaitu sebesar 100% dimana struktur lembaga adat di Malaumkarta Raya terstruktur mulai dari tingkat kampung sampai distrik serta kabupaten dan juga sangat berperan dalam berbagai keputusan di kampung.

Kelembagaan Adat di Malaumkarta Raya mendukung Konservasi karena salah satu wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Papua Barat bahkan di seluruh Papua Malaumkarta yang sudah resmi punya Perbub terkait dengan Sasi Egek, bagaimana adat itu berperan dalam mendukung kegiatan konservasi.

Peran lembaga adat di Werur dan di Misool Utara juga berperan dalam kehidupan masyarakat seperti adanya persoalan dalam masalah adat seperti perkawinan, mas kawin atau sangsi adat atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam komunitas adat tersebut akan diselesaikan dengan aturan adat yang berlaku dalam komunitas tersebut. Di daerah Misool Utara sebanyak 25% responden menilai bahwa lembaga adat kurang berperan. Penilaian secara individu terhadap peran tokoh adat mendapatkan penilaian yang berbeda-beda antara masyarakat yang ada di kampung-kampung. Penilaian tersebut dapat dibangun dari peran tokoh adat yang ada di kampung.



Gambar 57. Peran Dewan Adat dalam kehidupan masyarakat di Lokasi Survei

Tokoh adat memiliki beberapa peran dalam membangun kehidupan masyarakat yaitu (1). Untuk mencabut akar segala bentuk konflik politik dari kampung, (2). Menghapus segmentasi masyarakat kampung yang bersumber pada pengelompokan politik dari kehidupan masyarakat kampung, (3). Menyelaraskan satu aturan berkenaan dengan mengatur, mengurus, memelihara, dan menjaga keamanan (4). Menetapkan aturan menurut kampung sesuai dengan adat yang berlaku (Jouwe, et all, 2011).

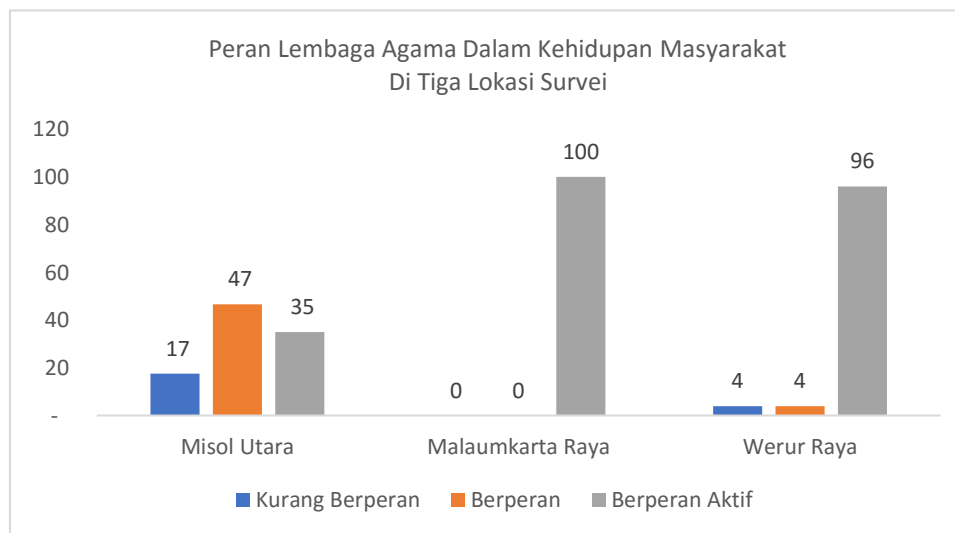
Masalah yang diselesaikan secara adat di Malaumkarta raya yaitu mengenai masalah di dalam keluarga atau salah paham masalah tanah, diselesaikan di dewan adat kampung, Jadi kalau masalah di malaumkarta Raya maka masalah harus diselesaikan di Malaumkarta Raya, kecuali masalahnya lebih besar maka diselesaikan di dewan adat distrik makbon karena lembaga adat distrik membawahi semua lembaga adat yang ada di kampung. Jadi kalau ada masalah maka



dewan adat akan bicara di hutan untuk diputuskan yang harus dibayar (jika ada denda/sangsi), dan orang yang punya masalah harus bayar di hutan dulu ( denda menyangkut adat) dan setelah itu pulang ke kampung bayar di kampung lagi. Kasus ini hanya diberlakukan kepada masyarakat yang memegang adat atau sebagai pemegang struktur adat, misalnya yang duduk di dalam lembaga adat (orang adat), kedua orang tersebut ke hutan dan yang kena masalah dapat menebang potong sebagai bentuk amarah. Masalahnya diselesaikan dengan membayar menggunakan kain tenun kain tenun seharga 10 barang. Tradisi ini masih dilakukan sampai sekarang di wilayah malaumkarta raya.

### 3.3.5. Peran Lembaga Agama

Peran lembaga agama sangat tinggi di wilayah Malaumkarta Raya yaitu sebesar 100% (Gambar 58) Hal ini dapat dilihat dari peran gereja dalam memfasilitasi sasi laut, pembangunan gereja di kampung yang dibangun dengan dana dari hasil sasi sumber daya laut seperti ikan, udang, bia lola dan beberapa produk lainnya. Tujuan sasi laut di Malaumkarta dilakukan untuk kepentingan pembangunan Gereja atau kebutuhan gereja yang telah disepakati bersama sama dalam sidang jemaat atau rapat gereja.



Gambar 58. Peran Lembaga Keagamaan Dalam Kehidupan Masyarakat Di Lokasi Survei

Sosialisasi tentang konservasi yang digereka oleh kelompok anak Muda Malaumkarta didukung penuh oleh pihak gereja dalam program sosialisasi. Masyarakat menerima dengan hati terbuka saat pihak gereja ikut berperan penuh dalam membantu menjelaskan manfaat konservasi

bagi masyarakat. Hal yang sama di temukan di Kampung Salafen Distrik Misool Utara, pemimpin gereja sangat aktif dalam menyampaikan seruan pentingnya konservasi bagi masyarakat. Menggunakan mimbar gereja untuk menyampaikan seruan pentingnya manusia bersahabat dengan alam.

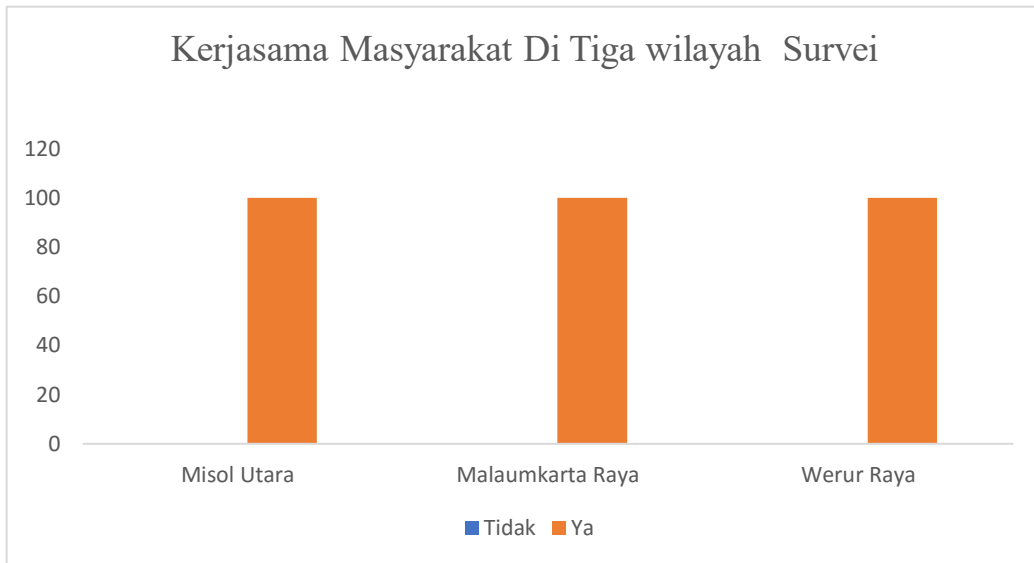
Keterlibatan pihak gereja telah dilakukan pada wilayah-wilayah konservasi perairan di Papua Barat, namun perlu terus di perkuat peran kelembagaan gereja ini. Peran lembaga Gereja di wilayah Werur Raya adalah berperan aktif dimana pemimpin gereja aktif dalam memberikan pendapat saat wawancara dilakukan dan ikut melakukan sosialisasi pentingnya konservasi atau praktek sasi juga melalui mimbar gereja.

### **3.3.6. Kerjasama Masyarakat di wilayah survei**

Masyarakat sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya tidak terlepas dari nilai-nilai yang menjadi tolok ukur pelaksanaan sebuah kegiatan dalam kelompok masyarakat, melalui aturan-aturan yang disepakati bersama sesuai dengan kondisi lingkungan setempat, melalui nilai perilaku dalam masyarakat dapat diatur dan akan mendapatkan sanksi ketika aturan tersebut dilanggar (Rolitia, 2012).

Sistem nilai dalam masyarakat tentunya akan mempengaruhi setiap kegiatan yang dilaksanakan, seperti pada kegiatan gotong royong terdapat banyak nilai yang terkandung didalamnya, dan masyarakat dengan sadar akan dapat memaknai setiap nilai yang ada dari kegiatan gotong royong yang dilaksanakan. Pada 15 kampung pengamatan di 3 Distrik hasil wawancara menunjukkan bahwa semua masyarakat menyepakati bahwa kehidupan sosial sangat bergantung pada bantuan orang lain (Gambar 59).

Sebagai masyarakat adat, masyarakat di kampung kampung memaknai gotong royong sebagai salah satu pedoman hidup dimana setiap aktivitas dalam masyarakat tidak akan terlepas dari partisipasi dan bantuan orang lain. Diantara banyaknya kegiatan gotong royong atau kerjasama nilai kebersamaan menjadi nilai yang akan selalu ada pada setiap kegiatan, karena masyarakat paham bahwa adanya gotong royong kebersamaan dirasakan bahkan kebersamaan tersebut tetap dapat dirasakan ketika kegiatan sudah selesai.



Gambar 59. Kerjasama masyarakat di Tiga Distrik wilayah Survei

Berdasarkan Gambar 59 dapat dilihat bahwa tingkat kerjasama masyarakat di Distrik Misool Utara, Malaumkarta Raya dan Werur Raya sangat tinggi yaitu 100%. Hal ini dapat dilihat bahwa beberapa kampung telah membuat peraturan kampung yang menetapkan hari jumat sebagai hari kerja bakti di tingkat kampung. Kerjasama juga terlihat saat merayakan Hari besar keagamaan dan pembangunan fasilitas dalam kampung.

### 3.3.7. Kecukupan Pangan dalam Keluarga

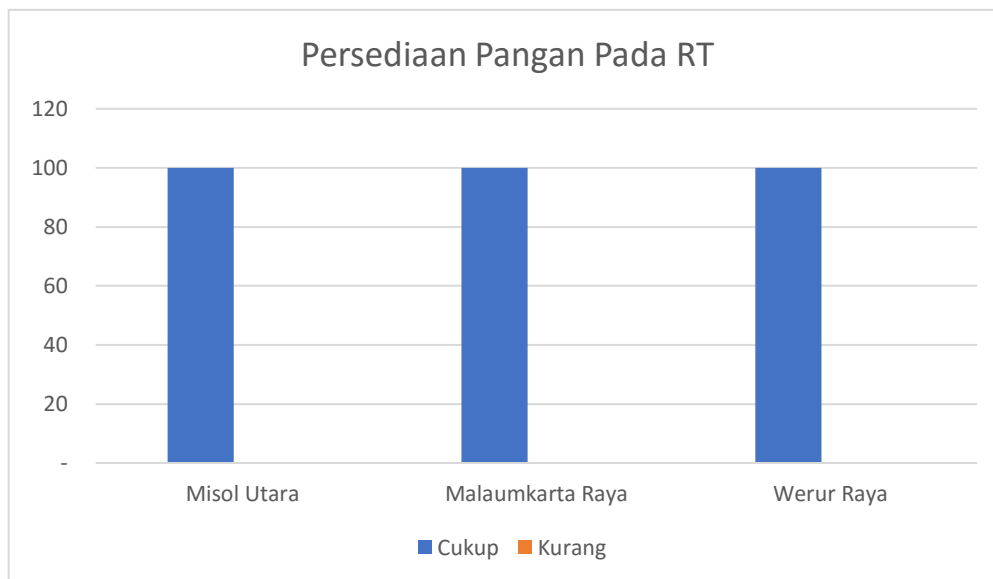
Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Pada rumah tangga miskin, pengeluaran pangan akan lebih besar dari pada pengeluaran non pangan sehingga hal ini akan berpengaruh pada pemenuhan gizi dalam penentuan ketahanan pangan rumah tangga. Pemenuhan gizi yang diperoleh dari pangan yang dikonsumsi akan menentukan tingkat konsumsi. Semakin tinggi nilai gizi pangan berupa energi yang dikonsumsi, maka tingkat konsumsi energi juga akan meningkat. Demikian juga halnya pada konsumsi protein.

Suatu desa belum dikatakan mandiri jika masih terdapat masalah ketahanan yaitu tercermin dari belum adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan (Purwaningsih et al.,

2008). Di Indonesia, sumber energi yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah beras, sedangkan energi non-beras banyak berasal dari singkong (Yudaningrum, 2011). Perbedaan utama konsumsi pangan terdapat pada tingkat konsumsi masyarakat pedesaan dan perkotaan.

Hasil Susenas tahun 2011 menunjukkan bahwa konsumsi beras masyarakat pedesaan lebih tinggi dibandingkan konsumsi beras pada masyarakat perkotaan. Pada tingkat rumah tangga, perkembangan tingkat konsumsi pangan juga merefleksikan tingkat pendapatan atau daya beli rumah tangga. Dua parameter yang dipakai dalam menilai kecukupan pangan bagi Rumah Tangga di 15 kampung pengamatan adalah variabel persediaan pangan dan kekurangan makanan (Gambar 60)

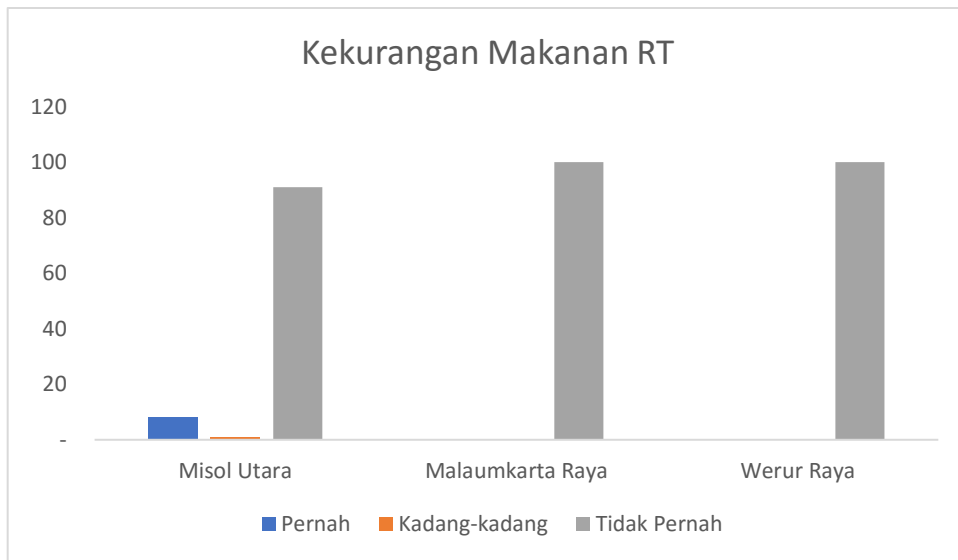


Gambar 60. Persentase Persediaan Pangan Pada RT

Gambar 60 menunjukkan Persediaan Pangan di Distrik Misol Utara, Malaumkarta Raya dan Werur Raya 100% mencukupi kebutuhan pangan dari RT pada semua distrik pengamatan. Persediaan pangan yang cukup pada semua kampung pengamatan disebabkan karena terdapat 2 alternatif sumber pangan yaitu dari laut maupun darat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pangan pokok beras yang dibeli oleh hampir sebagian besar RT, sedangkan pangan pokok lainnya seperti Pisang, Ubi-ubian dan sayuran dapat diperoleh secara langsung dari kebun dan laut dan hanya beberapa RT yang berada di Kampung Atkari dan Waigama (Distrik Misol Utara) yang merupakan masyarakat pendatang, harus membeli

pangan seperti sayuran dan Ubi-ubian karena mereka tidak memiliki kebun seperti halnya RT yang adalah Orang Asli Papua (OAP).



Gambar 61. Persentase Kekurangan Pangan Pada RT

Gambar 61 menunjukkan bahwa 91% RT menjawab tidak pernah mengalami kekurangan makanan dan 1% RT mengaku terkadang terjadi kekurangan makanan dan 8% RT mengaku mereka pernah mengalami kekurangan makanan. Berdasarkan hasil penelitian, kasus kekurangan makanan sangat jarang terjadi dan hanya terjadi pada situasi tertentu (Pada musim ombak dan hasil kebun yang tidak begitu baik). Kasus kekurangan makanan hanya sedikit terjadi di Kampung Aduwey yang merupakan kampung terjauh dari ibukota Distrik Misol Utara.

### 3.4. Distribusi Pendapatan Masyarakat di wilayah survei

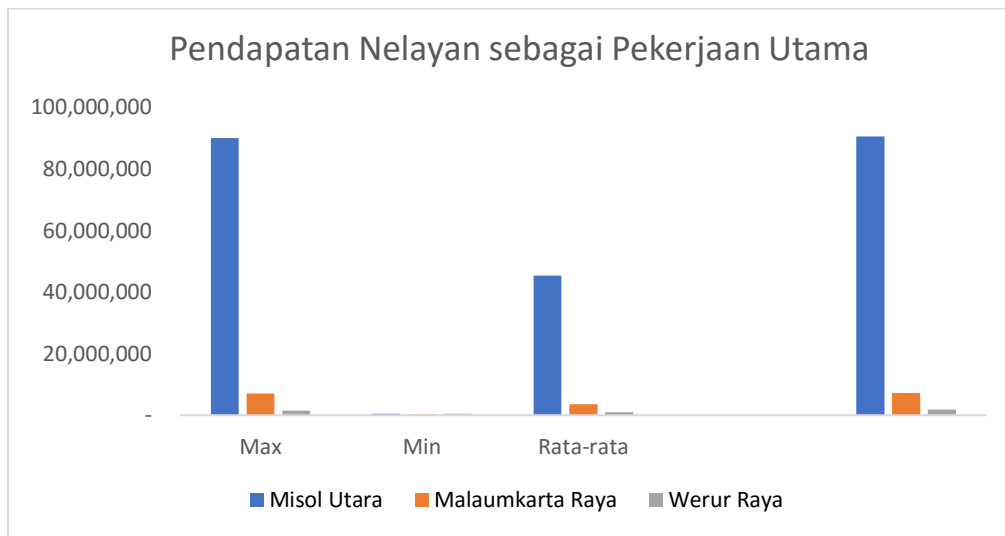
Jenis mata pencaharian yang banyak dimiliki oleh masyarakat di tiga wilayah survei adalah sebagai nelayan, petani, peternakan, perkebunan, pengumpul ikan dan pengumpul kopra. Dari beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat dan menjadi sumber penghidupan, yang kemudian dikelompokkan kedalam kelompok pendapatan dari kegiatan sebagai Nelayan dan sektor perikanan serta pendapatan dari kegiatan non nelayan atau non sektor perikanan.

#### 3.4.1. Pendapatan utama dan sampingan dari pekerjaan sebagai nelayan

Masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dan berpenghasilan sebagai nelayan merupakan sala satu dari kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas usaha dengan

mendapat penghasilan bersumber dari kegiatan nelayan itu sendiri. Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan.

Tingkat kesejahteraan nelayan sangat di tentukan oleh hasil tangkapannya. Banyaknya tangkapan tercermin pula besarnya pendapatan yang di terima dan pendapatan tersebut sebagian besar untuk keperluan komsumsi keluarga. Para nelayan melakukan pekerjaannya dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan demi kebutuhan hidup. Untuk pelaksanaannya di perlukan beberapa perlengkapan dan di pengaruhi pula oleh banyak faktor guna mendukung keberhasilan kegiatan (Indara, et all, 2017). Pendapatan nelayan sebagai pekerjaan utama tertinggi di temukan di Misool Utara (Gambar 62)



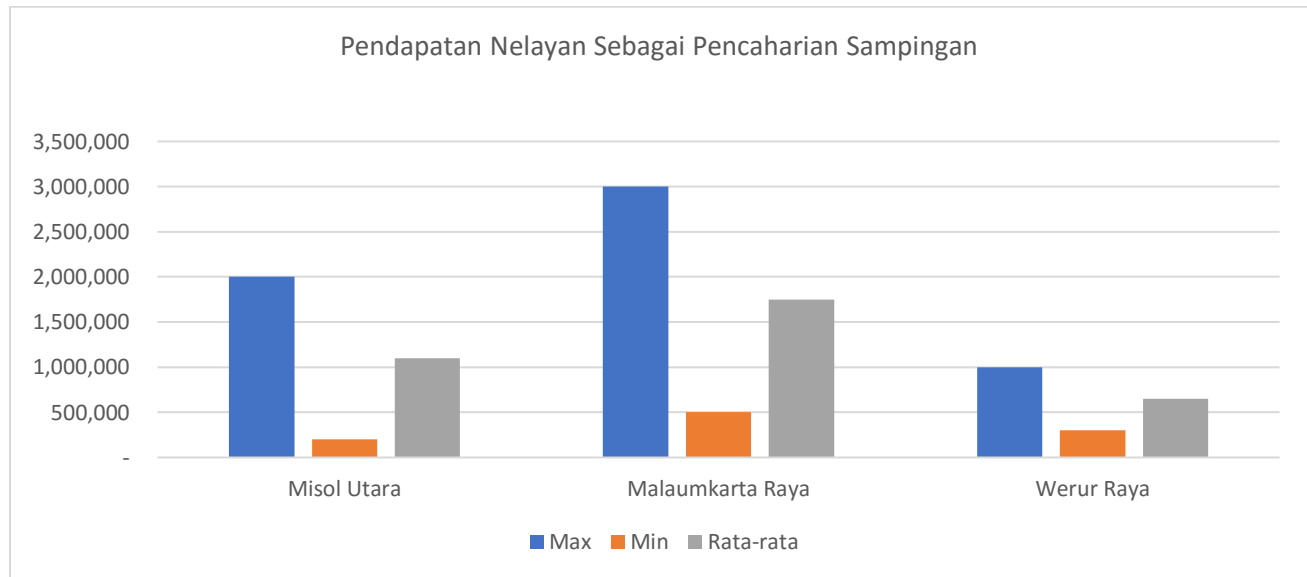
Gambar 62. Pendapatan nelayan sebagai pekerjaan utama masyarakat di wilayah survei

Pendapatan Nelayan sebagai pekerjaan utama tertinggi di Distrik Misool Utara, dimana maksimum Rp. 9.000.000 Minimum Rp. 500.000 dan rata rata Rp. 4.500.000. Kegiatan nelayan bersumber dari bagan ikan teri dan nelayan pancing ikan dasar, dan pelagis yang ada di perairan Misool Utara. Selain menangkap ikan masyarakat juga mengumpulkan teripang dan masih ada praktek jual sirip hiu. Praktek ini masih ditemukan beberapa responden di kampung Solal Misool Utara.

Nelayan dikelompokkan kedalam dua jenis yaitu nelayan penuh dan nelayan separuh waktu atau sampingan. Nelayan penuh adalah Nelayan penuh atau nelayan asli, yaitu nelayan baik yang mempunyai alat tangkap atau buruh yang berusaha semata-mata pada sektor perikanan tanpa

memiliki usaha yang lain. Sedangkan nelayan Sambilan tipe ini merupakan nelayan yang menjadikan nelayan sebagai profesi tambahan, tetapi memiliki pekerjaan lainnya untuk profesi tetap.

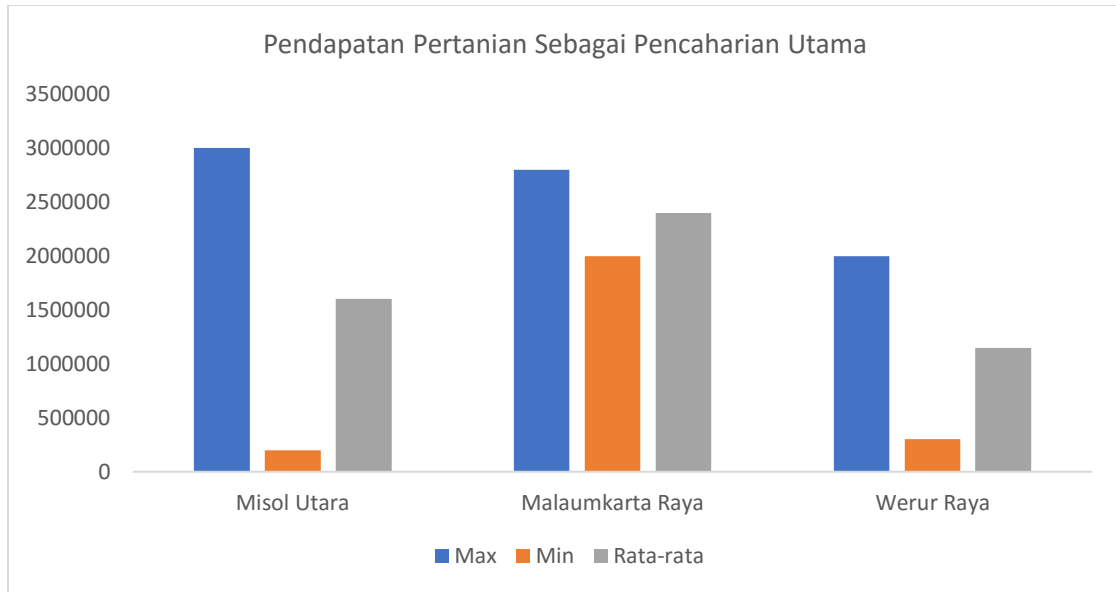
Pendapatan nelayan sebagai nelayan sampingan terlihat di lokasi survei ini adalah wilayah Malaumkarta tertinggi dengan pendapatan Maksimum Rp. 3,000,000 Minimum Rp. 500.000 dan rata rata Rp. 1.750.000. Misool Utara pendapatan Maks Rp. 2.000.000 Minimum Rp. 200.000 Rata Rata : Rp. 1.100.000. Wilayah Werur raya pendapatan nelayan sampingan maksimum Rp. 1.000.000. Minimum Rp, 300.000 dan rata rata Rp. 650.000. (Gambar 63)



Gambar 63. Pendapatan nelayan sebagai pekerjaan sampingan masyarakat di wilayah survei

### 3.4.2. Pendapatan utama dan sampingan dari pekerjaan sebagai petani

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Pendapatan petani sebagai mata pencaharian utama tertinggi di Distrik Misool Utara yakni Maksimum Rp. 3.000.000 Minimum Rp 200.000 dan Rata Rata Rp. 1.150.000 (Gambar 58)

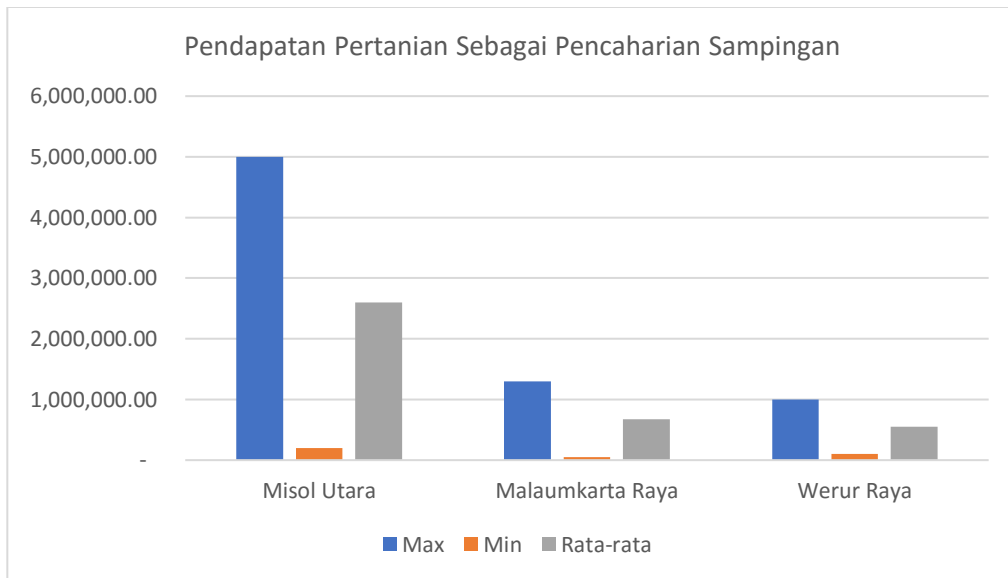


Gambar 64. Pendapatan Pertanian Sebagai Pencaharian Utama masyarakat di wilayah survei

Pertanian sebagai mata pencaharian sampingan tertinggi di kampung Misool Utara dan Malaumkarta Raya serta werur Raya. Pendapatan tertinggi di Misool Utara Rp. 3.000.000 Minimum Rp. 200.000 Dan rata rata Rp. 1.600.000. sedangkan di wilayah Malaumkarta raya Maksimum Rp. 2.800.000 Minimum Rp. 2.000.000 Dan rata rata Rp. 2.400.000. Pendapatan terendah dari kegiatan utama sebagai petani adalah di wilayah werur raya Maksimum Rp. 2.000.000 Minimum Rp. 300.000 Dan rata rata Rp. 1.150.000.

Pertanian sebagai mata pencaharian sampingan tertinggi pendapatan di temukan di wilayah Misool Utara Maksimum Rp. 5.000.000 Minimum Rp. 200.000 Dan rata rata Rp. 2.600.000. pendapatan petani sebagai pekerjaan sampingan di Malaumkarta Raya Maksimum Rp. 1.300.000 Minimum Rp. 50.000 dan Rata rata dan 675.000 (Gambar 64). Sumber mata pencaharian sebagai petani diperoleh dari aktivitas berkebun pisang, sayur sayuran, singkong serta ubi ubian dan buah.





Gambar 65. Pendapatan Pertanian Sebagai Pencaharian sampingan masyarakat di wilayah survei

### 3.4.3. Pendapatan di sektor perkebunan

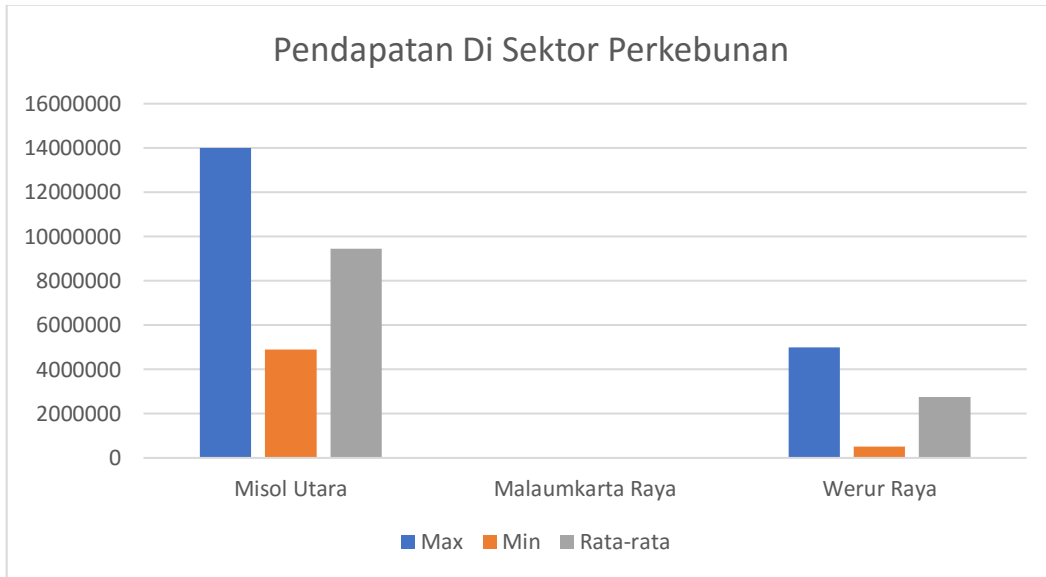
Dari (gambar 65) pendapatan di sektor perkebunan hanya di temukan di dua wilayah survei yakni Misool Utara dan Werur Raya, sedangkan di malaumkarta Raya sektor perkebunan tidak ditemukan sebagai sumber pendapatan masyarakat. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai; mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut.

Sebaran pendapatan perkebunan bersumber dari usaha kopra dengan sebaran pendapatan yang beragam di antara dua wilayah. Pendapatan tertinggi di temukan di Distrik Misool Utara maksimum Rp. 14.000.000 minimum Rp. 4.900.000 dan Rata Rata Rp.9.450.000. Di Werur Raya Pendapatan Tertinggi Rp.5.000.000, Minimum Rp. 500.000 Rata Rata Rp. 2.750.000.

### 3.4.4. Pendapatan di sektor perkebunan

Pendapatan di sektor perkebunan diperoleh dari kegiatan mengumpulkan kopra. Kegiatan pengumpulan kopra dilakukan oleh masyarakat dikarenakan ada penadah di kampung dan usaha ini dilakukan karena masyarakat langsung mendapatkan uang saat menjual kopra pada pengumpul. Pendapatan Maksimum dari kegiatan perkebunan di Distrik Misool Utara Rp. 14.000.000 Minimum Rp. 4.900.000 dan Rata rata Rp.9.450.000. sedangkan distribusi pendapatan di wilayah Werur Raya maksimum Rp. 5.000.000, Minimum Rp. 500.000 dan Rata-Rata Rp. 2.750.000. (gambar 66).

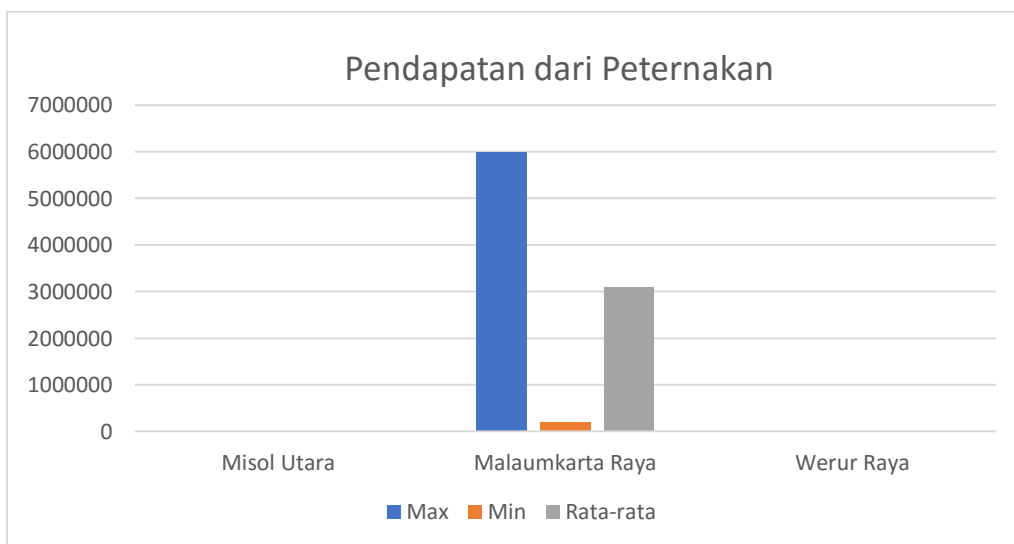
Produksi sangat bergantung kepada ketersediaan Pasar yang ada dikampung. Di wilayah werur raya masyarakat melakukan usaha kopra namun penadah tidak ada di kampung sehingga mereka harus menjual kepada penadah yang tinggal diluar kampung.



Gambar 66. Pendapatan sektor perkebunan masyarakat di wilayah survei

### 3.4.5. Pendapatan di sektor Peternakan

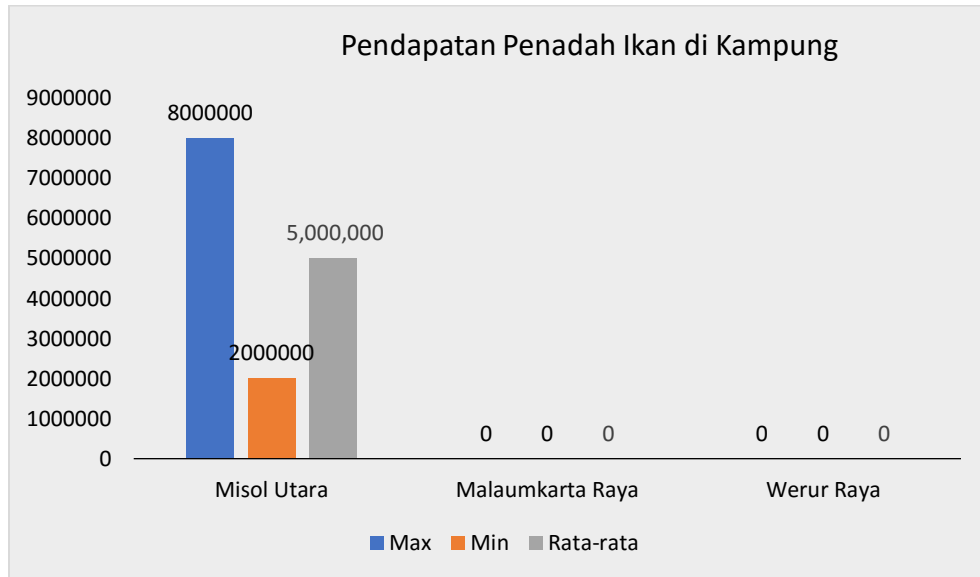
Jenis pekerjaan masyarakat sebagai peternak, pemilik ternak ditemukan di wilayah Malaumkarta raya. Pendapatan Maksimum Rp. 6.000.000, Minimum Rp.200.000 dan Rata Rata Rp. 310.000. Jenis hewan peliharaan yang ada adalah sapi dan ayam, namun ternak ayam belum intensif hanya sifatnya terbuka atau mengisi waktu dalam pemeliharaan ternak.



Gambar 67. Pendapatan dari Peternakan masyarakat di wilayah survei

### 3.4.6. Pendapatan Penadah Ikan di kampung

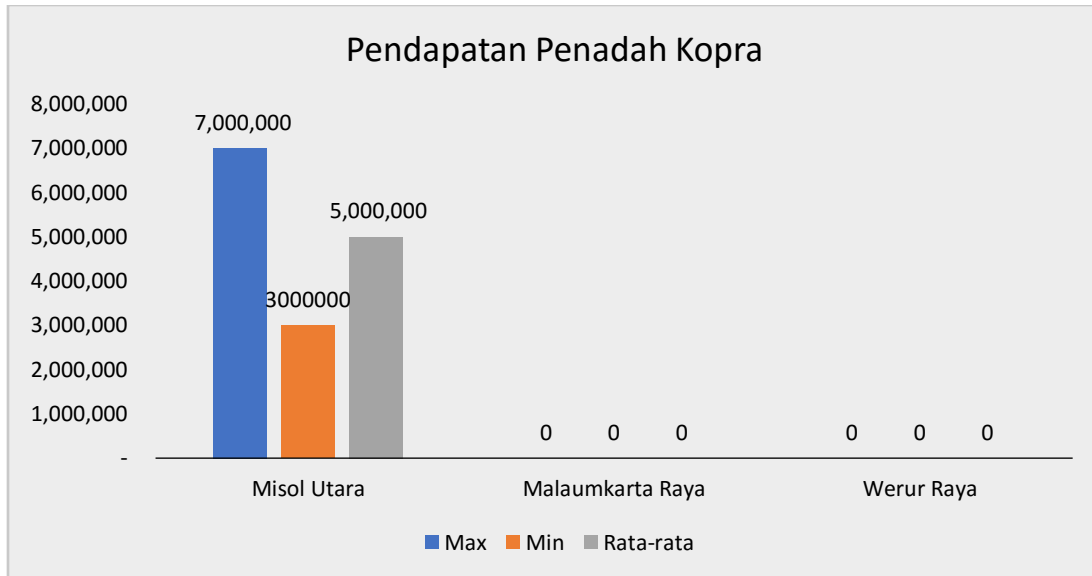
Usaha penangkapan ikan terus menerus dilakukan di wilayah perairan Misool Utara oleh masyarakat di Misool Utara. Hal ini dikarenakan tersedianya penampung ikan di kampung. Masyarakat telah membangun relasi dengan penadah dan dalam waktu yang disepakati penadah akan tiba di kampung untuk mengumpulkan hasil tangkapan dari masyarakat. Penadah ikan hanya ditemukan di Misool Utara. Penadah akan sampai ke perairan depan kampung dan masyarakat langsung menjual ikan hasil tangkapannya kepada penadah tersebut (Gambar 68). Pendapatan Maksimum penadah di Misool Utara, Maksimum Rp. 8.000.000, Minimum Rp.2.000.000. dan Rata Rata Rp. 5.000.000. Selain di wilayah Misool Utara, Malaumkarta Raya dan Werur raya tidak ditemukan penadah ikan. Di werur nelayan akan menjual langsung ke penadah yang ada di Sorong.



Gambar 68. Pendapatan Penadah Ikan di wilayah survei

### 3.4.7. Pendapatan Penadah Kopra

Pendapatan penadah Kopra Maksimum Rp. 7.000.000, Minimum Rp.3.000.000. dan Rata Rata Rp. 5.000.000. Penadah kopra yang ada di kampung ditemukan di Wilayah Misool Utara. Sedangkan di Malaumkarta dan werur raya tidak ditemukan. (Gambar 69). Masyarakat di werur raya juga melakukan usaha kopra, namun mereka harus menjualnya dengan penadah di luar kampung. Ketika pasar tidak ada di kampung maka pengeluaran transportasi akan menjadi alokasi biaya yang perlu diperhatikan.



Gambar 69. Pendapatan Penadah Kopra di wilayah survei

### 3.4.8. Alokasi Pendapatan RT

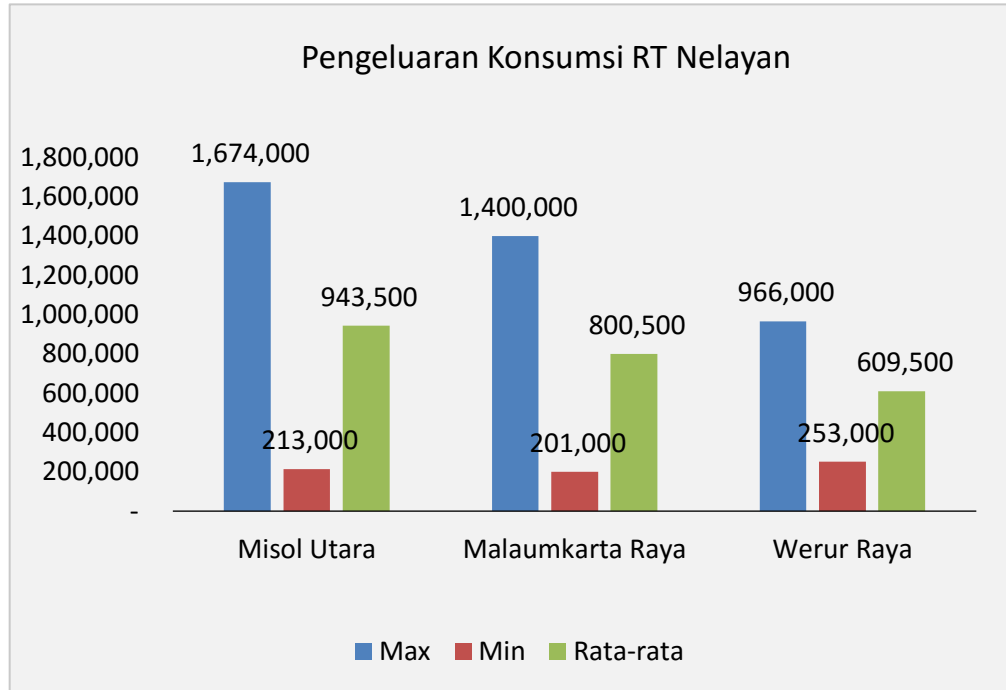
Alokasi pendapatan rumah tangga (RT) secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua) jenis alokasi pendapatan yaitu alokasi pendapatan untuk kebutuhan pangan dan alokasi pendapatan untuk kebutuhan non pangan. Menurut Wibawa (2003). Faktor terpenting dalam mengalokasikan pendapatan adalah perencanaan keuangan keluarga berkaitan dengan berapa banyak uang yang masuk dari pendapatan dan berapa banyak uang yang dialokasikan sebagai kegiatan produksi, konsumsi dan kebutuhan pendukung lainnya. Karena secara sederhana perencanaan keuangan kebutuhan pangan dirinci menurut jenis dan kelompok pangan, sedangkan untuk kebutuhan non pangan dirinci sesuai dengan kebutuhan dari rumah tangga responden termasuk didalamnya adalah kebutuhan untuk mendukung kegiatan produksi.

Dalam penelitian ini, terdapat rumah tangga (RT) yang bermata pencaharian utama sebagai nelayan dan juga bermata pencaharian lain seperti bertani, buruh bangunan, peternak dan lain sebagainya.

#### 3.4.8.1. Alokasi untuk kegiatan Produksi (Rumah Tangga Nelayan)

Untuk melaksanakan kegiatan produksi maka nelayan melakukan pengeluaran yang kemudian disebut sebagai biaya yakni biaya tetap, biaya variabel dan biaya pemasaran. Kebutuhan atau pengeluaran ini dikonversikan kedalam pengeluaran per bulan.

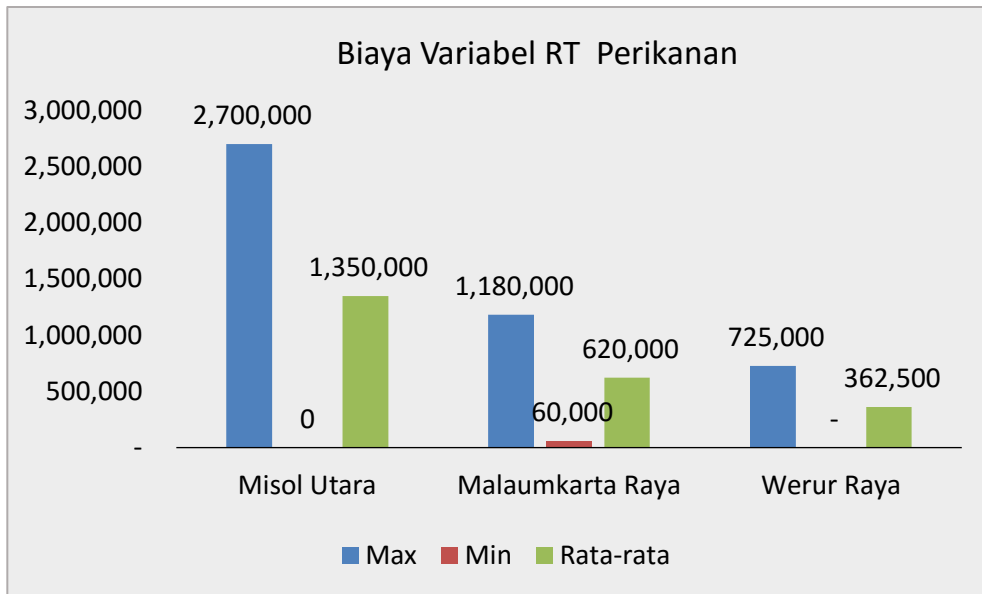
Rata-rata biaya tetap tertinggi per bulan terdapat pada rumah tangga nelayan di Distrik Misol Utara (Rp.1.256.125) dan kemudian tertinggi kedua adalah di Distrik Malaumkarta Raya (Rp.672.777) dan diikuti oleh Distrik Werur Raya (Rp. 630.667).



Gambar 70. Alokasi biaya tetap RT nelayan di tiga Distrik pengamatan

Orientasi sebagai nelayan penuh atau nelayan yang menjadikan laut sepenuhnya sebagai sumber pendapatan adalah nelayan pada Distrik Misol Utara (Gambar 71). Selain orientasi laut dan tumpuan mata pencaharian maka modal yang dimiliki nelayan tersebut cukup besar sehingga memungkinkan usaha perikanan tangkap terus berjalan. Terlihat dari alokasi biaya armada dan alat tangkap kapal yang berbeda dari dua distrik lain.

Rata-rata biaya tidak tetap atau biaya variabel yang juga disebut sebagai Rata - rata biaya kerja dalam satu bulan tertinggi ditemukan di Distrik Misol Utara (Rp.1.350.000), dan setelah itu Distrik Malaumkarta Raya (Rp.620.000) sedangkan biaya terendahnya terdapat di Distrik Werur Raya (Rp.362.500). Adapun secara lengkap dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



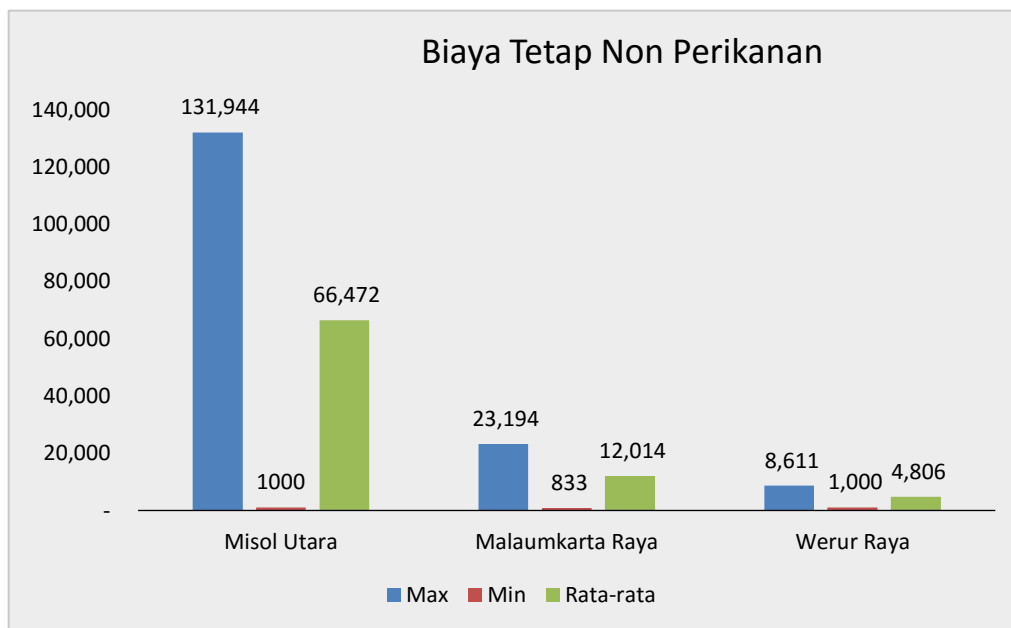
Gambar 71. Alokasi biaya tidak tetap RT nelayan di tiga Distrik pengamatan

Berdasarkan grafik diatas, tingginya biaya variabel di Distrik Misol Utara adalah jumlah penduduk nelayan lebih besar dibandingkan dua distrik yang lain yang dominan pada kegiatan di darat.

#### 3.4.8.2 Alokasi untuk kegiatan Produksi (Rumah Tangga Non Nelayan)

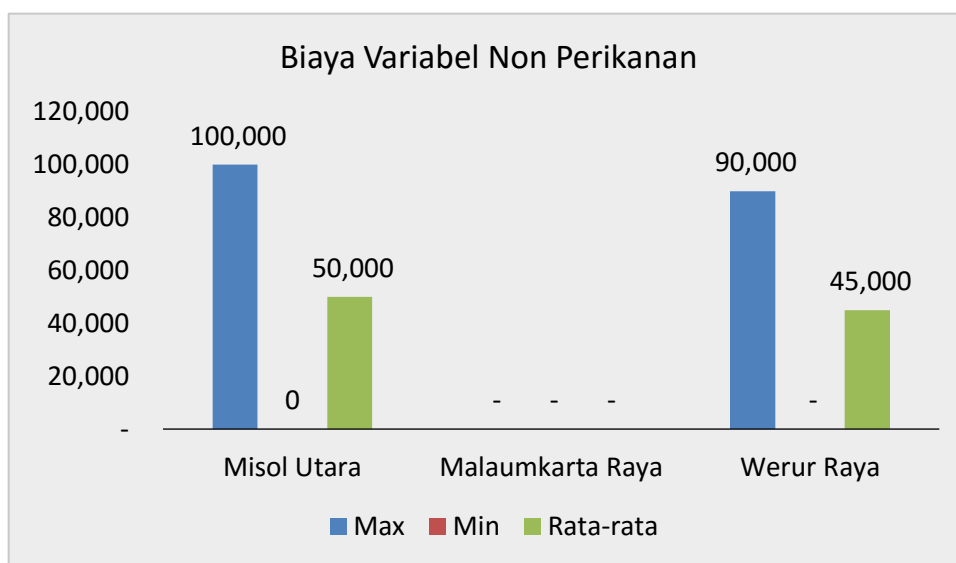
Mata Pencaharian utama non perikanan yang terdapat pada tiga distrik pengamatan antara lain: Pertanian, Perkebunan, Perternakan dan buruh. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka masyarakat pun melakukan pengeluaran yang kemudian disebut sebagai biaya yakni biaya tetap, biaya variabel dan biaya pemasaran. Kebutuhan atau pengeluaran ini dikonversikan kedalam pengeluaran per bulan.

Rata-rata biaya tetap tertinggi per bulan terdapat pada rumah tangga non nelayan di Distrik Misol Utara (Rp.132.944) dan kemudan tertinggi kedua adalah di Distrik Malaumkarta Raya (Rp.24.027) dan diikuti oleh Distrik Werur Raya (Rp.9.611). Sebaran biaya rat-rata secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 72. Alokasi biaya tetap RT Non Perikanan tetap di tiga Distrik pengamatan

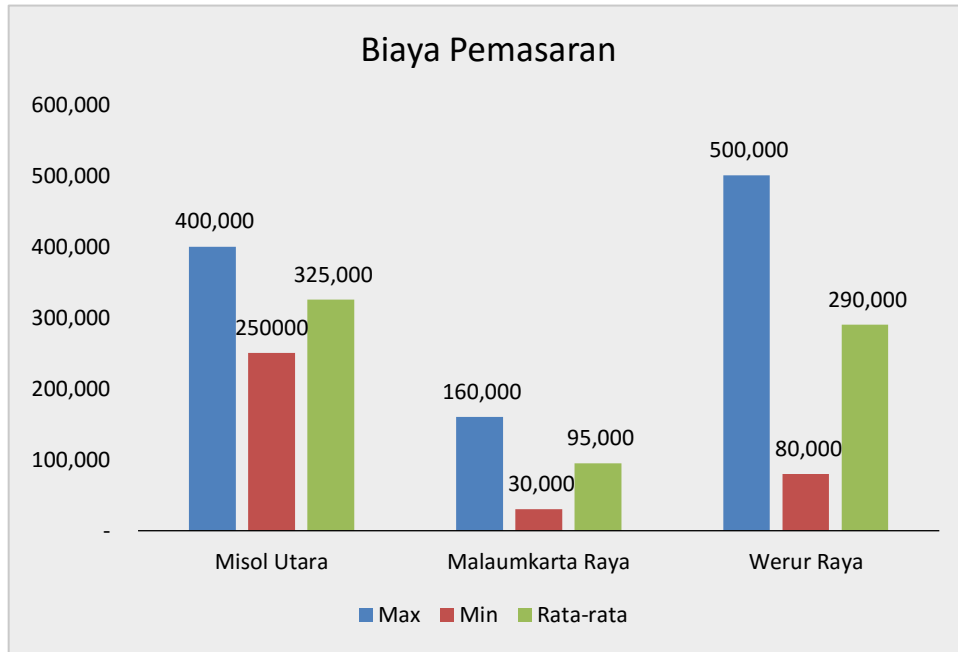
Tingginya biaya tetap di Distrik Misol Utara disebabkan karena distrik ini termasuk distrik yang sulit akses dan infrastruktur sehingga menyebabkan mahalnya alat yang digunakan dalam produksi dan secara tidak langsung berdampak pada tingginya biaya penyusutan alat tersebut. Rata-rata biaya tidak tetap atau biaya variabel RT non nelayan dalam satu bulan tertinggi ditemukan di Distrik Misol Utara (Rp.50.000, dan setelah itu Distrik Werur Raya (Rp. 40.000) sedangkan biaya terendahnya terdapat di Distrik Malaumkarta Raya (Rp.0). Adapun secara lengkap dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 73. Alokasi biaya tidak tetap RT Non Perikanan di tiga Distrik pengamatan

### 3.4.8.3. Biaya Pemasaran

Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan dalam memasarkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat di Distrik Misol Utara, Malaumkarta Raya dan Werur Raya. Sebaran Biaya Pemasaran dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 74. Alokasi Biaya Pemasaran di 3 Distrik pengamatan

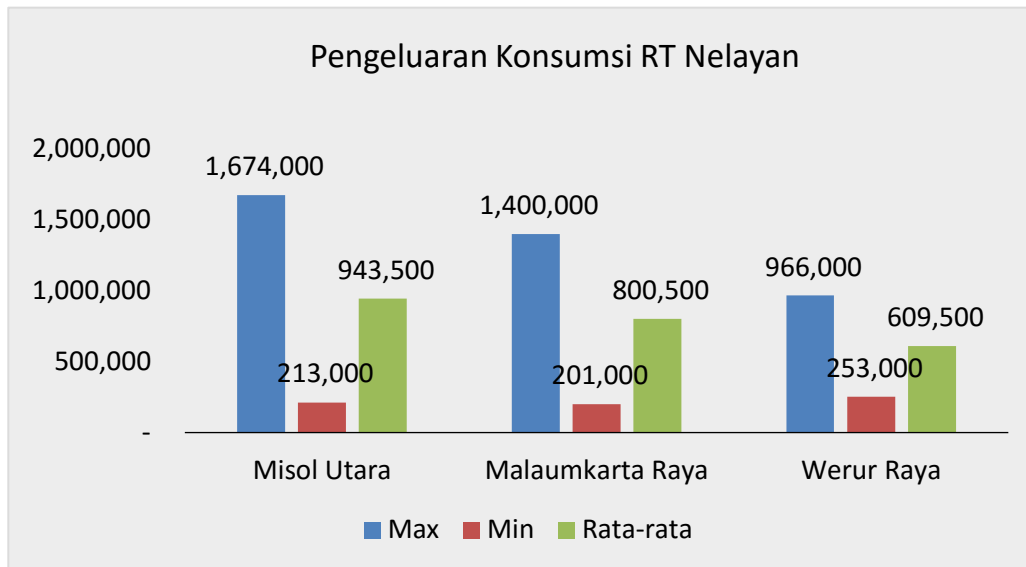
Berdasarkan Gambar...dapat dilihat bahwa rata-rata biaya pemasaran tertinggi berada di Distrik Misol Utara(Rp.325.000), diikuti Distrik Werur Raya(Rp.290.000) dan yang paling terendah adalah Distrik Malaumkarta Raya(Rp.95.000).Besarnya biaya pemasaran tergantung jarak dan akses ke pasar dimana Distrik Malaumkarta Raya merupakan distrik yang terdekat dengan ibukota Kabupaten makabiaya pemasarannya menjadi yang terendah dibandingkan dua distrik yang lain.

### 3.4.8.4 Alokasi untuk konsumsi(Rumah Tangga Nelayan)

Konsumsi merupakan kebutuhan dasar masyarakat dalam menyediakan keperluan Rumah Tangga. Berbagai jenis pengeluaran yang dikeluarkan nelayan secara rutin dalam satu bulan tetapi juga ada kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung dalam satu bulan atau dengan kata lain disesuaikan waktu dan kebutuhan yang ada pembelian seperti piring mas kawin, pengeluaran tak terduga, berobat dan usaha. Pengeluaran rutin yang dikeluarkan oleh nelayan pada 3 distrik pengamatan adalah beras, sagu, ubi ubian, ikan, buah, sayuran, supermi, sarden, gula, garam,



kopi, the, susu, minyak goreng, minyak tanah, bumbu dapur, BBM untuk kendaraan, pakaian, sepatu atau sandal (Gambar 75)

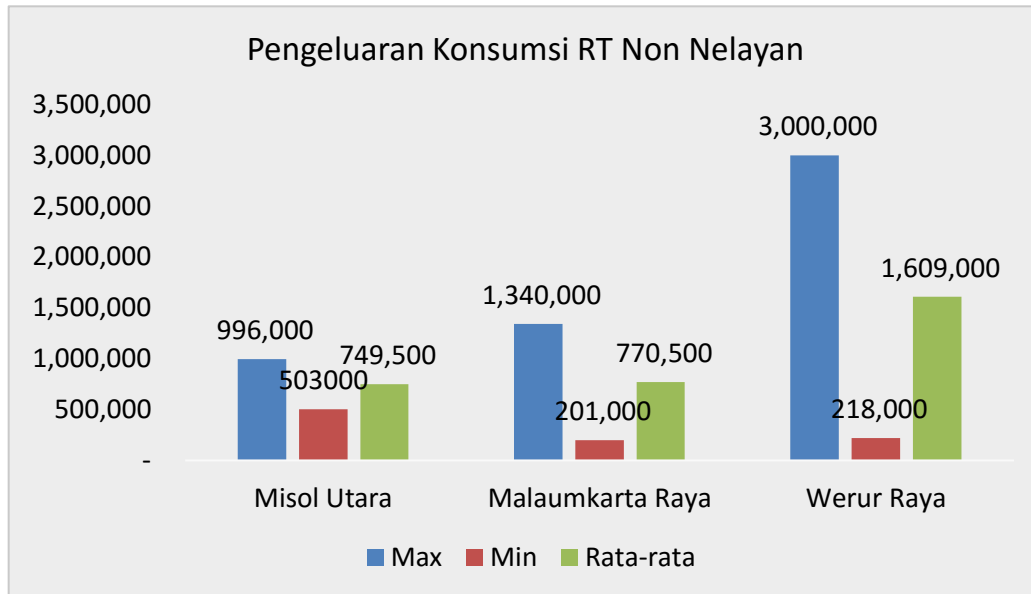


Gambar 75. Sebaran pengeluaran konsumsi RT Nelayan di tiga Distrik pengamatan.

Rata-rata pengeluaran konsumsi per bulan yang tertinggi terdapat pada Distrik Misol Utara (Rp. 943.500), diikuti Distrik Malaumkarta Raya (Rp. 800.500) dan yang paling terendah adalah Distrik Werur Raya (Rp. 609.500). Pengeluaran konsumsi tertinggi berada di Distrik Misol Utara yang merupakan distrik terjauh dari ibukota kabupaten, sehingga menyebabkan mahalnya harga barang konsumsi yang banyak didatangkan dari luar terutama bahan pokok yang tidak diproduksi di daerah pengamatan seperti beras, gula, kopi, bahan bakar dan lain sebagainya.

#### 3.4.8.5 Alokasi untuk konsumsi (Rumah Tangga Non Nelayan)

Gambar menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran konsumsi untuk Rumah Tangga Non Nelayan paling tertinggi terdapat di Distrik Werur Raya (Rp. 1.609.000), diikuti Distrik Malaumkarta Raya (Rp. 770.500) dan yang paling terendah adalah Distrik Misol Utara (Rp. 749.500).



Gambar 76. Sebaran Pengeluaran konsumsi RT Non Nelayan di 3 Distrik pengamatan.

### 3.4.9. Rantai Pemasaran

Masalah pemasaran hasil perikanan bisa dibidang sebuah masalah klasik yang tidak pernah berakhir atau cerita lama yang sampai sekarang masih terus relevan dibahas dan dicarikan solusinya. Kondisi seperti: panjangnya rantai distribusi, perbedaan harga (disparitas) yang masih tinggi dari produsen ke konsumen, kontinuitas produk yang kurang terjamin, kelangkaan produk di periode tertentu, serta keterbatasan infrastruktur pendukung pemasaran (Taufiq & Sutopo, 2012). Kondisi ini terjadi pada Perikanan tangkap skala kecil di Distrik Misol Utara, Malaumkarta Raya dan Werur Raya.

Produksi perikanan yang tinggi tidak akan berarti apabila tidak didukung oleh sistem pemasaran yang tepat. Strategi pemasaran yang tepat akan membuat usaha perikanan tangkap berkembang dan menguntungkan. Oleh karena itu, peranan pemasaran semakin penting bagi nelayan. Setiap nelayan sebelum melakukan kegiatan usahanya terlebih dahulu memikirkan tentang akses pemasaran, karena kalau tidak demikian maka tentu akan mendapat kesulitan ketika hasil produksi akan dijual atau dipasarkan (Ali et al., 2008). Panjang pendeknya jalur pemasaran ditentukan oleh akses nelayan terhadap pasar yang tersedia. Terdapat 4 model rantai/jalur pemasaran pada perikanan skala kecil di Distrik Misol Utara, Malaumkarta Raya dan Werur Raya. (Tabel 32).

Tabel 32. Model jalur pemasaran ikan oleh nelayan

Distrik	Model 1	Model 2	Model 3
Misol Utara	Nelayan - konsumen	Nelayan - Pasar Ikan - Konsumen	Nelayan - pengepul - Pasar Ikan - Konsumen
Malaumkarta Raya	Nelayan - Konsumen	Nelayan - Pasar Ikan - Konsumen	
Werur Raya	Nelayan - Konsumen	Nelayan - Pasar Ikan - Konsumen	Nelayan - pengepul - Pasar Ikan - Konsumen

Berdasarkan tabel 32 dapat dilihat bahwa ketiga model pemasaran hampir sama pada setiap distrik. Pada Distrik Misol Utara, untuk beberapa kampung yang letaknya sangat jauh dari ibukota distrik, hanya menerapkan model ke 3 yaitu Nelayan - Pengepul - Pasar Ikan - Konsumen. Pengepul atau Jolor akan singgah selama 1 - 2 minggu untuk menampung hasil laut (Ikan, Udang dan lain sebagainya) lalu dibawa ke ibukota distrik atau ke Kota Sorong.

Untuk distrik Malaumkarta Raya yang letaknya di dekat dengan Kota Sorong dan Jalan Utama (Trans Kabupaten) maka nelayan tidak tergantung pada pengepul/jolor, dimana mereka dapat langsung menjual di pinggiran jalan atau langsung menjual ke Pasar Kota Sorong. Sedangkan untuk Werur Raya, hasil tangkapan dapat langsung dijual didalam kampung karena pasar kampung masih menjanjikan karena hampir semua masyarakat di Werur Raya bermata pencaharian sebagai petani dan juga bekerja di sektor perkebunan. Sedangkan untuk model 3 hanya berlaku pada hasil bukan ikan seperti : sirip hiu, teripang dan lains sebagainya.

Alternatif strategi pengembangan pemasaran diperoleh berdasarkan kondisi internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kegiatan pemasaran hasil produksi perikanan skala kecil di Misol Utara, Malaumkarta Raya dan Werur Raya. Terdapat tiga alternatif strategi pemasaran berdasarkan prioritas yaitu:

1. Memperluas jaringan pemasaran hasil produksi. Pemasaran hasil produksi masih terbatas pada ikan konsumsi masyarakat di wilayah pesisir Manokwari. Potensi produksi ikan yang tinggi terutama jenis ikan Tuna, ikan karang yang memiliki nilai ekonomis tinggi memiliki jaringan pemasaran yang luas sehingga produksi ikan tersebut dapat dimanfaatkan secara efisien.
2. Perluasan jaringan pemasaran dapat dilakukan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan pedagang pengumpul di luar Kabupaten atau dengan pihak pemodal yang dapat

membeli langsung hasil produksi ikan tersebut. Dengan melakukan hubungan kerjasama dengan pedagang pengumpul yang dapat menghubungkan dengan industri perikanan maka aspek pemasaran dapat berkembang dan dimanfaatkan secara efisien.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan pendaratan ikan (PPI). PPI yang terdapat di Pasar Sanggeng masih belum difungsikan secara maksimal.

Melakukan penyortiran berdasarkan jenis dan ukuran ikan. Strategi ini untuk mengatasi kelemahan berupa ikan hasil tangkapan disortir hanya berdasarkan jenis ikan. Umumnya nelayan tidak melakukan penyortiran ikan berdasarkan ukuran namun hanya berdasarkan jenis ikan. Dengan dilakukannya penyortiran berdasarkan jenis dan ukuran maka harga ikan hasil tangkapan akan lebih meningkat karena perbedaan ukuran menyebabkan harga jual ikan juga berbeda.

**BAB IV**  
**TATA KELOLA KAWASAN KONSERVASI PERIKANAN ADAT**  
**DI PERAIRAN MISOOOL UTARA, MALAUMKARTA SORONG DAN BIKAR TAMBRAUW**

Upaya membangun tata kelola di kawasan konservasi perairan adalah sebuah upaya untuk menjamin bahwa kawasan konservasi perairan tersebut dikelola dengan baik sesuai dengan tujuan pengelolaannya. Pengelolaan sebuah kawasan konservasi perairan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, maka pengelolaan dan tanggungjawab pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah. Kerangka hukum formal merupakan dasar utama dalam pengelolaan, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Besarnya kekuasaan pemerintah untuk mengatur pengelolaan bukan berarti menutup partisipasi masyarakat

Para pihak yang terlibat dalam tata kelola mempunyai berbagai alasan yang menjadi dasar mereka untuk ikut berpartisipasi dalam membangun tata kelola. Jones et al. (2011) mendiskusikan tentang lima insentif yang bisa dirancang dari awal sehingga mendorong para pelakunya untuk terlibat dalam pengelolaan. Kelima insentif ini berangkat dari pemahaman bahwa pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan kerangka hukum sebagai dasar untuk mengelola sumber daya alam, memperkuat peran masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi, serta market insentif yaitu penggunaan insentif ekonomi untuk membantu peningkatan sumberpenghidupan masyarakat. Insentif tersebut adalah

1. Ekonomi: menggunakan pendekatan ekonomi dan hak kepemilikan untuk mencapai tujuan kawasan konservasi perairan. Insentif ini didorong oleh mekanisme pasar
2. Interpretasi: mempromosikan kesadaran tentang komponen konservasi di kawasan konservasi perairan, tujuan dan kebijakan untuk mencapai tujuan ini
3. Pengetahuan: menghormati kebijakan lokal tentang pemanfaatan tradisional
4. Hukum: merumuskan dan melaksanakan hukum, peraturan untuk meningkatkan kepatuhan atas peraturan kawasan konservasi perairan.
5. Partisipasi: menyediakan ruang dan waktu bagi semua pihak kunci untuk ikut terlibat dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang bisa mempengaruhi kehidupan dan rasa kepemilikan mereka terhadap kawasan konservasi perairan.

Kajian di 20 kawasan konservasi perairan di negara-negara kawasan segitiga karang menemukan beberapa aspek yang mempengaruhi tata kelola yaitu kejelasan hak kepemilikan atas

sumber daya, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, keanekaragaman institusi yang terlibat dan faktor legal (Jones et al. 2013). Sementara itu, kajian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi didunia oleh IUCN (Leverington et al. 2008) menemukan beberapa aspek yang mempengaruhi tata kelola yaitu: berhubungan dengan tahap perencanaan, komunikasi yang intensif, partisipasi masyarakat, sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola kawasan konservasi, penelitian dan pemantauan, sarana dan prasarana, serta informasi. Beberapa parameter dalam tata kelola yang dibahas dalam survei di kawasan konservasi perairan Misool Utara, Malaumkarta dan Bikar adalah hak terhadap sumberdaya, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lembaga sosial yang ada di kawasan konservasi perairan.

Kategori Hak masyarakat adat menurut Nababan ada empat hak masyarakat adat yang paling sering digunakan yakni :

1. Hak untuk “menguasai” (memiliki, mengendalikan) dan mengelola (memanfaatkan) tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya;
2. Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk peradilan adat) dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat adat;
3. Hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem kepengurusan/ kelembagaan adat;
4. Hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan (agama), sistim pengetahuan (kearifan) dan bahasa asli

#### **4.1. Hak Terhadap Sumberdaya**

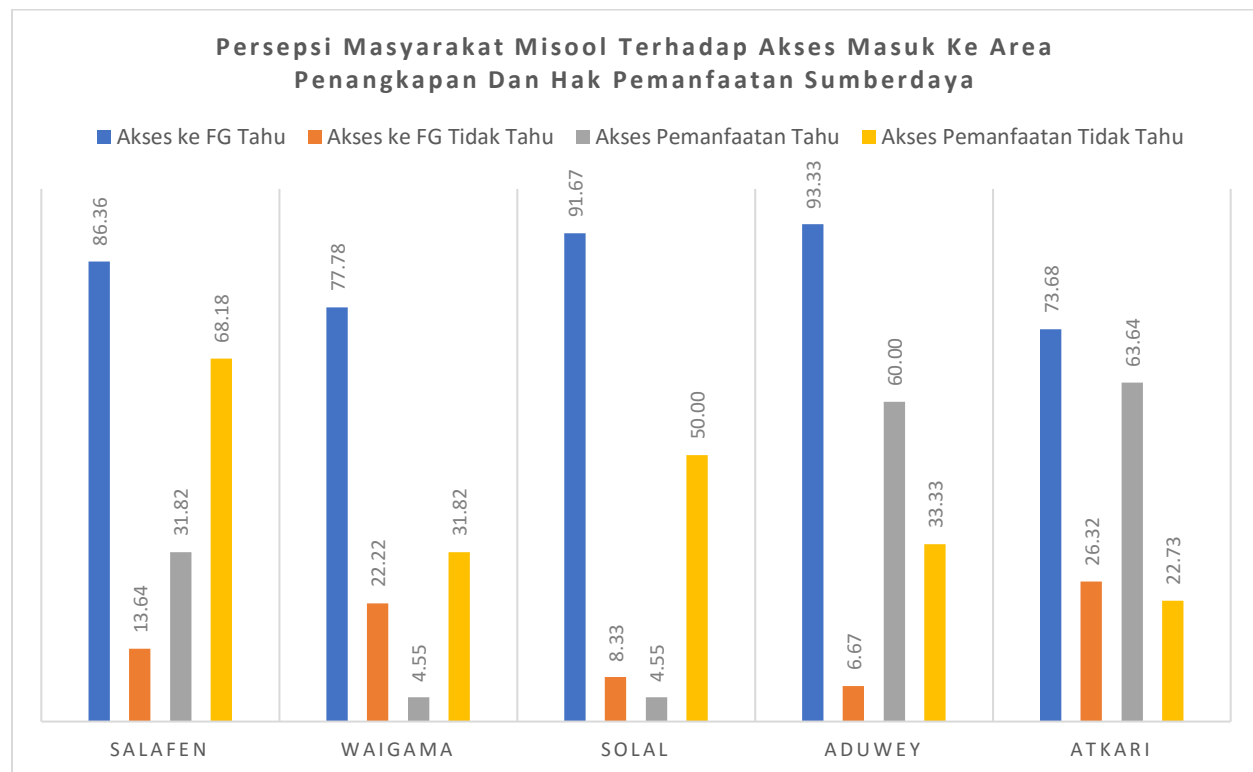
##### **4.1.1. Hak Masuk dan pemanfaatan sumberdaya**

*Access rights* (hak akses) yaitu hak untuk masuk (*entry*) ke dalam usaha perikanan tangkap baik dalam konteks daerah penangkapan (*fishing ground*) atau dalam salah satu struktur usaha perikanan seperti penyediaan bahan baku, pengolahan perikanan, dan lain sebagainya. Masyarakat hukum adat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hampir masyarakat di wilayah KKP Misool Utara memiliki akses ke daerah penangkapan selama kurun waktu 12 bulan terakhir.

Masyarakat Salafen memahami bahwa memasuki wilayah perairan di Misool Utara melekat pada pemilik hak ulayat yakni Suku Matbat. Hak akses masuk ini dimiliki oleh masyarakat di KKP Misool Utara mulai dari suku asli (Matbat) dan hak akses masuk diberikan juga kepada Suku Matlow yang disebut pendatang (Gambar 77).

Hak atas pemanfaatan sumberdaya di wilayah KKP Misool Utara dapat dimanfaatkan oleh siapa saja baik oleh suku matbat ataupun matlow yang menetap dan tinggal bersama sama di daerah Misool Utara. Ditemukannya orang dari Sorong yang juga memanfaatkan sumberdaya di perairan Misool Utara dan sering dijumpai di Pulau 3, sebanyak 60% masyarakat di Kampung Aduwey menjelaskan adanya nelayan dari sorong yang masuk dan memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Hak pemanfaatan sumberdaya di wilayah perairan Kampung Atkari oleh orang di luar kampung mendapatkan ijin dari kepala kampung setempat. Hak untuk memberikan kewenangan bagi masyarakat diluar komunitasnya dimiliki oleh kepala kampung. Sebanyak 63.64% masyarakat di Kampung Atkari menjelaskan hal tersebut (Gambar 77).



Gambar 77. Pemahaman masyarakat Misool tentang Akses masuk wilayah tangkap dan akses terhadap pemanfaatan sumberdaya.

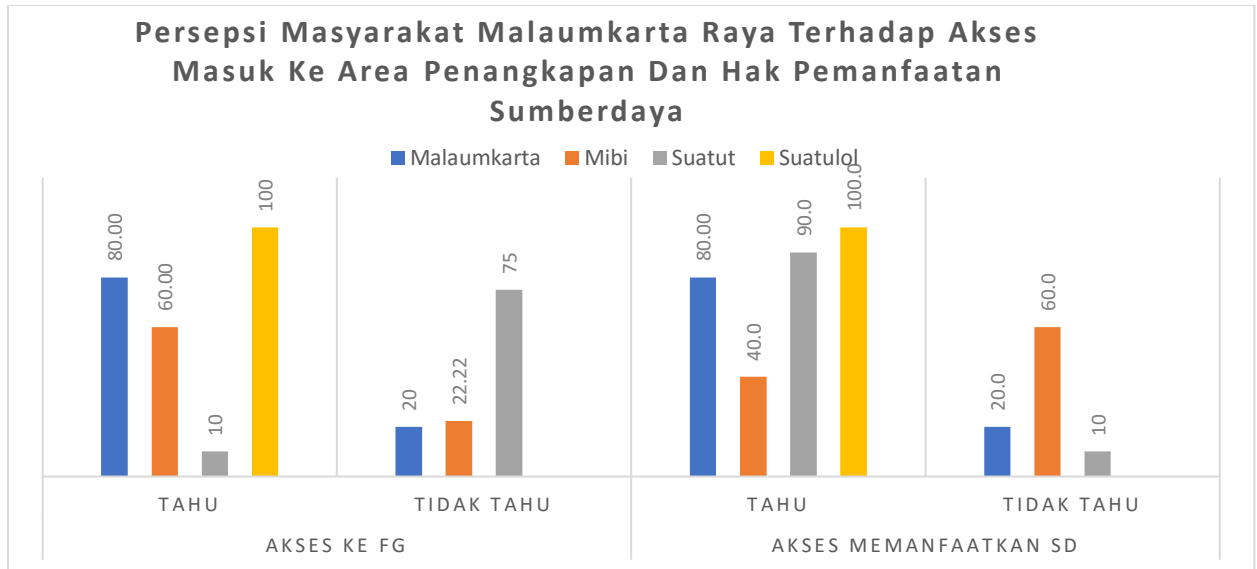
Untuk pemanfaatan sumberdaya masyarakat di Kampung Waigama, Solal dan Salafen memberikan usulan bahwa perlu dibuatkan papan pengumuman di wilayah perairan yang ada sebagai informasi tentang pemanfaatan. Disamping itu, himbauan perlu dilakukan untuk menjaga

sumberdaya yang ada untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang dikarena hak akses/masuk ke perairan menjadi hak semua orang. Dalam konteks ini, masyarakat sangat menyadari bahwa sumberdaya perikanan merupakan milik Bersama.

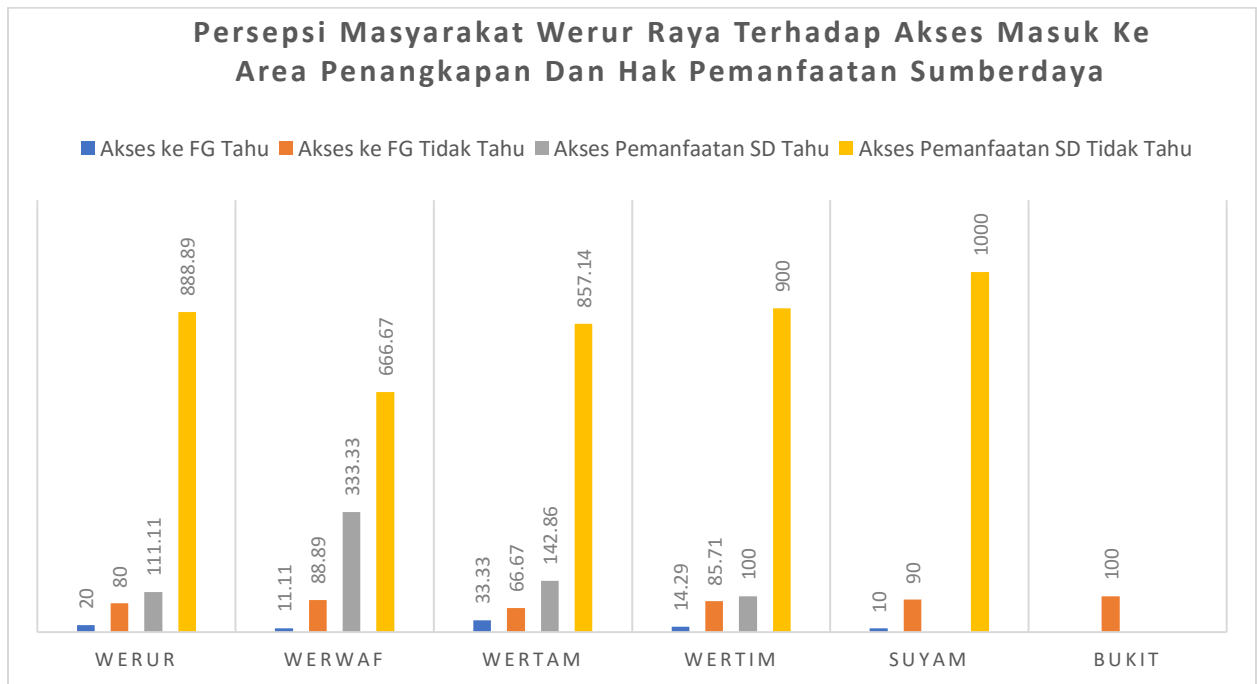
Di wilayah Malaumkarta Raya masyarakat mengetahui siapa saja yang memiliki hak akses ke daerah penangkapan. Semua Responden (100%) di Kampung Suatulol, 80% di Kampung Malaumkarta dan 60% Mibi memahami bahwa yang memiliki hak ke daerah penangkapan adalah masyarakat yang mendiami wilayah Malaumkarta Raya, 10% responden di Kampung Suatut. Semua responden mengetahui Jika ada orang dari luar harus mendapatkan ijin dari pemilik hak ulayat. Selain hak untuk akses masuk ke daerah penangkapan, terdapat hak untuk memanfaatkan sumberdaya. Pengelolaan sumberdaya pesisir di Malaumkarta Raya dilakukan melalui kearifan lokal, yang disebut Sasi Egek. Model pengelolaan ini sudah membatasi akses orang masuk ke perairan. Masyarakat pemilik hak ulayat dapat mengambil sumberdaya yang bukan target Egek seperti ikan. Biota biota demersal yang diegek tidak boleh dimanfaatkan oleh siapa saja termasuk masyarakat asli Malaumkarta Raya.

Ada hak yang diberikan untuk masuk ke wilayah penangkapan tetapi tanpa memanfaatkan sumberdaya yang diegek atau selama berlakunya periode Sasi Egek. 100% responden di Kampung Suatulol, 90% Kampung Mibi, 80% Kampung Malaumkarta dan 40% di Kampung Suatulol memahami kepemilikan atas wilayah pesisir. Responden ini memahami bahwa hak pemanfaatan sumberdaya hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki hak atas wilayah tersebut. Orang diluar dari komunitas tersebut tidak memiliki hak untuk memanfaatkan sumberdaya pada wilayah perairan Malaumkarta Raya (Gambar 78).





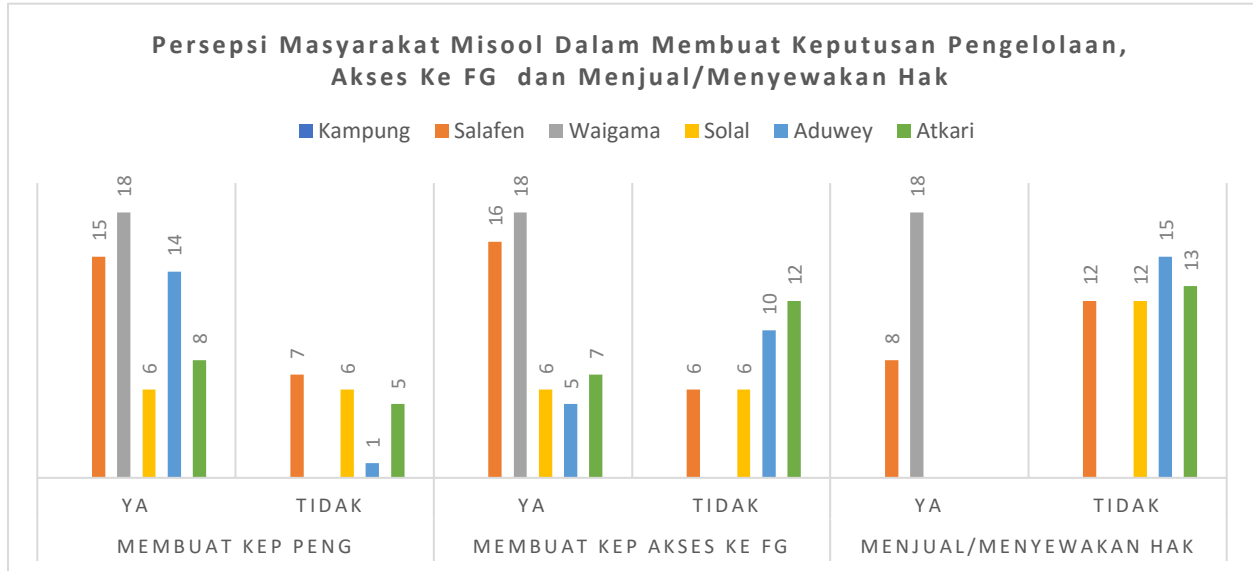
Gambar 78. Persepsi masyarakat malaumkarta Raya terhadap hak akses ke daerah penangkapan dan hak pemanfaatan sumberdaya



Gambar 79. Persepsi masyarakat Werur Raya terhadap hak akses ke daerah penangkapan dan hak pemanfaatan sumberdaya

#### 4.1.2. Hak Pengelolaan/Mengatur

Masyarakat Misool Selatan sangat memahami penguasaan sumberdaya. Dalam hal membuat keputusan pengelolaan terhadap akses ke daerah tangkapan (FG) dan hak menyewakan atau memberikan kewenangan terhadap keputusan pengelolaan sumberdaya menjadi milik masyarakat. Saat ini, masyarakat bersama dengan Yayasan Nasaret serta pemerintah membuat kesepakatan dalam mengelola sumberdaya perikanan.



Gambar 80. Persepsi masyarakat Misool Utara dalam membuat keputusan pengelolaan akses ke FG dan menjual atau menyewakan hak

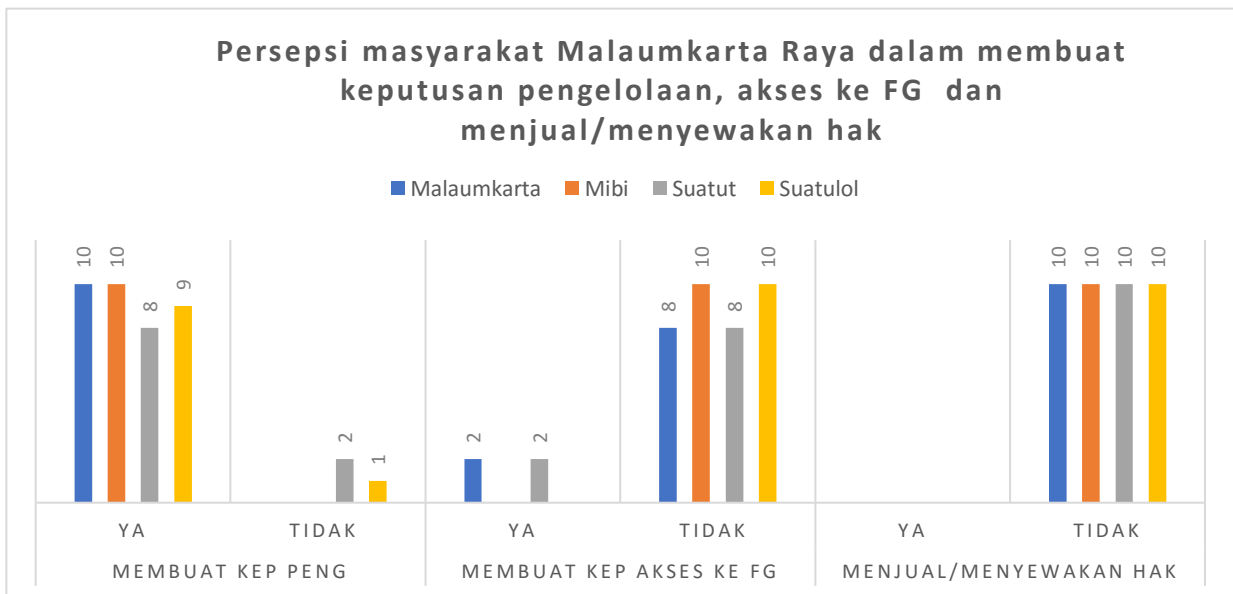
Hak pengelolaan atau hak untuk mengatur sumberdaya di wilayah KKP Misool Utara dimiliki oleh semua orang yang memanfaatkan sumberdaya tersebut. Hasil wawancara dengan masyarakat menyebutkan bahwa pengelolaan perlu di tingkatkan karena terjadi pelanggaran seperti adanya tindakan bom atau penghancuran sumberdaya dan penggunaan alat tangkap yang merusak serta penangkapan terhadap sumberdaya hiu (sirip hiu) yang masih dilakukan sampai saat ini. Hak pengelolaan dan mengatur sumberdaya di wilayah pesisir dimiliki oleh masyarakat pemilik hak sumberdaya (hak ulayat) dan semua pengguna atau pemanfaat sumberdaya di wilayah KKP Misool Utara.

Hak utk memberikan ijin pengelolaan dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan juga hak akses memasuki wilayah penangkapan dimiliki oleh kepala kampung dan atau petuanan. Ijin pemanfaatan seperti kegiatan usaha bagan puri di Kampung Atkari dan usaha kopra di Kampung

Waigama dimiliki kepala kampung dan kepala suku. Sedangkan hak memanfaatkan dan menjaga sumberdaya perairan di wilayah KKP menjadi hak masyarakat lokal, sebagaimana terlihat pada Gambar 80.

Masyarakat Misool Utara memahami hal pengelolaan sumberdaya dan akses ke daerah tangkapan, digambarkan dengan pemahaman masyarakat sebesar 87.91% responden, pemahaman terhadap akses ke wilayah tangkapan sebanyak 60.46% serta pemahaman masyarakat terhadap hak menjual atau menyewakan kewenangan pemanfaatan sumberdaya hanya 33.33%. Pemahaman masyarakat terhadap hak yang diberikan atau disewakan kepada orang lain yang akan memanfaatkan sumberdaya di wilayah perairan KKP tersebut belum banyak diketahui.

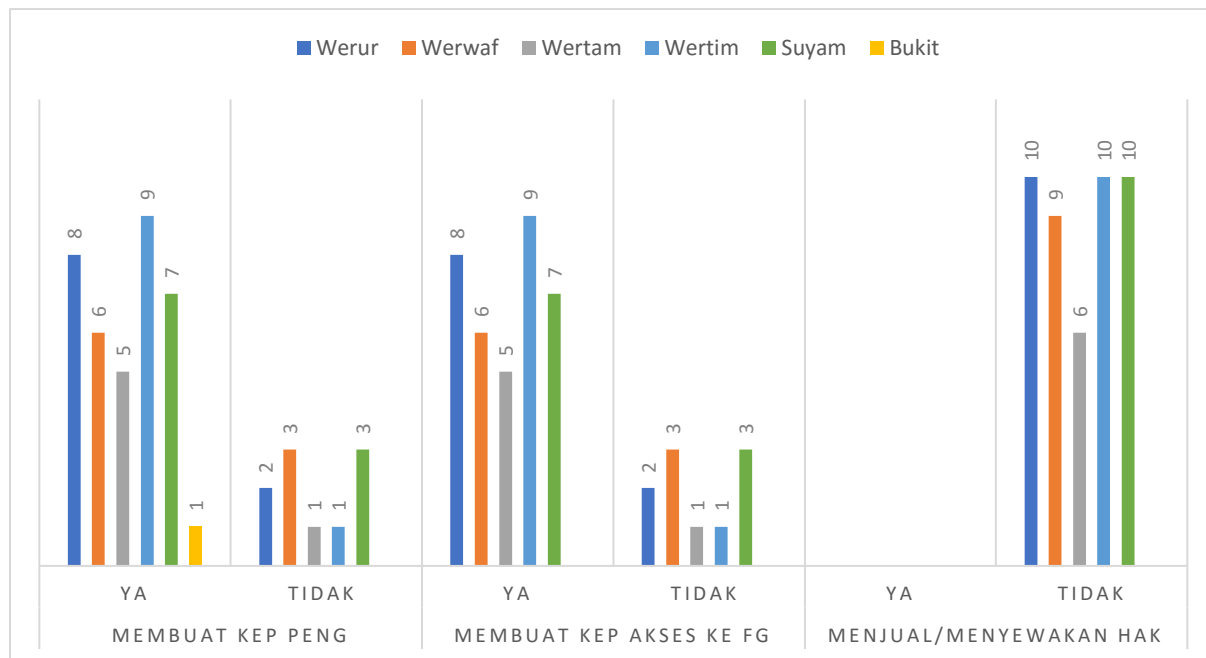
Hak membuat keputusan pengelolaan sumberdaya pesisir di wilayah Malaumkarta Raya menjadi hak semua masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini terjadi dikarenakan penerapan sasi egek bagi masyarakat yang telah dipahami dan ditaati oleh semua masyarakat Malaumkarta Raya. Hak pengelolaan dalam menjaga sumberdaya telah menjadi bagian dari kehidupan sebagai tanggung jawab masyarakat Malaumkarta Raya (Gambar 81)



Gambar 81. Persepsi masyarakat Malaumkarta Raya dalam membuat keputusan Pengelolaan, akses Ke FG dan menjual/menyewakan hak

Hak untuk membuat keputusan akses ke daerah tangkapan menjadi hak kepala kepala kampung. Masyarakat asli Malaumkarta Raya memiliki hak akses yang melekat pada mereka. Masyarakat tidak dapat memberikan atau menyewakan hak mereka sebagai pemilik (hak ulayat) dikarenakan mereka memahami manfaat Sasi Egek yang telah dilakukan di wilayah perairan Malaumkarta Raya. Pemahaman masyarakat tentang konservasi dengan pengertian perlindungan oleh masyarakat Malaumkarta Raya membuat mereka menjaga sumberdaya yang ada. Mereka dapat mengambil biota diperairan yang di lokasi Sasi Egek tetapi tidak mengambil biota yang diegek seperti teripang, lola dan lobster sesuai dengan Peraturan Bupati Sorong no 7 tahun 2017 tentang hukum adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut di Kampung Malaumkarta Raya Distrik Makbon Kabupaten Sorong.

### Werur Raya

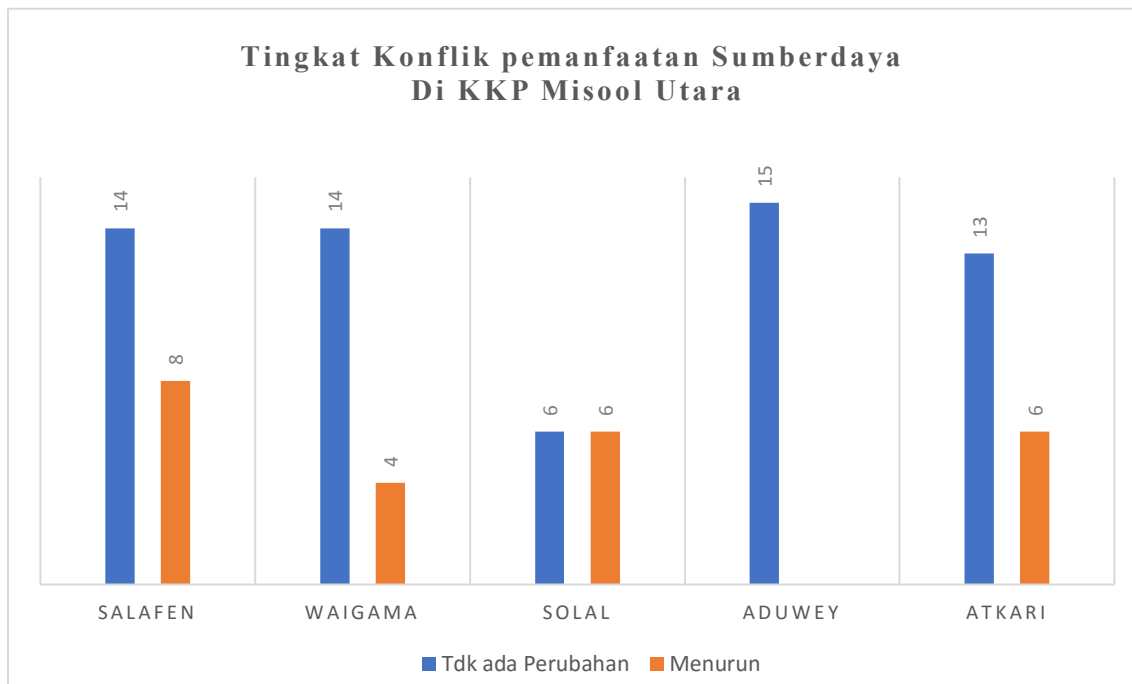


Gambar 82. Persepsi masyarakat Werur Raya dalam membuat keputusan Pengelolaan, akses Ke FG dan menjual/menyewakan hak

### 4.1.3. Konflik Sosial dalam pemanfaatan sumberdaya

Konflik merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. alasannya sederhana, karena banyak pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir, sementara masing- masing pihak berbeda kebutuhan, kepentingan dan selalu berupaya untuk mengoptimalkan tujuannya. Selain itu karakter wilyah yang sangat dinamis yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain yang disebabkan oleh dimilikinya dua aspek

kewilayaan yaitu ruang daratan dan ruang laut (Habtemariam, 2016). Pesisir sebagai sumberdaya open access, memiliki potensi konflik pemanfaatan ruang. Menurut Fisher et al. (2001), konflik disebabkan kebutuhan manusia (fisik, mental, dan sosial) ada yang tidak terpenuhi.



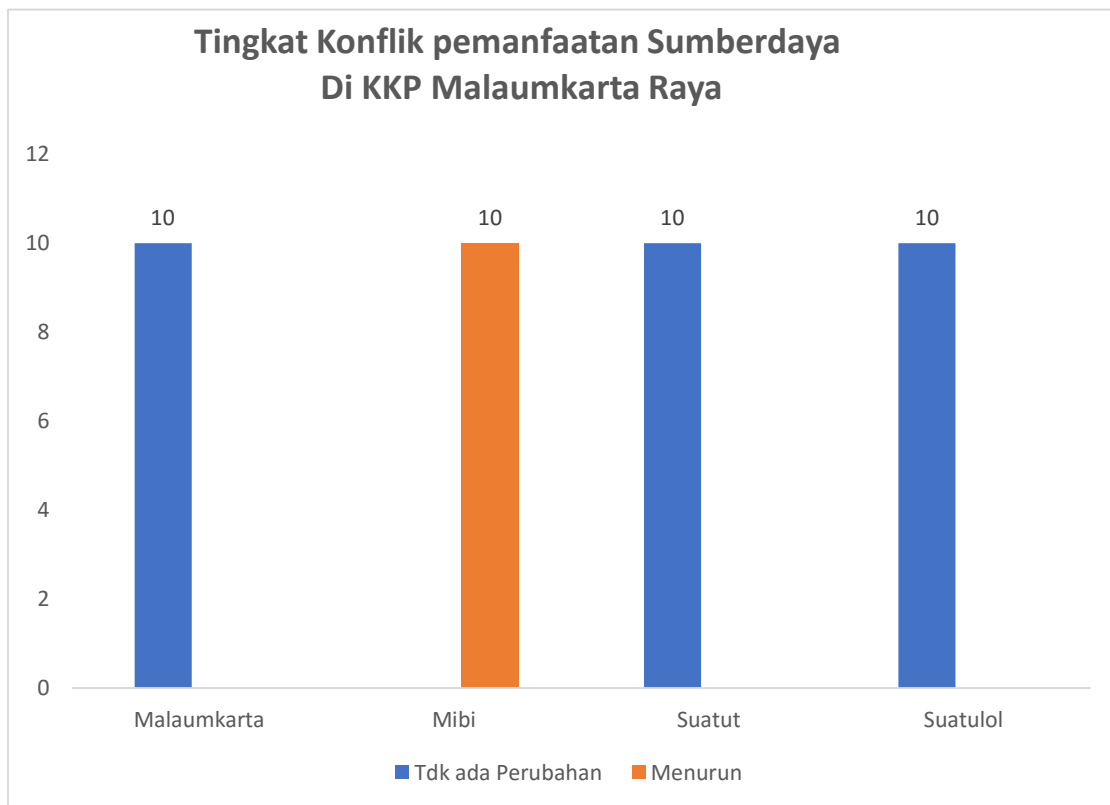
Gambar 83. Tingkat Konflik pemanfaatan sumberdaya di KKP Misool Utara

Pemanfaatan sumberdaya pesisir di KKP Misool Utara dari hasil wawancara dengan responden bahwa konflik yang pernah terjadi adalah antara pemanfaat/ nelayan dari luar yang datang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) dan ditegur/diperingatkan oleh warga setempat. Selain berasal dari luar kampung di Misool Utara mereka juga berasal dari Ruvei Sorong (orang buton) dan paling sering dijumpai di Pulau 3. Jumlah tindakan ini mengalami penurunan bahkan masih ditemukan 2-3 kasus di beberapa kampung namun telah mengalami penurunan jumlah pelanggaran. Belum adanya konflik secara fisik antara pemanfaat dari luar kawasan dan masyarakat di Misool Utara.

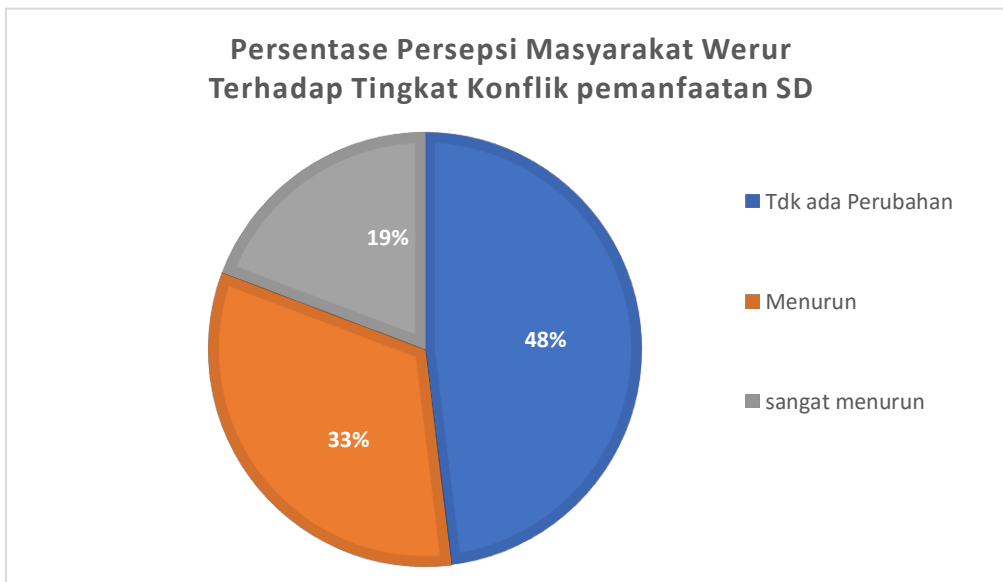
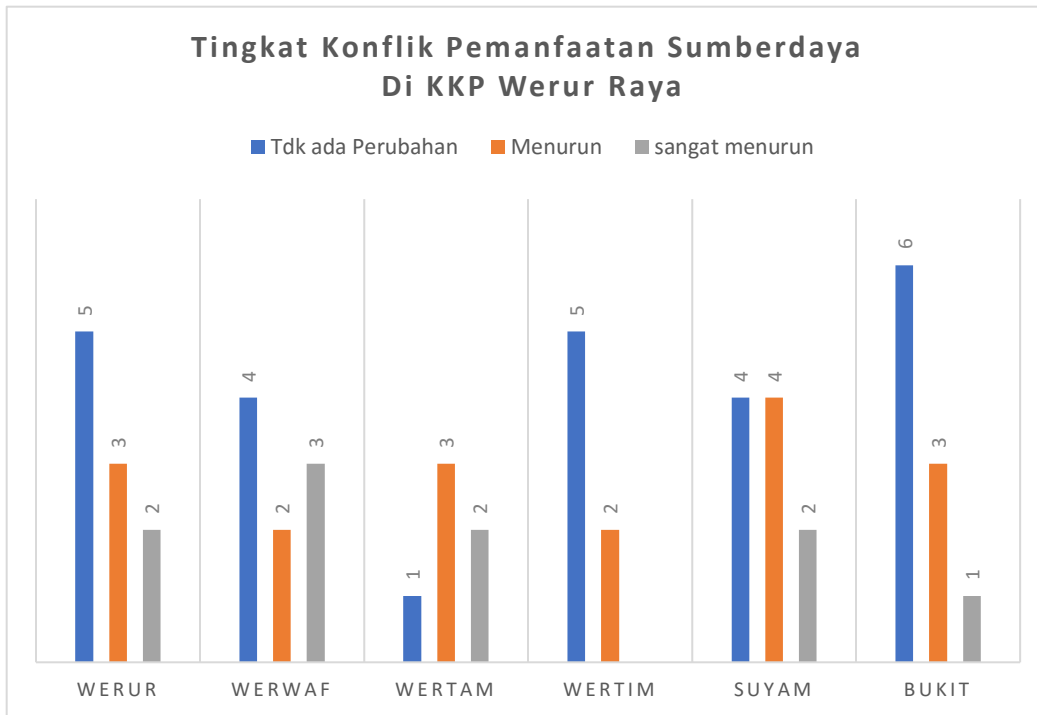
Kasus lainnya adalah penggunaan bom yang terjadi tim patroli YNPB menemukan dan menangkap kemudian di serahkan ke aparat keamanan, nelayan berasal dari pulau buaya pada November 2019, tetapi mereka dibebaskan. dan sekarang masih sering di jumpai adalah penggunaan kompresor dari nelayan asal wejim.

Pemanfaatan sumberdaya pesisir di wilayah Malaumkarta raya berdasarkan hasil

wawancara konflik tidak terjadi. Ada orang luar yang datang memanfaatkan sumberdaya di perairan Malaumkarta namun tidak sampai terjadi konflik. Masyarakat mengetahui orang luar yang masuk mengambil sumberdaya tetapi tidak terjadi pertikaian. Semua masyarakat di daerah Malaumkarta Raya memahami bagaimana memanfaatkan sumberdaya di wilayahnya dengan penerapan sasi egek. Responden di Kampung Mibi menjelaskan bahwa konflik sudah mulai menurun dikarenakan orang mulai memahami bahwa wilayah perairan Malaumkarta Raya telah ditetapkan seagai perairan yang dilindungi dengan penerapan sasi egek (Gambar 84)



Gambar 84. Tingkat Konflik pemanfaatan sumberdaya di Malaumkarta Raya



Gambar 85. Presentase dan tingkat Konflik pemanfaatan sumberdaya di Werur Raya

Aktivitas nelayan komunitas Bikar dalam menangkap ikan hanya menggunakan alat tangkap sederhana yang sangat ramah lingkungan. Kesadaran para nelayan akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan menjadi faktor penting yang melatarbelakangi nihilnya

pengrusakan sumberdaya perikanan oleh nelayan setempat. Konflik perebutan sumberdaya perikanan terjadi dalam kasus-kasus seperti nelayan luar komunitas Bikar atau bahkan luar kabupaten Tambrauw melakukan pencurian ikan dalam wilayah perairan Werur. Dalam skala yang lebih besar, adalah pencurian ikan oleh nelayan Filipina, yang berarmadakan kapal yang lebih besar dan lebih canggih, sehingga mempersulit masyarakat dalam melakukan penangkapan atas pelaku pencurian. Dalam FGD dan wawancara, nelayan setempat menyampaikan perlunya kapal pengawas untuk mengawasi perairan sekitar Werur mengingat melimpahnya produksi perikanan di wilayah tersebut, sementara aktivitas produksi (penangkapan) yang dilakukan oleh masyarakat lokal masih sangat terbatas/kecil angkanya

#### **4.1.4. Organisasi Kemasyarakatan**

Organisasi kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Beberapa lembaga/kelompok masyarakat yang bekerja untuk tujuan pengelolaan sumberdaya di wilayah KKP Misool Utara adalah Yayasan Nasaret Papua Barat, Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan Yayasan Flora Fauna Indonesia dan Lembaga Masyarakat Adat Maya.

Kegiatan pendampingan serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumberdaya pesisir secara rutin di wilayah konservasi perairan Misool Utara dilakukan oleh Yayasan Nasaret Papua Barat. Lembaga lainnya berada di wilayah Misool Utara sesuai dengan waktu dan program yang ditentukan lembaga tersebut. Masyarakat Misool Utara terlibat sebagai anggota di YNPB, menjadi Tim pengelola kawasan yang di dalamnya meliputi koordinator lapangan, komunikasi, tim patroli, dan terlibat juga dalam PLH.

Lembaga/kelompok organisasi yang ada di Malaumkarta raya yang bekerja untuk menjadi agen perubahan di kampung adalah PGM (Perkumpulan Generasi Muda) Malaumkarta Raya yang didirikan sejak tahun 2002. Kelompok ini bekerja mendampingi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumberdaya di wilayah Malaumkarta Raya. Bekerja bersama lembaga lainnya seperti Yayasan Econusa dan Loka PSPL Sorong dalam kegiatan atau program yang ada seperti replantasi terumbu karang, edukasi/sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan bagi sumberdaya yang ada, dan lain sebagainya.



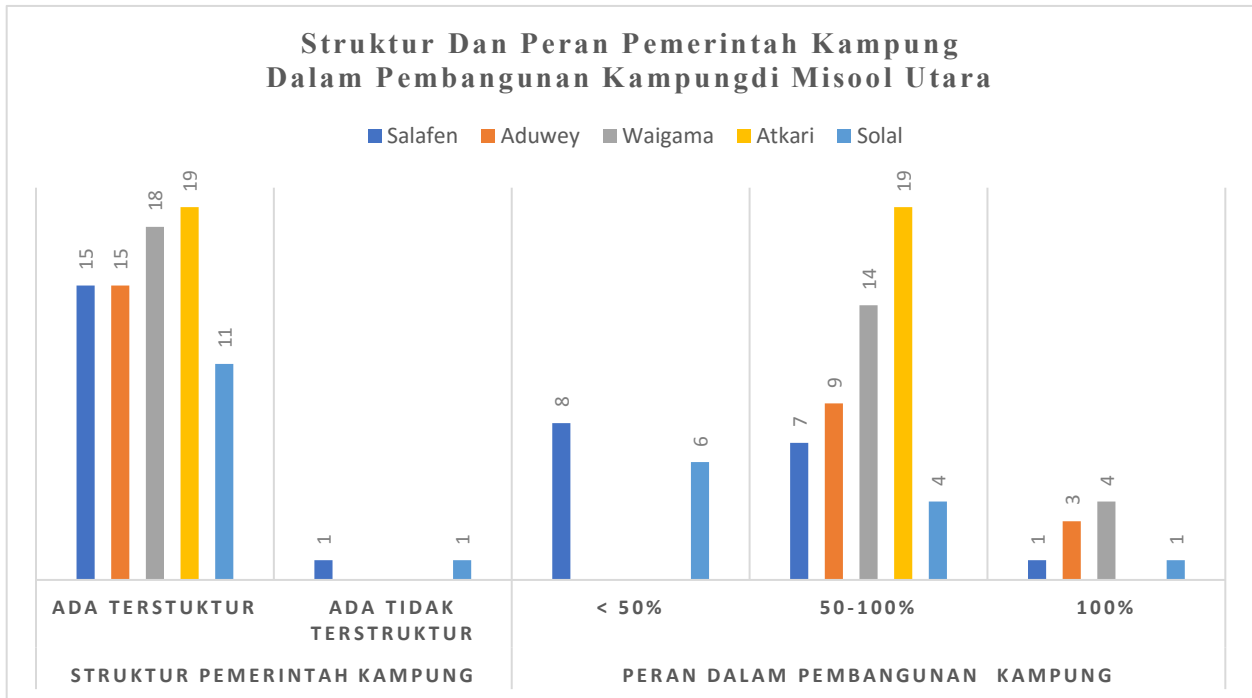
#### 4.1.5. Struktur dan Peran Pemerintah Kampung

Peranan Pemerintah kampung dalam perencanaan pembangunan menjadi permasalahan yang belum terpecahkan dari masa ke masa dalam sistem penyelenggaraan pemerintah desa di masa orde lama, orde baru dan masa reformasi. Secara umum diketahui sesuai isu yang berkembang selama ini, bahwa hambatan dan keterlambatan pembangunan kampung pada umumnya disebabkan oleh tidak tersedia sumber daya manusia (SDM) yang potensial, mentalitas aparat pemerintah kampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kewenangan dan kewajiban pemerintah kampung, kekurangan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan, kampung terpencil dan kekurangan dana.

Suatu kampung perlu memiliki struktur pemerintahan kampung yang jelas serta berfungsi. Dalam pembagian tugas sesuai dengan pembagian tugas dan fungsinya. Agar tugas dan fungsi aparat kampung dapat berjalan maka diperlukannya kualitas dari aparat kampung tersebut. Pentingnya kualitas bagi aparat pemerintah Kampung dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sikap mental, faktor disiplin, faktor pendidikan bidang pelayanan akan turut menentukan pelaksanaan tugas bagi setiap aparat pemerintah kampung. Kualitas bagi aparat pemerintah kampung juga akan dilihat dari kemampuan optimal yang dimiliki kepala kampung dalam penyelenggaraan kepemimpinan sehingga dengan maksimalnya pelaksanaan tugas aparat pemerintah kampung melalui peningkatan kualitas tentu akan mendukung tercapainya pelaksanaan pembangunan yang optimal. Karena aparat pemerintah kampung merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan yang ada di kampung tersebut (Nawawi, 2018).

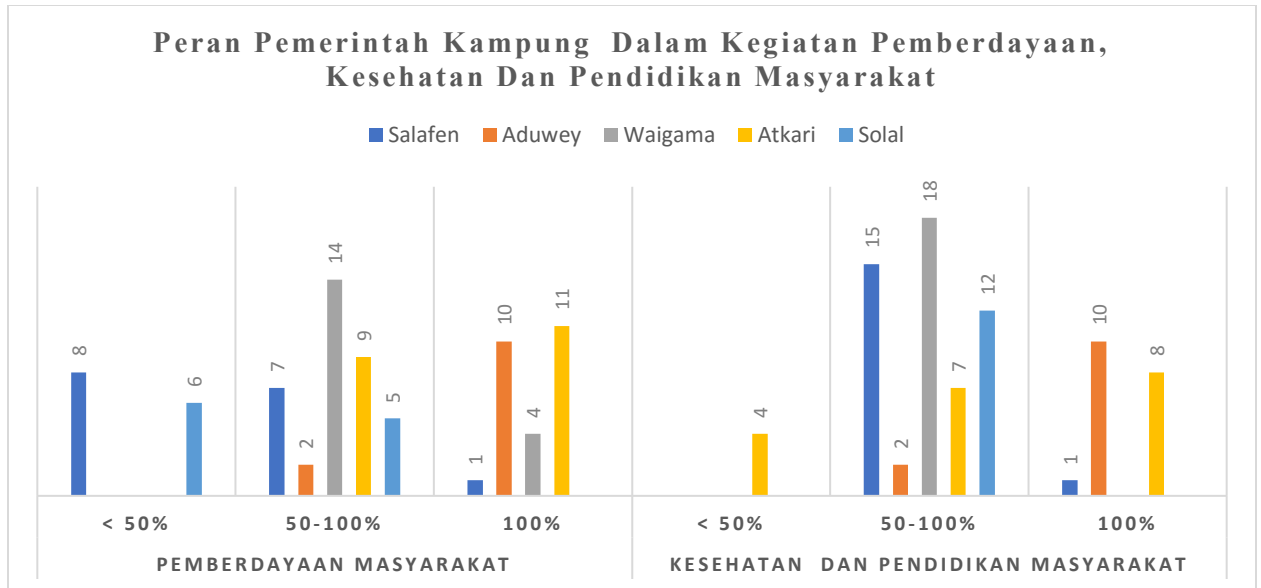
Semua kampung di daerah Misool Selatan telah memiliki pemerintahan kampung yang telah terstruktur dengan baik (Gambar 86). Kelima kampung memiliki kamtor kampung dengan papan struktur pemerintah kampung. Namun masih dijumpai belum maksimalnya pelayanan aparat kampung di kantor kampung hal ini terlihat dengan minimnya pelayanan kepada masyarakat di kantor kampung, lebih banyak komunikasi dilaksanakan di rumah kepala kampung atau aparat kampung yang lainnya. Dalam pembangunan kampung sebanyak 50 - 100% masyarakat Misool memberikan penilaian bahwa pemerintah kampung memberikan dukungan atau secara aktif berperan dalam pembangunan kampung. Hal ini memberikan penjelasan bahwa

pemerintah kampung telah menjalankan peran atau tugas dan fungsi mereka sebagai aparat yang membantu pencapaian tujuan pembangunan masyarakat kampung.



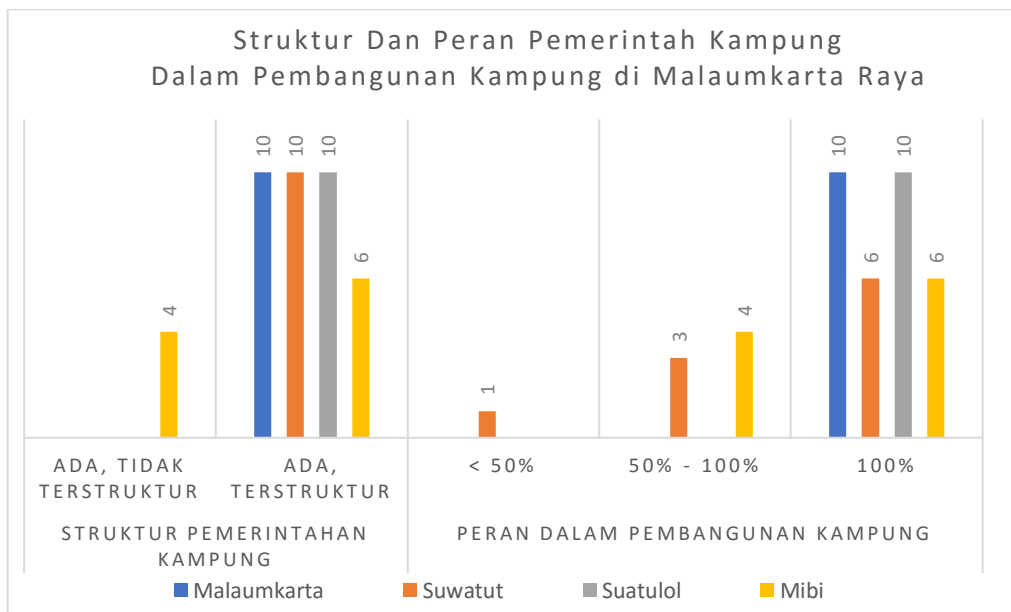
Gambar 86. Struktur dan Peran Pemerintah kampung dalam Pembangunan Kampung di Misool Utara

Peran pemerintah kampung juga terlihat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat serta menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Masyarakat di lima kampung Misool Utara Salafen, Aduwey, Solal, Waigama dan Atkari memberikan penilaian terhadap peran pemerintah kampung dalam pemberdayaan dan kesehatan serta pendidikan adalah 50-100%, artinya pemerintah kampung di Misool Utara telah mengupayakan pemberdayaan dalam bidang kesehatan dan pendidikan di kampung (Gambar 87). Beberapa masyarakat menilai dibawah 50% hanya ditemukan di kampung Solal dan Salafen untuk peran pemerintah dalam kegiatan pemberdayaan, sedangkan untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat penilaian peran di bawah 50% hanya sebagian kecil ditemukan di kampung Atkari.



Gambar 87. Peran Pemerintah kampung dalam Kegiatan pemberdayaan kesehatan dan Pendidikan Masyarakat di Misool Utara

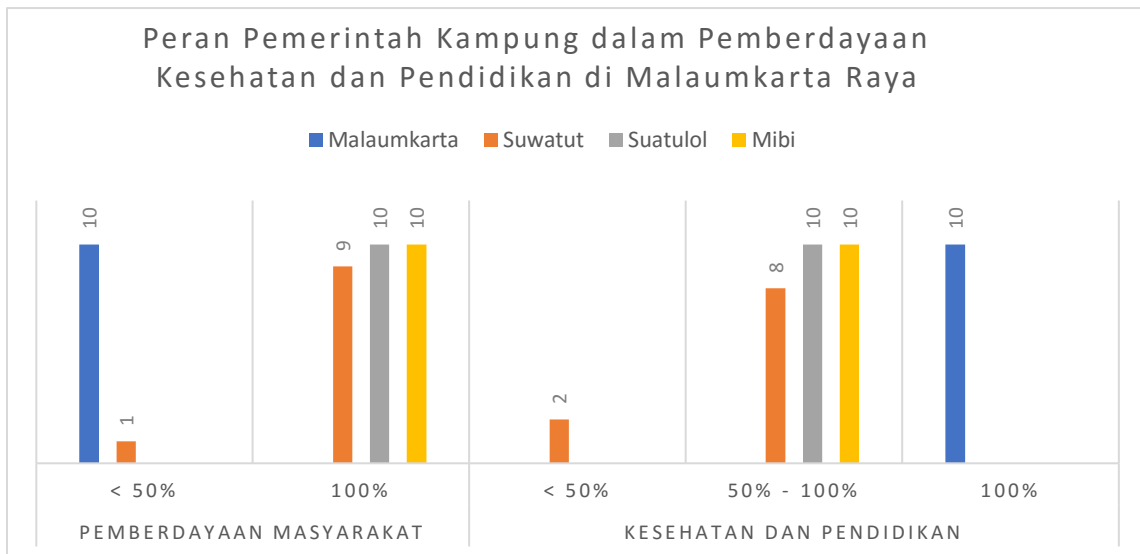
Struktur pemerintah kampung di 4 kampung yang terdapat di wilayah malaumkarta raya telah terstruktur dengan baik. Sebagian responden di Kampung Mibi, 30% menjelaskan bahwa struktur pemerintahan kampung di Mibi ada tapi belum terstruktur dengan baik, hal ini menyangkut kurang efektifnya pelayanan dikantor kampung (Gambar 88)



Gambar 88. Struktur dan Peran Pemerintah kampung dalam Pembangunan Kampung di wilayah Malaumkarta Raya

Peran pemerintah kampung dalam pembangunan kampung di Malaumkarta Raya dinilai bahwa pemerintah berperan secara aktif ditunjukkan dengan responden memberikan penilaian sebesar 100%. Pelayanan yang cukup diberikan nilai oleh responden di kampung Mibi dan Suwatut (50-100%) sedangkan peranan yang kurang hanya ditemukan pada responden di Kampung Suwatut (50%).

Secara umum dapat dinyatakan bahwa pemerintah kampung telah menjalankan perannya sebagai lembaga pemerintahan yang mengayomi masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat 100% telah dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat di Malaumkarta Raya. Masyarakat di Kampung Suwatutu, Mibi dan Suatulol menilai pemerintah kampung 100% melaksanakan tugas pemberdayaan kepada masyarakat di kampung dengan baik. Masyarakat di kampung Malaumkarta menilai kegiatan pemberdayaan oleh aparat kampung masih di bawah 50% atau kurang melaksanakan kegiatan pemberdayaan dengan baik kepada masyarakat.

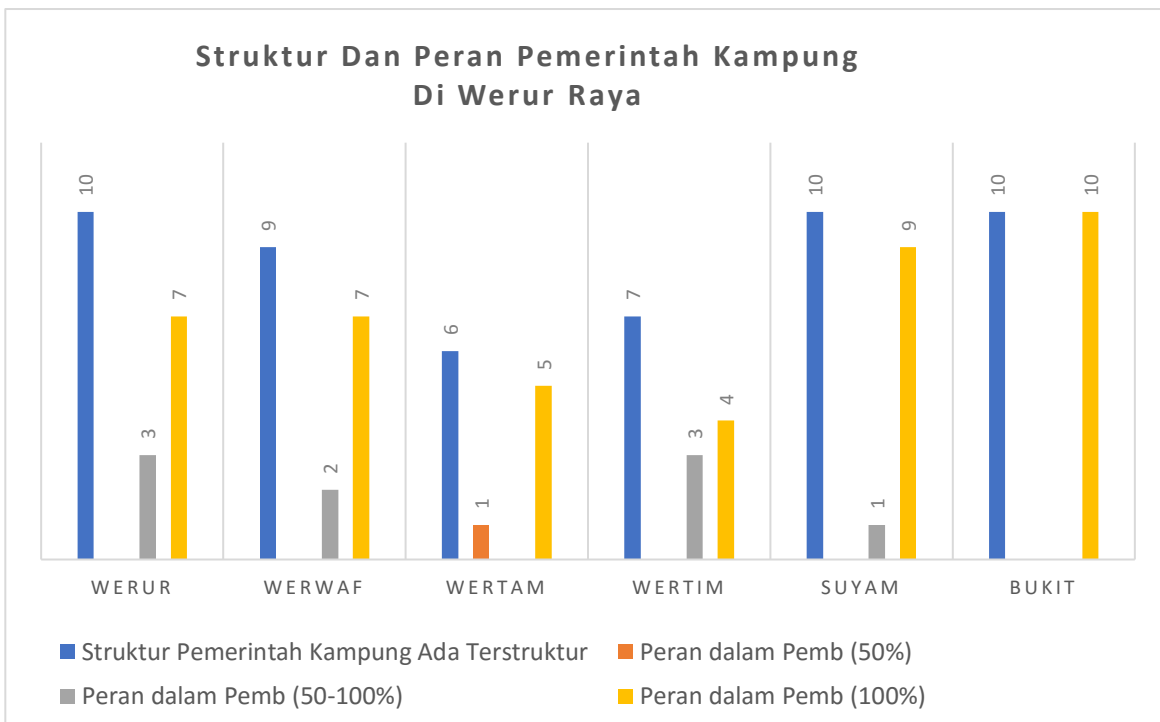


Gambar 89. Peran Pemerintah kampung dalam pemberdayaan, kesehatan dan pendidikan masyarakat di Malaumkarta Raya

Peranan pemerintah kampung dalam melaksanakan pembangunan dibidang kesehatan dan pendidikan dinilai oleh masyarakat di Kampung Malaumkarta adalah 100% telah dilaksanakan. Untuk Kampung Mibi, Suatulol dan Suwatut menilai peran pemerintah belum maksimal sehingga mereka memberikan penilaian sebesar 50%-100%. Hal ini dapat terlihat kurangnya guru serta kelengkapan fasilitas belajar didalamnya. Di kampung Suwatut sebagian masyarakat memberikan penilaian peran pemerintah dalam pembangunan di aspek kesehatan dan pendidikan adalah

dibawah kurang (<50%). Hal ini dikarenakan pelayanan pusat kesehatan yang masih kurang terpenuhi, keterbatasan layanan kesehatan dan sarana pendidikan yang perlu diperhatikan.

Penilaian masyarakat terhadap peran pemerintah kampung di wilayah Werur dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparat negara adalah telah terlaksana, beberapa responden memberikan penilaian cukup berperan, namun pada umumnya pemerintah kampung di werur raya telah melaksanakan tugas dan fungsinya hal ini juga didukung dengan organisasi pemerintahan kampung yang terstruktur di setiap kampung yang ada (Gambar 90)

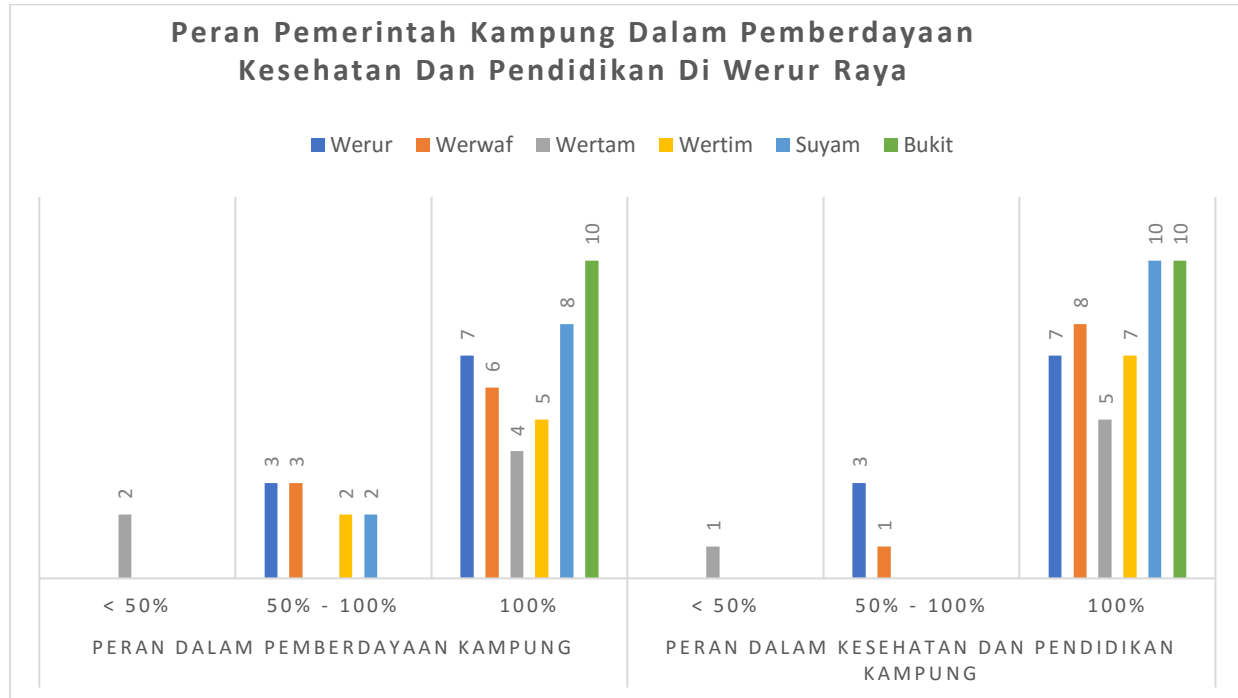


Gambar 90. Struktur dan Peran Pemerintah kampung dalam Pembangunan Kampung di wilayah Werur Raya

Peran pemerintah kampung terlihat dari adanya dukungan pemerintah kampung dalam pemberdayaan masyarakat dalam mendukung fasilitas kesehatan dan pendidikan di kampung. Terdapat PUSKESMAS dan Sekolah menunjukkan adanya perhatian pemerintah dalam menjamin masyarakat kampung agar mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang cukup.

Kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat juga didukung dengan ketersediaan dana Desa/kampung yang dialokasikan dalam bentuk program dan fasilitas yang dapat dirasakan oleh masyarakat kampung. Di wilayah Werur Raya terlihat bahwa peran pemerintah kampung dalam

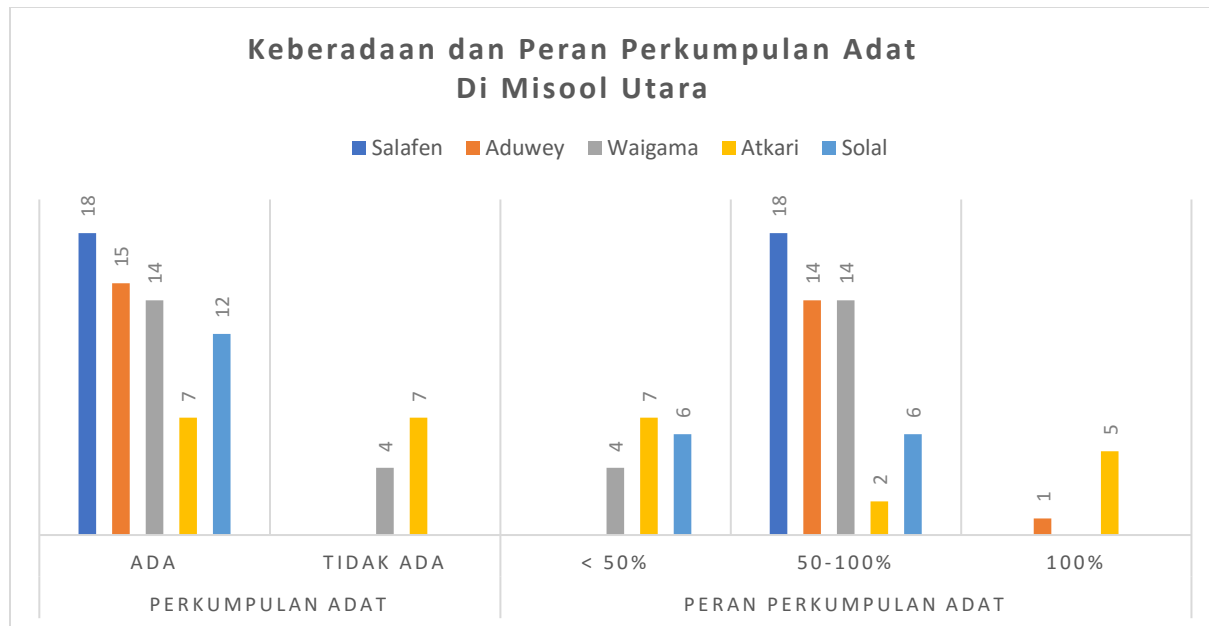
mendukung pemberdayaan dinilai oleh responden/masyarakat telah dijalankan 100% dan untuk mendukung kesehatan dan pendidikan juga telah dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan memberikan penilaian 100% terhadap peran pemerintah kampung (Gambar 91).



Gambar 91. Peran Pemerintah kampung dalam pemberdayaan, kesehatan dan pendidikan masyarakat di Werur Raya

#### 4.1.6. Kelembagaan ADAT

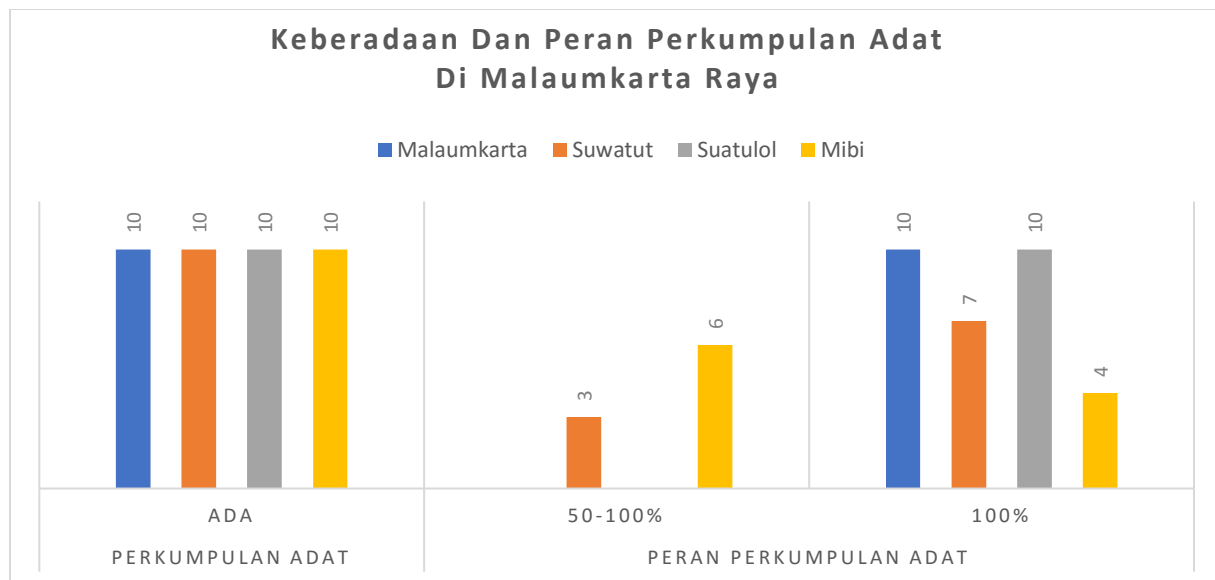
Keberadaan sebuah lembaga atau organisasi tidaklah hanya soal keberadaannya tetapi menyangkut perannya dalam kehidupan masyarakat. Seperti halnya kelembagaan adat di Misool Utara. Responden di lima kampung pengamatan mengakui keberadaan lembaga adat dalam masyarakat serta peranannya (Gambar 92). Lembaga Adat di setiap kampung memiliki peran dalam menangani masalah masalah yang berhubungan dengan adat seperti menyangkut persoalan perkawinan (mas kawin), hak kepemilikan atas tanah dan air serta masalah yang berhubungan dengan tatanan kehidupan adat istiadat.



Gambar 92. Keberadaan dan Peran Perkumpulan Adar di Misool Utara

Peran lembaga adat dinilai oleh masyarakat telah menjalankan fungsinya dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat yang terkait dengan persoalan adat (50-100%) pengakuan dari responden, walaupun ditemukan pengakuan masyarakat Misool yang berada di bawah 50% tentang peranan lembaga adat di kampung Waigama, Atkari dan Solal. Mereka menilai bahwa peran lembaga adat belum maksimal walaupun sebagian besar telah mengakui peran lembaga adat tersebut. Beberapa responden walaupun dalam jumlah yang sedikit mengakui secara penuh 100% bahwa lembaga adat di kampung sangat berperan dalam kehidupan masyarakat, ditemukan di Kampung Aduwey dan Atkari.

Pada wilayah adat Malaumkarta di 4 kampung pengamatan ditemukan adanya perkumpulan adat. Masyarakat yang mendiami wilayah Malaumkarta Raya adalah mereka yang bersal dari suku Moi Keling. Peranan perkumpulan adat di 4 kampung berperan secara aktif dimana kampung Malaumkarta dan Suatulol memberikan penilaian 100%, Suatut dan Mibi memmberikan nilai 100% tetapi hanya beberapa responden yang lainnya memberikan penilaian di antara 50-100%. Berarti peran perkumpulan adat belum maksimal dilaksanakan pada kampung Suwatut dan Mibi (Gambar 93)

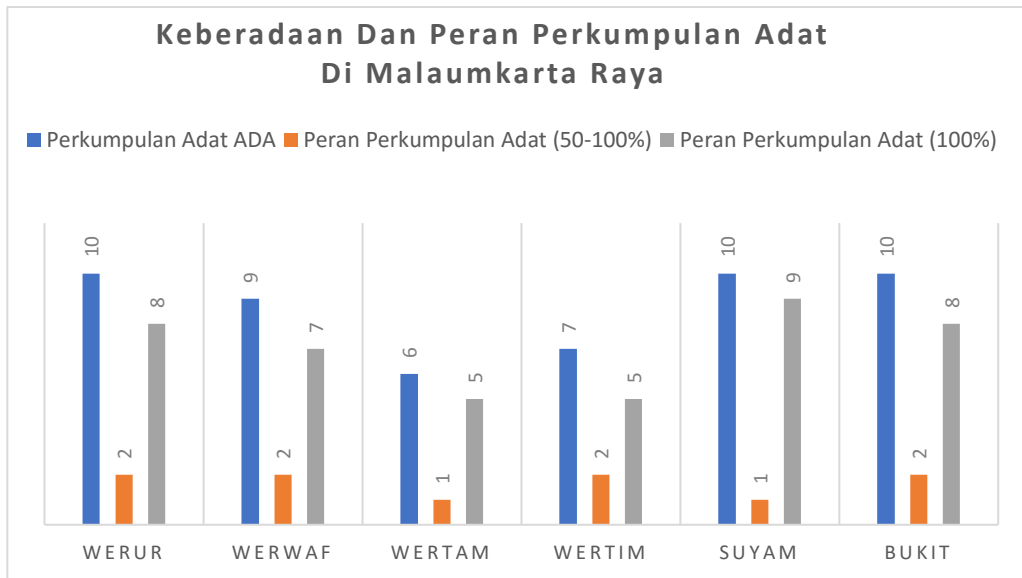


Gambar 93. Keberadaan dan Peran Perkumpulan Adat di Malaumkarta Raya

Selain di wilayah Misool Utara, dan Malaumkarta Raya, wilayah Werur Raya keberadaan dan peran perkumpulan adat juga ditemukan di enam kampung pengamatan. Masyarakat Werur Raya menilai bahwa peranan perkumpulan adat sangat efektif di kampung (100%). Peran Perkumpulan adat adalah menyelesaikan masalah masalah yang terkait dengan persoalan adat, mempererat ikatan kekeluargaan dalam satu suku dan menyangkut pelaksanaan sasi sumberdaya di Kampung.

Perkumpulan adat merupakan salah satu modal sosial yang dimiliki masyarakat dimana kebersamaan dan nilai sosial kultural dibangun. Masyarakat di werur raya berasal dari Suku Byak Karon (Bikar) yang mendiami wilayah Werur Raya dan disebut sebagai suku pendatang oleh masyarakat suku Abun. Suku Bikar ini terdiri dari 5 marga yakni Mambrasar, Mayor, Yapen, Paraibabo Sarwa dan Merino. Oleh karenanya kesatuan dalam satu suku sebagai kekuatan sangat penting didalam kehidupan masyarakat.





Gambar 94. Keberadaan dan Peran Perkumpulan Adat di Werur Raya

Dalam konteks ini, Komunitas Bikar, yang hidup di 8 kampung di Distrik Bikar, Kabupaten Tambrauw merupakan salah satu komunitas yang memiliki ragam budaya dan tradisi, khususnya yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Salah satu yang terkenal adalah praktik *Sasi Laut* dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut, seperti halnya di Malaumkarta Raya dan Misool Utara praktek sasi telah diterapkan sebagai bagian dalam mengelola sumberdaya pesisir dan Pulau Pulau Kecil di wilayah KKP.

Praktek *Sasi* laut memberi ruang keadilan distribusi sumberdaya secara komunal, juga keadilan ekologis karena sumberdaya dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan ekosistem perairan tetap dijaga. Praktik *Sasi* sangat rentan terhadap perubahan sosial baik yang terjadi di internal masyarakat maupun tekanan eksternal dari luar masyarakat. Beberapa kasus hilangnya praktek sasi laut di desa-desa adat di Maluku menjadi fakta ancaman perubahan dimaksud. Untuk itu diperlukan sebuah rencana aksi bagi pemberdayaan masyarakat adat Komunitas Bikar agar dapat mempertahankan keberlanjutan *Sasi* ke depannya.

#### 4.1.7. Struktur kelembagaan Adat

Di sebagian besar Wilayah Asia-Pasifik, perikanan pesisir dikelola secara tradisional oleh sistem hak milik berbasis masyarakat dan rezim hak serta aturan terkait yang mencerminkan organisasi sosial dan struktur kekuasaan lokal. Karena properti atau kepemilikan adalah

hubungan sosial yang mendefinisikan keamanan pemegang hak atas klaim atas sumber daya atau layanan atau manfaat yang diberikannya, sistem seperti itu mencerminkan korelasi antara properti, hak milik, dan organisasi sosial (Ruddle 1988).

Dalam sistem kepemilikan bersama berbasis masyarakat tradisional dari pengelolaan sumber daya laut, hak individu atas laut bergantung pada status sosialnya dalam komunitas perusahaan, yang berkisar dari desa melalui klan, sub-klan, dan garis keturunan, hingga keluarga. Wilayah sumber daya dan grup pengguna ditentukan. Penggunaan sumber daya diatur oleh aturan dan dikendalikan oleh otoritas tradisional yang memberikan sanksi dan hukuman untuk pelanggaran peraturan. Konservasi untuk pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan merupakan tujuan yang tersebar luas dari sistem ini (Ruddle 1988; 1994a).

Kondisi kepemilikan sumberdaya pesisir dan pengakuan atas kehidupan masyarakat adat di atas tanahnya juga terjadi di wilayah Papua. Sumberdaya perikanan, laut dan pulau-pulau kecil di wilayah Papua sangat identik dengan hak kepemilikan manusia atas tanah atau yang disebut sebagai hak kepemilikan. Kelembagaan yang terbentuk di masyarakat terbentuk dalam kelembagaan formal bahkan kelembagaan non formal yang kemudian dikenal dengan sebutan aturan sebagai norma yang mengikat suku bangsa dalam sebuah komunitas. Implementasi dari norma atau nilai yang dipercayai turun temurun dapat terlihat dari model pemanfaatan dan pengelolaan yang dilakukan masyarakat adat pada wilayah adat atau hak ulayat mereka.

Sistem kepemimpinan tradisional di wilayah Papua Barat dapat dibagi menjadi dua bentuk kepemimpinan tradisional yaitu sistem kerajaan dan sistem campuran. Ciri utama dari sistem kerajaan adalah kedudukan pemimpin menurut tradisi diwariskan kepada anak laki sulung dari pemimpin yang sedang berkuasa. Jika tidak ada anak laki-laki atau dianggap tidak memenuhi syarat karena disabilitas fisik dan mental, maka kedudukan tersebut dapat dijabat oleh adiknya atau saudara saudara laki-laki ayah (paman). Selain dari pada itu, ruang lingkup kekuasaan raja dapat dikatakan cukup luas dan bisa mencakup beberapa kampung, walaupun secara bahasa tidak berasal dari satu keturunan yang sama dan berlainan secara kampung. Kebudayaan ini merupakan akulturasi antara kebudayaan Papua dan kebudayaan Maluku. Bentuk sistem kepemimpinan kedua adalah sistem kepemimpinan campuran (Rare, 2018).

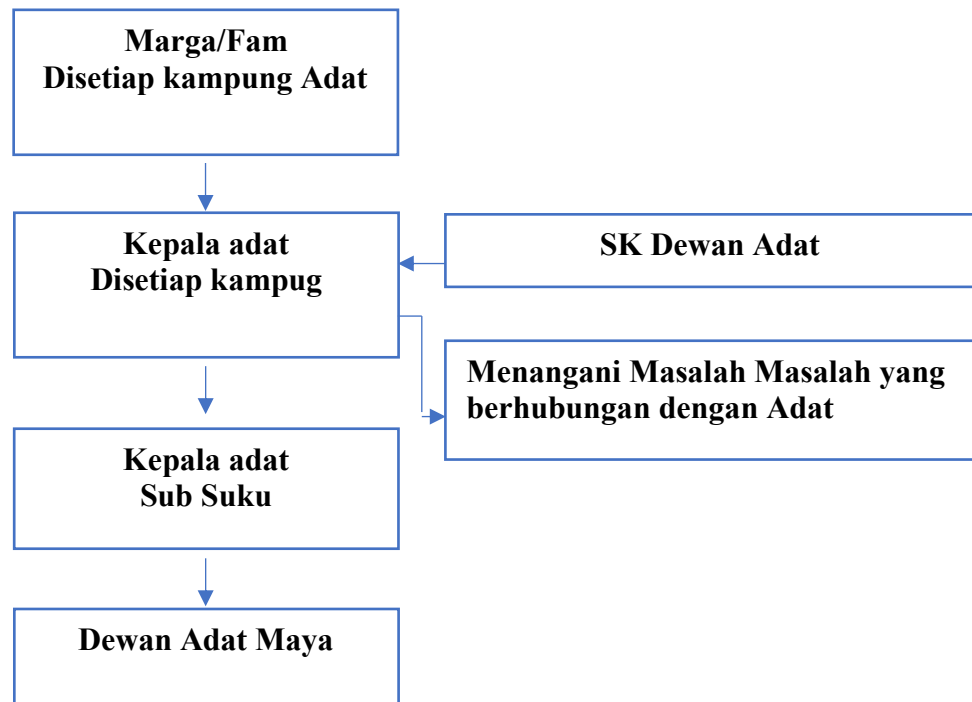
Sistem kepemimpinan campuran menjadikan posisi pemimpin tidak selalu berasal dari garis keturunan saja, tetapi sekali-kali dapat berpindah ke orang lain yang memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang timbul pada situasi tertentu. Secara mendasar, perbedaan kedua azas kepemimpinan tersebut dapat dilihat pada prinsip mendapatkan kedudukannya. Ada yang mendapatkan kedudukan kepemimpinan melalui prinsip pewarisan hak kekuasaan dan mendapatkan legitimasi melalui mitologi (religi) dan keturunan. Suku-suku yang memegang prinsip pewarisan kepemimpinan yaitu suku-suku di Raja Ampat, seperti: orang Kawe, Maya, Matbat, Moi, dan Besar.

Kepemimpinan adat di Teluk Mayalibit Raja Ampat, dilakukan dengan cara pemilihan Kepala Adat. Proses pemilihan Kepala Adat di kampung-kampung di dalam maupun di luar Teluk Mayalibit telah menghasilkan Kepala Adat yang kemudian dikukuhkan oleh Dewan Adat Suku (DAS) Maya. Tiga Tungku merupakan model kepemimpinan yang berkembang di setiap kampung Teluk Mayalibit. Komponen dari Tiga Tungku ini adalah Kepala Adat, Kepala Kampung (Administratif) dan Kepala/Tokoh Agama. Model kepemimpinan Tiga Tungku sudah berjalan baik selama bertahun-tahun dalam mengatur pranata sosial di dalam masyarakat.

Kepala Kampung adalah tokoh yang telah memimpin secara politis dan menjaga norma kampung, serta dipilih oleh masyarakat. Kepala Kampung wajib menjalankan tugas secara teguh, tegas, dan disiplin. Sedangkan Kepala Adat adalah sosok yang dihormati berdasarkan garis keturunan atau marga, dan juga karena kharisma dan hikmatnya dalam menjaga kehidupan sosial di antara marga-marga di kampung. Kepala Adat adalah figur otoritas yang kuat yang dituntut untuk mempertahankan pengetahuan dan praktik tradisi adat, dan menyampaikan pengetahuan ini kepada generasi baru. Kepala Adat biasanya bertanggung jawab pada kehidupan sosial dan penerapan adat istiadat. Jaringan Pemimpin Adat memiliki jangkauan eksternal sampai ke tingkat kabupaten melalui Dewan Adat Suku Maya Raja Ampat.

Tokoh Agama adalah pemimpin lembaga keagamaan atau individu yang berperan dalam menjaga norma kehidupan, norma agama dan mendorong perilaku yang baik terhadap kebutuhan masyarakat. Tokoh Agama muncul sebagai pilihan masyarakat atau karena status agamis yang menjadikan mereka sebagai pemimpin di agamanya.

Mengacu pada bentuk prinsip sistem pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang dijelaskan oleh Ruddle, 1988) menggambarkan persamaan masyarakat pesisir di wilayah asia pasifik termasuk di dalamnya Papua (Gambar 95).



Gambar 95. Struktur kelembagaan Adat suku Maya

Dalam struktur kelembagaan adat suku maya posisi masyarakat adat menempati ruang yang tinggi sebagai pemilik tanah dan sumberdaya diwilayah adatnya. Tanah sebagai mama/ibu merupakan hal yang sacral/vital bagi semua komunal. Tanah merupakan identitas suatu komunitas yang diwariskan turun temurun sejak leluhur sampai generasi berikutnya.

Kelompok masyarakat yang termasuk dalam marga/fam yang dikenal dengan istilah klan dipimpin oleh kepala adat yang diberikan SK atau yang dipilih oleh Dewan Adat suku Maya. Tugas kepala adat adalah mengatur dan memutuskan masalah masalah adat selain masalah adat dalam komunitas suku tetapi juga yang termasuk didalamnya interaksi masyarakat adat dengan sumberdaya diwilayah adatnya. Kepala adat disetiap kampung melaksanakan peradilan adat bersama kepala adat sub suku serta menangani masalah masalah sosial yang ada di masyarakat.

Tingkat selanjutnya adalah Kepala adat sub suku yang akan mengatur masalah masalah adat yang ada didalam sebuah sub suku. Sub suku merupakan gabungan beberapa suku dalam sebuah komunitas yang lebih besar. Struktur selanjutnya adalah Dewan Adat Suku Maya. Dewan adat tugasnya adalah mengakomodir dan memberikan tugas kepada kepala kampung adat dan kepala adat sub suku.

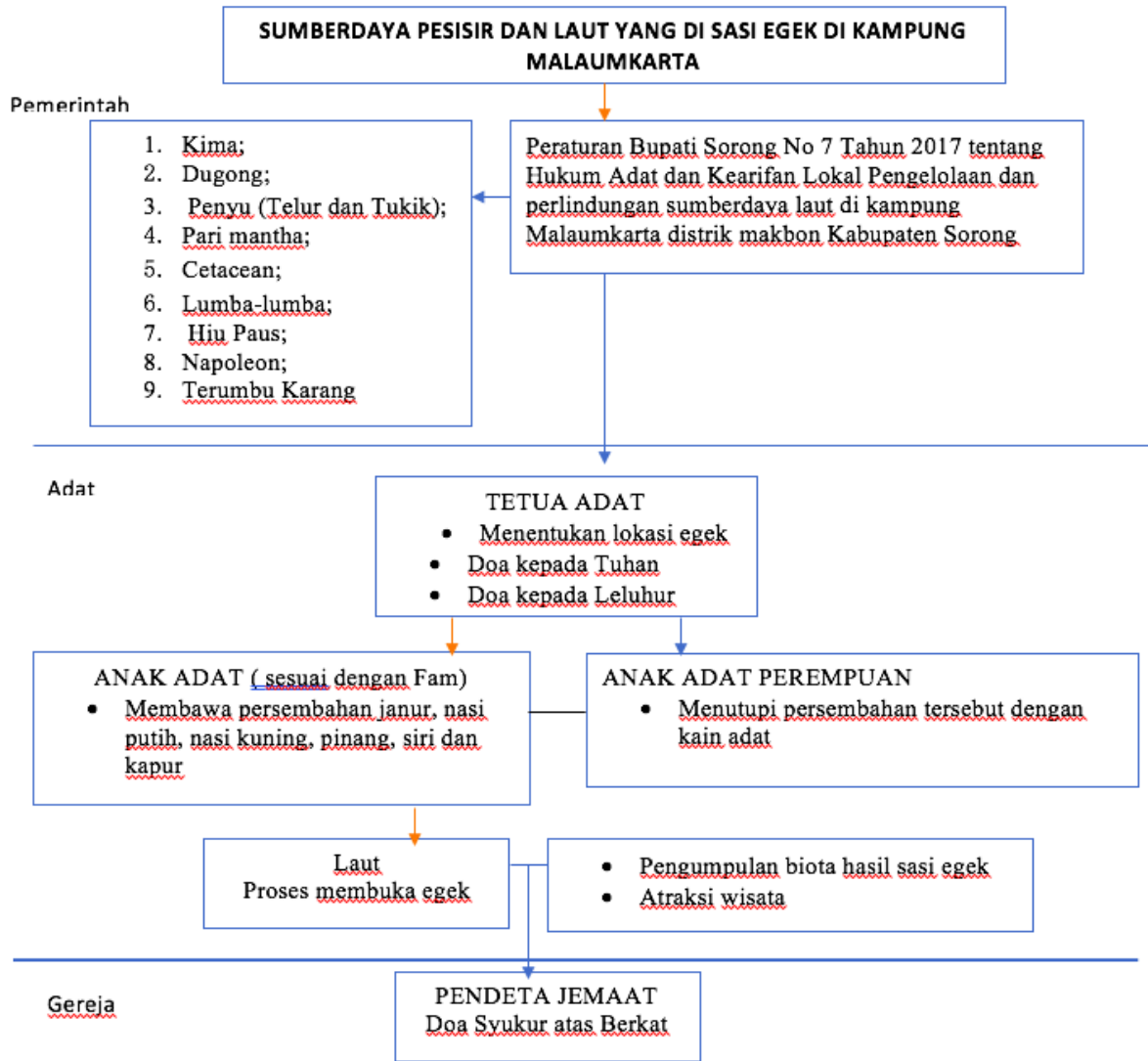
Peran serta pemerintah, lembaga adat dan gereja secara aktif dalam proses implementasi sasi egek di kampung Malaumkarta. Prosesi sasi egek dimulai dengan upacara Adat, dipimpin oleh beberapa Tetua Adat secara bersama-sama memanggil dan menyebut nama dari lokasi yang dilindungi serta memohon kepada Tuhan sebagai pencipta, tanah dan laut sebagai tempat mencari hidup manusia serta memohon kepada leluhur sebagai pemberi warisan

Waktu penutupan sasi egek dilakukan selama 1 tahun, proses membuka egek juga pihak adat melibatkan pemerintah Kabupaten Sorong biasanya diberikan kesempatan memberikan sambutan serta Pihak Gereja (Pendeta Jemaat) setempat untuk memimpin doa sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas kekayaan sumberdaya yang ada di Kampung Malaumkarta.

Kelembagaan atau sistem dalam pelaksanaan sasi egek melibatkan kelembagaan formal (pemerintah Kabupaten Sorong, pemerintah Kampung Malaumkarta) dan kelembagaan non formal yakni sebuah sistem yang terstruktur dari peran setiap masyarakat adat dalam menjalankan sasi egek ini. Upacara pembukaan egek dipimpin oleh Tetua adat untuk menentukan lokasi mana yang akan dibuka egeknnya serta menaikan Doa kepada Tuhan sebagai pencipta dan memohon kepada leluhur sebagai pemberi warisan. anak-anak adat dari perwakilan masing-masing marga (nama keluarga) yang ada di kampung ini. Marga-marga tersebut adalah Mubalen, Magablu, Malasamuk, Kalami, Sapisa, Su, Salamala, dan Do.

Anak-anak adat ini memakai kain adat di leher dan berdiri menghadap ke semacam persembahan yang telah disiapkan yang terdiri dari janur, nasi kuning, nasi putih, pinang, kapur, dan sirih. Kemudian beberapa perempuan dari anak-anak adat menggantungkan kain adat di atasnya persembahan tersebut. Setelah selesai menggantungkan kain adat, persembahan kemudian dibawa menuju laut untuk dihanyutkan seiring doa kepada Yang Kuasa dalam bahasa Moi. Maksud dari ritual ini adalah agar pada saat masyarakat melakukan penangkapan dapat memperoleh hasil yang melimpah dan juga tidak mengalami gangguan atau hambatan hingga

dilakukan tutup *Egek* nantinya. Pada bagian akhir, ketika semua ritual buka *Egek* dilaksanakan maka kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin langsung oleh Pendeta Jemaat GKI Silo Malaumkarta (Gambar 96).



Gambar 96. . Struktur kelembagaan pengelolaan Sumberdaya ikan secara tradisional (Sasi Egek) di wilayah MHA Malaumkarta Sorong

Kelembagaan adat komunitas Bikar dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut *mananwir*. Dalam menjalankan tugas menjalankan hukum adat, *mananwir* dibantu oleh seorang *karani* dan 5 orang *mampapok*. *Mampapok* bertugas memimpin marganya, mulai dari mengatur pemanfaatan sumberdaya untuk aktivitas bertani/berkebun dan atau melaut, pendidikan anak-anak, hingga menyelesaikan konflik intern marga.

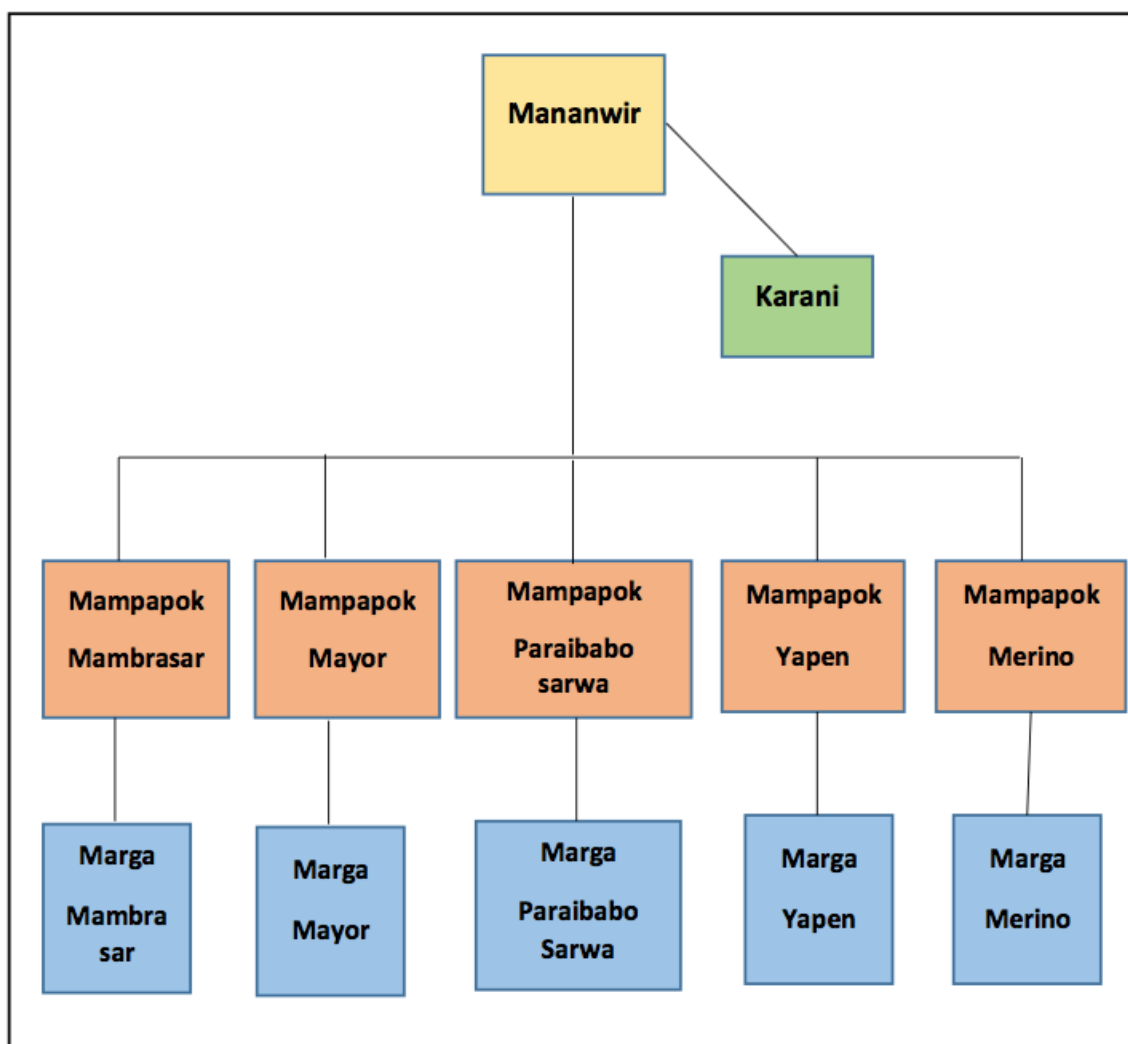
Permasalahan yang terjadi di dalam marga menjadi tugas *mampapok* dalam menyelesaikan. Hanya apabila ada permasalahan yang sampai kepada pertumpahan darah, atau permasalahan antar marga, maka *mananwir* akan turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. Dalam suatu marga, *mampapok* sangat dihormati, karena peran besar dan pentingnya dalam mengatur marganya. Status sebagai *mananwir* dan *mampapok* tidak bisa diberikan kepada siapa saja. Seorang yang hendak ditunjuk sebagai *mananwir* dan *mampapok* haruslah memiliki garis keturunan/silsilah yang jelas, dan merupakan keturunan dari *mananwir* dan/atau *mampapok* pada masa-masa sebelumnya.

Dahulu kala, dalam memilih *Mananwir* dan *Mampapok*, masyarakat mendapatkan ilham yang akan menunjukkan siapa yang pantas untuk menempati jabatan tersebut. Masyarakat Biak meyakini bahwa ada roh yang akan memberi petunjuk bahwa seseorang harus menjadi *mananwir* atau *mampapok*. Pada masa itu, sebelum penetapan/pemilihan *mananwir* dan *mampapok*, masyarakat akan melakukan ritual/*Wor fan nanggi*, dimana mereka membangun sebuah *para-para* tinggi (menara), lalu mereka akan meletakkan berbagai jenis makanan di atasnya, dan membuat permohonan ke langit. Petunjuk yang diterima biasanya datang melalui seorang tetua kampung berupa mimpi yang akan memberi petunjuk siapa yang pantas dipilih sebagai *mananwir* atau *mampapok*. Petunjuk yang datang melalui mimpi tetua kampung tersebut harus diterima dan ditaati oleh masyarakat.

Pada kisaran tahun 1979 berdasarkan penuturan Willem Yapen, masyarakat Papua termasuk komunitas Bikar saat itu pun mulai menjauhi dan meninggalkan sistem pemerintahan adat. Tidak ada lagi pemerintahan oleh *mananwir*, semua dilakukan oleh kepala kampung yang mewakili pemerintahan pusat di tingkat terendah setelah distrik. Pemerintahan adat di Distrik Bikar mulai dihidupkan kembali sejak tahun 2015, dengan pertimbangan bahwa adat tidak bisa dihilangkan dari komunitas Bikar. Adat yang direpresentasikan oleh kepala suku (*mananwir*) menjadi bagian penting dalam simbol 3 tungku bagi masyarakat Papua khususnya komunitas Bikar, bersama dengan pemerintahan kampung dan pemimpin keagamaan (gereja).

Saat upacara buka *sasi*, kedua bambu akan diambil kembali, dan saat berdo'a *mananwir* akan menyampaikan bahwa *Sasi* akan dibuka dan sumpah pelarangan pengambilan biota yang *disasi* diangkat. Potongan bambu tadi boleh dibuang ke laut atau disimpan (ditaruh saja di suatu

tempat di darat). Potongan bambu lebih sering disimpan karena bila dibuang ke laut, menurut keyakinan mereka maka hasil laut akan ikut hanyut terbawa arus laut. *Sasi* selain dilakukan saat ketiga jenis biota mulai langka, juga dilakukan saat ada kebutuhan misalnya untuk pembangunan fasilitas umum masyarakat (misal gereja), dan juga saat akan memasuki musim ombak. Biasanya lama *Sasi* berkisar antara 1-2 tahun. Tidak pernah dilakukan lebih dari 2 tahun, karena berdasarkan keterangan Moses Paraibabo, pada umur 2 tahun lobster yang disasi bisa mati dan akhirnya akan merugikan *Sasi*.



Gambar 97. Struktur Pemerintahan Adat Komunitas Bikar  
 (Sumber : Pemetaan dan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat Komunitas Bikar di Distrik Bikar Kabupaten Tambrau , KKP, 2018)



Sejak tahun 2000, upacara *Sasi* dilakukan dengan keterlibatan Gereja. Pada saat upacara, tidak lagi digunakan media bambu, melainkan hanya do'a yang dipimpin oleh Pendeta. Sebelum pelaksanaan upacara *sasi*, akan ada rapat yang melibatkan gereja, kepala kampung dan *mananwir* serta *mampapok* untuk menetapkan waktu tutup *sasi* dan pendeta mana yang akan membacakan doa. Berdasarkan uraian diatas, maka secara garis besar ada 4 titik peristiwa penting bagi komunitas Bikar dalam kaitannya dengan pelaksanaan *Sasi* dan perjalanan hukum adat di tengah komunitas adat Bikar.

Pada tahun 1846, hukum adat hidup ditengah masyarakat. Pada masa itu, masyarakat yang masih tinggal di Pulau Dua masih belum mengenal agama. Masyarakat menerapkan kehidupan yang sarat dengan praktik tradisional. Hukum adat menjadi aturan baku yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat kala itu, hingga masuknya Kristen pada tahun 1912, maka secara perlahan pengaruh adat mulai mengalami akulturasi dengan agama protestan. Beberapa dipertahankan, sementara yang bertentangan dihapuskan, sebagai misal tradisi "ganti manusia" mulai ditinggalkan sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu.

Pada tahun 1976, masyarakat mulai mempraktikkan *Sasi*, dengan mengikuti pola tradisional sebagaimana dipraktikkan di daerah asal masyarakat di Biak. Pada masa ini, adat memegang peran utama dalam aktivitas *sasi*, terutama saat upacara. Pada tahun 1979, *Sasi* tidak lagi dijalankan, karena segala hal yang berbau 'adat' harus ditanggalkan, mengikuti amanat penyeragaman sistem pemerintahan desa pada Rezim Soeharto. Nilai-nilai tradisional masyarakat terkekang pada masa itu, bahkan tidak sedikit yang mengalami trauma bahkan hanya sekedar untuk menyebut kata "adat/tradisi" dan sejenisnya.

Kemudian pada tahun 2000, *Sasi* mulai dihidupkan kembali, karena kesadaran masyarakat bahwa nilai tradisi mereka harus dihidupkan kembali demi menjaga keberlanjutan sumberdaya alam mereka. *Sasi* sejak masa itu, tidak hanya dijalankan oleh lembaga adat, namun melibatkan tiga pihak penting yakni lembaga adat, pemerintahan kampung dan gereja, yang dikenal dengan sebutan tiga tungku.

## **BAB V.**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **KESIMPULAN**

- Survei sosial ekonomi di Kawasan Konservasi Perairan Misool Utara, Malaumkarta Raya dan Werur Raya dilaksanakan di 15 kampung pengamatan dengan jumlah responden 170 orang.
- Responden yang terpilih adalah mereka yang menetap di Kampung sebagai penduduk tetap dengan Mata pencaharian utama adalah nelayan, petani dan sumber mata pencaharian lainnya yang dikerjakan oleh masyarakat di kampung.
- Sumber mata pencaharian Utama masyarakat di KKP Misool Utara adalah sebagai nelayan, sedangkan di MHA Malaumkarta dan MHA Werur adalah sebagian besar sebagai Petani.
- Suku asli sebagai pemilik hak ulayat wilayah KKP Misool Utara adalah suku Matbat, diwilayah MHA malaumkarta adalah suku Moi Kelim dan di MHA Werur adalah Suku Bikar atau Biak Karon.
- Kelembagaan lokal yang memipin dan mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakat di tiga wilayah pengamatan ini dikenal dengan sebutan Tiga Tungku, yakni Pihak Gereja, Pemerintah Kampung dan Lembaga Adat di Kampung. Tanggung jawabnya disesuaikan dengan peran dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.
- Peran perempuan dalam memberikan pendapat atau sebagai responden di tiga wilayah pengamatan menunjukkan perempuan telah memiliki ruang untuk ikut berpartisipasi dalam menyampaikan hak hak dasarnya sebagai perempuan di Kampung.
- Usia produktif sebagai tenaga kerja di kampung tersedia di tiga wilayah pengamata jika dilihat usia hidup terbanyak berada pada kelompok umur 21– 50 tahun.
- Praktek modal sosial seperti kerja sama di kampung-kampung wilayah survei masih terlihat kuat. Masyarakat menyadari bahwa dalam menjalankan kehidupan itu membutuhkan orang lain.
- Praktek sasi terhadap sumberdaya perikanan di KKP Misool Utara, MHA Malaumkarta dan MHA Werur masih dijalankan sampai pengamatan ini di lakukan.
- Kecukupan pangan dan ketersediaan pangan lokal di kampung kampung sangat potensial, tidak pernah terjadi kekuarangan makanan di rumah tangga yang ada di kampung kampung pengamatan
- Tingkat pendidikan masyarakat di tiga wilayah pengamatan rata rata telah mengenyam pendidikan sekolah dasar, bahkan ada yang telah menamatkan Pendidikan Tinggi.

## REKOMENDASI

- Pemberdayaan masyarakat adat dengan segala aspek kehidupannya mulai dari mata pencaharian, tata kelola sumberdaya, ekonomi dan politik, budaya dan seni, serta kelembagaan lokal dalam mendukung perlindungan adat dan kebudayaan serta peningkatan kesejahteraan mereka, telah diamanatkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah aksi afirmatif dari berbagai pihak untuk menjalankan amanat tersebut agar tanggung jawab negara melindungi masyarakat adat dapat terlaksana.
- Pengembangan masyarakat adat dan kelembagaannya harus memperhatikan norma, nilai, dan praktek-praktek kearifan lokal (sasi) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari aspek kebudayaan dan adat-istadat masyarakat. Prasyarat ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan upaya kehadiran negara dengan kedaulatan budaya masyarakat adat dalam menata kelola kehidupannya.
- Ketersediaan BBM yang memadai pada tingkat harga yang wajar dan terjangkau oleh nelayan
- Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam aspek perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan melalui pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat.
- Ketersediaan Akses pasar bagi hasil produksi perikanan dan Peningkatan kapasitas produksi perikanan tangkap. Penyediaan sarana listrik/PLN yang memadai untuk menampung hasil tangkapan nelayan sebelum dijual ke Pasar/penadah.
- Ketersediaan Akses terhadap sumber informasi, Akses terhadap teknologi penangkapan dan pengolahan hasil produksi perikanan, pertanian, perkebunan dan pariwisata
- Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk pengembangan aktivitas produksi, pengolahan hasil produksi, dan pemasaran. Mampu menjalankan lembaga ekonomi mikro di kampung seperti Bumkam/Bumdes sehingga persoalan pasar di kampung dapat diatasi melalui penguatan kapasitas untuk menjalankan Bumkam.
- Bentuk Wirausaha sosial untuk tangani distribusi dan pemasaran:  
Wirausaha sosial merupakan usaha yang muncul untuk memecahkan masalah bisnis yang sudah menjadi masalah sosial, yaitu distribusi dan pemasaran. Wirausaha sosial bisa dilakukan oleh individu di kampung yang bermodal, Bumkam, koperasi atau gereja, pabrik ikan tuna yang dimiliki kabupaten atau swasta yang bisa menampung hasil masyarakat.
- Pelatihan produk-produk olahan untuk mencegah rusaknya produk:  
Pada daerah homogen baik agama maupun suku, pihak gereja dan adat menjadi stakeholder kunci yang harus digandeng dalam menjalankan program, namun bagi daerah yang heterogen suku dan agama, pemerintah atau lembaga independen terpercaya yang digandeng dalam program pendampingan dan lain-lain. Melakukan pelatihan untuk pemanfaatan hasil di darat/kebun agar jangan masyarakat terlalu mengeksploitasi laut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S (2002) *Prosedur Penelitian: SUATU PENDEKATAN PRAKTEK*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 243.
- Arida A, Sofyan & Keumala F 2015, ' Studi kasus pada rumah tangga petani peserta program desa mandiri pangan di kecamatan indrapuri kabupaten aceh besar', *Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Berdasarkan Proporsi Pengeluaran Pangan dan Konsumsi Energi*, *Agrisep* Vol. 16, No. 1
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong 2021, Distrik Bikar dalam Angka
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong 2021, Distrik Makbon dalam Angka
- Badan Pusat Statistik Indonesia 2002, *Pendataan Potensi Desa/Kelurahan 2003*  
<https://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/3071/datafile/F1/V20> Diakses: 22 Desember 2021
- Boclaars J.H.M.C. 1998. *Antropologi Papua*. Jurnal Vol 2 dan 4. ISSN1693-2009
- Deda, A. Jefri & Mofu, Suriel S 2014,' Masyarakat hukum adat dan hak ulayat di provinsi papua barat sebagai orang rang asli papua di tinjau dari sisi adat dan budaya; sebuah kajian etnografi kekinian', *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 11 No. 2, Issn 1412-7040
- Fiona Leverington, Katia Lemos Costa, Jose Courrau, Helena Pavese, Christoph Nolte, Melitta Marr, Lauren Coad, Neil Burgess, Bastian Bomhard, Marc Hockings (2010)
- Fisher, Simon. *et al.* 2001 *Mengelola Konflik; keterampilan & strategi untuk bertindak*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N.Kartikasari,dkk. The British Council, Indonesia, Jakarta.
- Gewab, H. Ch, Andi A. M & Hendriek H. K 2015,'Analisis kebutuhan dan sebaran fasilitas pendidikan tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Tambrauw'. Universitas Samratulangi. Diakses 1 Desember 2021 <https://www.scribd.com/document/365101944/9976-19855-1-SM>
- H Hadari Nawawi. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk bisnis yang kompetitif*. Gadjah Mada University Press
- Hidayat 2015, *PENGAKUAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT* Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 3.
- Indara, S. R, Irwan B & Yuriko 2017, 'Fktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan tangkap di desa Bongo kecamatan Batudaa pantai Kabupaten Gorontalo', *Agrinesia* Vol. 2, No. 1

- Jones, P.J.S, Qiu, W., and De Santo EM (2011). *Governing Marine Protected Areas - Getting the Balance Right*. Technical Report, United Nations Environment Programme
- Jones, P. J. S., Qiu, W., De Santo E.M. (2013). Governing marine protected areas: Social- ecological resilience through institutional diversity. *Marine Policy* 41: 5-13.
- Jouwe, Y. Musa, Afnan E. Troena, Surachman, Margono Setiawan 2011, 'Pengaruh peran tiga tungku (Tokoh pemerintah, Toko Adat dan Tokoh Agama) dalam gaya kepemimpinan terhadap kinerja kerja Aparat kampung di Kota Jayapura. *Jurnal Aplikasi Manajemen* Vol 9. No 1. Hal: 243-253
- Management effectiveness evaluation in protected areas – a global study. Second edition 2010. The University of Queensland Brisbane AUSTRALIA
- Pemetaan dan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat Komunitas Bikar di Distrik Bikar Kabupaten Tambrauw , KKP, 2018
- Probosiwi, R 2015, 'Perempuan dan perannya dalam pembangunan kesejahteraan sosial (women and its role on social welfare development)', *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara* Vol. 3, No.1, Hal: 41-56
- Rare Indonesia. 2018. Kawasan Perikanan Adat suku Maya di Teluk Mayalibit.
- Rizky A. Prasojo, R.A & Luluk F 2015, 'Peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan desa sedatigede kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo', *JKMP* Vol. 3, No. 1, Hal:49-64 (ISSN. 2338-445X)
- Rolitia, M, Yani A & Wahyu E 2016, 'Nilai gotong royong untuk memperkuat solidaritas dalam kehidupan masyarakat kampung naga', *Jurnal Pendidikan Sosiaologi* Vol. 6, No.1
- Ruddle, K. 1994a. Local Knowledge in the Future Management of Inshore Tropical Marine Resources and Environments. *Natural and Resources* 30(1), 28-37.
- Ruddle, K. 1988. Social Principles Underlying Traditional Inshore Fisheries Management Systems in the Pacific Basin. *Marine Resource Economics* 5(4): 351-363

2. LAMPIRAN : ALBUM FOTO

FASILITAS UMUM KAM. ADUWEY



Podok Baca Itbehe Aduwey



GKI Imanuel Aduwey(S1° 59.044' E129° 54.480')



SD YPK Syalom Aduwey(S1° 59.120' E129° 54.625')

FASILITAS UMUM KAM. ATKARI



GKI Viadolorosa Atkari (S1° 43.802' E130° 04.444')



Masjid Al-Hidayah Atkari (S1° 43.751' E130° 04.573')





SD Negeri 24 Atkari (S1° 43.833' E130° 04.483')



PAUD Ngalupo Atkari (S1° 43.817' E130° 04.554')



PLTS Atkari (S1° 43.765' E130° 04.662')



Manara Telkomsel Atkari



Dermaga Atkari (S1° 43.669' E130° 04.554')



Bagan Atkari



Gedung Serbaguna Atkari (S1° 43.742' E130° 04.589')

Fasilitas Umum Kam. Suatut



SD Inpres Suatut



GKI SUATUT (S0° 45.226' E131° 36.295')



Bank Papua Waigama (S1° 49.727' E129° 49.527')



SD Negeri 14 Waigama (S1° 49.748' E129° 49.504')



BUMKAM WAIGAMA





Kantor Kampung Waigama (S0° 45.141' E131° 34.992')



Masjid Waigama

Fasilitas Kamp. Suatolo dan Malaumkarta



Balai Kampung Malaumkarta ( $S0^{\circ} 45.141' E131^{\circ} 34.992'$ )



Balai Kampung Suwatolo ( $S0^{\circ} 45.085' E131^{\circ} 35.056'$ )



SD Negeri 02 Sorong Kamp. Malaum Karta (S0° 45.006' E131° 35.053')



GKI Silo Malaum Karta (S0° 45.239' E131° 35.022')



PUSTU Malaumkarta (S0° 44.991' E131° 34.975')



SMP Negeri 24 Sorong Kamp. Malaumkarta (S0° 45.119' E131° 35.093')

3.



4. ikan tangkapan di Atkari



Gedung Gereja Baru Salafen (S1° 49.766' E129° 50.336')



Sanggar PKK Salafen (S1° 49.740' E129° 50.358')



Kantor Kampung Salafen (S1° 49.739' E129° 50.353')



SD Negri 27 Salafen (S1° 49.754' E129° 50.270')





Koramil Salafen



Gedung Serbaguna Salafen ( $S1^{\circ} 49.742' E129^{\circ} 50.101'$ )



SMP Negeri 3 Salafen (S1° 49.835' E129° 49.977')



GKI Imanuel Salafen (S1° 49.781' E129° 50.008')



Puskesmas Wagama Salafen ( $S1^{\circ} 49.807'$   $E129^{\circ} 49.926'$ )



Menara Telkomsel Salafen



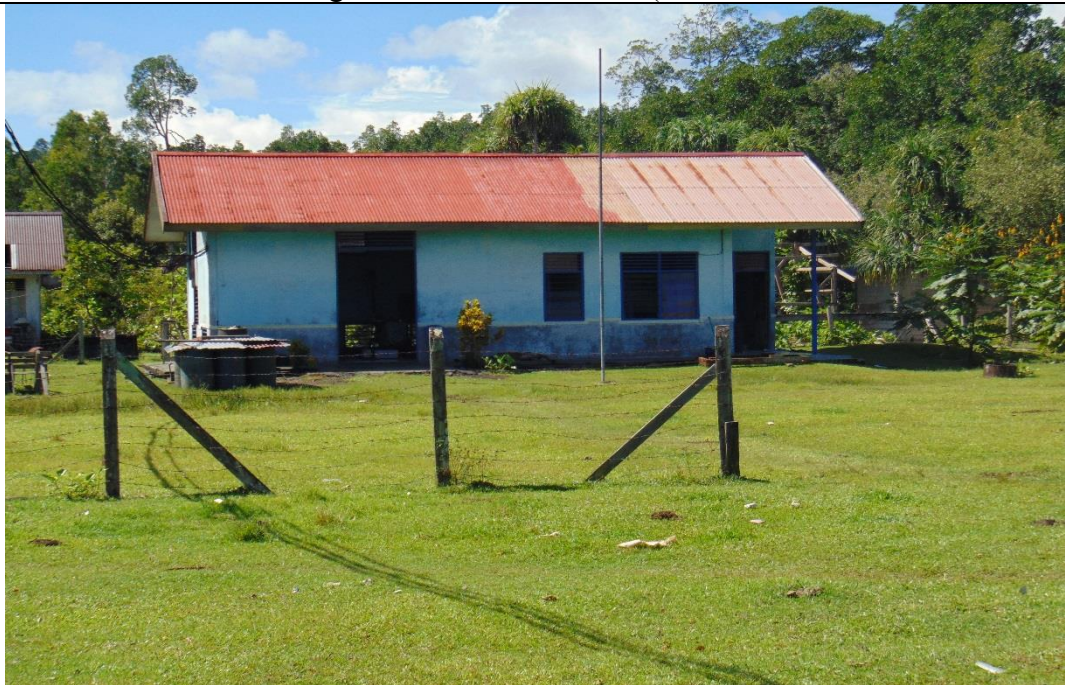
Kantor Distrik Misol Utara Salafen ( $S1^{\circ} 49.884'$   $E129^{\circ} 49.896'$ )



Kantor Agama Misol Utara Salafen



Kantor Perhubungan Misol Utara Salafen (S1° 49.809' E129° 49.799')



PLTD Salafen dan Waigama



Pasar Sentral Salafen



# Konservasi Alam Nusantara

Untuk Indonesia Lestari



Hak Cipta: Program Kelautan Yayasan Konservasi  
Alam Nusantara © Tahun 2021

